

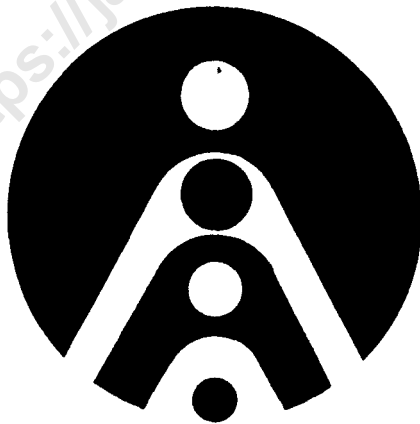
<http://jabar.bps.go.id>



**PROFIL KEPENDUDUKAN**

**PROPINSI JAWA BARAT**

<https://jabar.bps.go.id>



PROFIL KEPENDUDUKAN  
PROPINSI JAWA BARAT

ISBN. 979-402-804-5  
No. Publikasi : 03320.9310

**Naskah :**  
Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat

**Gambar Kulit :**  
Bagian Penyajian Data

**Diterbitkan oleh :**  
Biro Pusat Statistik

**Dicetak oleh :**  
C.V. Sinar Bintang Lautaka

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

ORGANISASI PENULISAN  
PROFIL KEPENDUDUKAN PROPINSI  
JAWA BARAT

---

---

PENANGGUNG JAWAB : Soekajat Darmosuwito, MA

PENANGGUNG JAWAB TEKNIS : Drs. Lukman Ismail, MA

PENULIS : 1. Drs. Lukman Ismail, MA  
2. Drs. Bambang Luarso  
3. Drs. Didin A Holidin, MA

ASISTEN PENULIS/PENGOLAHAN DATA : 1. Ir. Sri Daty  
2. R.G. Oeloen Djajadilaga  
3. Drs. Maman Suherman  
4. Asep Riyadi  
5. Kiki M.R

E D I T O R : DR. Sri Harjati Hatmadji

## KATA PENGANTAR

Kegiatan penulisan Profil Kependudukan ini merupakan salah satu dari serangkaian kegiatan Sensus Penduduk (SP) 1990. Buku Profil Kependudukan ini menyajikan ulasan secara deskriptif situasi penduduk dari hasil pengumpulan data sampel dan merupakan pelengkap dari seri penerbitan "Penduduk Jawa Barat: Hasil Sensus Penduduk 1990" yang berisi tabel-tabel. Aspek kependudukan yang dibahas meliputi antara lain perubahan komponen pertumbuhan penduduk, profil pendidikan dan ketenagakerjaan penduduk, dan gambaran umum keadaan perumahan rumahtangga. Terbitan semacam ini berjumlah 28 buku, 1 buku untuk setiap propinsi dan 1 buku untuk nasional.

Penulis Profil Kependudukan ini pada umumnya staf Biro Pusat Statistik dan Kantor Statistik Propinsi. Bagi sebagian dari mereka, kegiatan ini merupakan pengalaman yang pertama sehingga di sana-sini masih banyak kekurangannya. Tetapi kami berharap publikasi ini akan bermanfaat, baik bagi para pemerhati masalah kependudukan maupun bagi para perencana pembangunan atau pengambil keputusan di tingkat daerah maupun pusat. Terutama bagi penulis yang juga bertanggung jawab atas pekerjaan pengumpulan data di lapangan, diharapkan pengalaman tersebut dapat mendorong meningkatkan mutu data yang dikumpulkan.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa publikasi Profil Kependudukan tidak mungkin terlaksana tanpa kerja keras, dedikasi, serta pengorbanan waktu dari banyak pihak. Untuk itu, kepada semua yang telah memungkinkan terlaksananya kegiatan ini, kami ucapkan terima kasih. Juga kepada para penulis, editor, dan staf Bagian Analisa Statistik Sosial, secara tulus kami menyampaikan penghargaan yang setinggi tingginya. Kritik dan saran sangat kami harapkan untuk penerbitan pada masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 1993

Biro Pusat Statistik  
Kepala,



Drs. Azwar Rasyid

-----  
NIP.: 340000285

## DAFTAR ISI

	Halaman
ORGANISASI PENULISAN PROFIL KEPENDUDUKAN	ii
PROPINSI JAWA BARAT	
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv - v
DAFTAR TABEL	vi - xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	1
1.3. Sumber Data	2
1.4. Gambaran Umum Daerah Jawa Barat	2
1.4.1. Geografi dan Iklim	2
1.4.2. Keadaan Ekonomi	4
1.4.3. Keadaan Sosial Budaya	4
BAB II TINGKAT PERTUMBUHAN, PERSEBARAN DAN KOMPOSISI PENDUDUK	10
2.1. Pendahuluan	10
2.2. Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk	10
2.3. Persebaran dan Kepadatan Penduduk	12
2.4. Komposisi Penduduk	12
2.5. Formasi Keluarga	18
BAB III KOMPONEN PERUBAHAN PENDUDUK	19
3.1. Pendahuluan	19
3.2. Fertilitas	19
3.2.1. Persentase Perempuan Yang Pernah Kawin	20
3.2.2. Umur Perkawinan Pertama	21
3.2.3. Keluarga Berencana	22
3.3. Mortalitas	24
3.4. Migrasi	25
3.4.1. Karakteristik Migran	31
BAB IV PENDIDIKAN	34
4.1. Pendahuluan	34
4.2. Angka Buta Huruf	34
4.3. Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	38
4.4. Kemampuan Berbahasa Indonesia	39
4.5. Partisipasi Sekolah	42

	Halaman
BAB V KETENAGAKERJAAN	52
5.1. Pendahuluan	52
5.2. Komposisi Tenaga kerja	53
5.3. Penduduk Yang Bekerja	61
5.4. Pengangguran	64
BAB VI PERUMAHAN DAN LAHAN PERTANIAN	71
6.1. Pendahuluan	71
6.2. Luas Lantai	77
6.3. Penggunaan Bahan Bakar	77
6.4. Sumber Air Minum dan Pembuangan Air	81
6.5. Pemilikan Barang Rumahtangga dan Lahan Pertanian	85
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKSANAAN	96
7.1. Kesimpulan	96
7.2. Saran Kebijakan	97
DAFTAR PUSTAKA	99-100

DAFTAR TABEL

NO	J U D U L	HALAMAN
1.1	Banyaknya Kecamatan dan Desa/Kelurahan Berikut Nama Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990	3
1.2	Perkembangan PDRB per Kapita Jawa Barat, Tahun 1984 dan 1989 (Harga Konstant 1983)	5
1.3	Jumlah Pemeluk Agama Menurut Agama yang Dianut di Jawa Barat	6
1.4	Persentase Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990	7
1.5	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas Menurut Kabupaten/Kotamadya, Bahasa Ibu yang Digunakan dan Jenis Kelamin Tahun 1990	8
1.6	Perkembangan Indeks Mutu Hidup Menurut Kabupaten/Kotamadya dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990	9
2.1	Jumlah Penduduk SP-71, SP-80, SP-90 dan Laju Pertumbuhan Penduduk 1971 - 1980 dan 1980 - 1990	11
2.2	Persentase Penduduk Urban Menurut Kabupaten/Kotamadya Tahun 1971, 1980 dan 1990	13
2.3	Rata-rata Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kotamadya Tahun 1971, 1980 dan 1990	15
2.4	Persentase Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990	16
2.5	Sex Ratio Menurut Kabupaten/Kotamadya Tahun 1971, 1980 dan 1990	17
2.6	Persentase Penduduk Menurut Hubungan dengan Kepala Rumahtangga, Tahun 1990	18
3.1	Age Specific Fertility Rates (ASFR) dan Total Fertility Rate (TFR) Tahun 1980 - 1990	20
3.2	Persentase Penduduk Wanita yang Pernah Kawin Tahun 1980 dan 1990	21
3.3	Median Umur Perkawinan Pertama Menurut Golongan Umur Perempuan dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990	22



3.4	Rata-rata Umur Kawin Pertama Menurut Daerah, Tahun 1971, 1980 dan 1990	23
3.5	Persentase Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi yang Digunakan, Tahun 1987 dan 1990	25
3.6	Perkiraan Angka Kematian Bayi dan Angka Harapan Hidup, Tahun 1980 dan 1990	26
3.7	Angka Kematian Anak ( $5^{q0}$ ) per 1.000 Kelahiran Hidup, Tahun 1980 dan 1990	27
3.8	Penduduk Menurut Tempat Lahir dan Tempat Tinggal Sekarang, Tahun 1971, 1980 dan 1990 (x. 1.000)	28
3.9	Persentase Migrasi Masuk, Migrasi Keluar dan Migrasi Netto semasa Hidup Menurut Propinsi di Pulau Jawa Tahun 1971, 1980 dan 1985	29
3.10	Persentase Migrasi Masuk, Migrasi Keluar dan Migrasi Netto Menurut Tempat Tinggal 5 Tahun yang Lalu di Pulau Jawa Tahun 1980 dan 1985	30
3.11	Persentase Migran Berdasarkan Tempat Tinggal Terakhir sebelumnya dan Alasan Pindah, Tahun 1985	31
3.12	Rasio Jenis Kelamin Migran Masuk Menurut Jenis Migran per Daerah Pembangunan Tahun 1984	32
3.13	Persentase Migran Masuk Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 1984	33
4.1	Persentase Angka Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tahun 1971, 1980, 1990	35
4.2	Persentase Angka Buta Huruf Menurut Kabupaten/Kotamadya Tahun 1971, 1980 dan 1990	36
4.3	Persentase Angka Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin dan Umur, Tahun 1980 dan 1990	37
4.4	Persentase Angka Buta Huruf Menurut Daerah dan Umur, Tahun 1980 dan 1990	38
4.5	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990	39
4.6	Penduduk yang Berumur 10 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Tahun 1990	40

4.7	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas yang Buta Huruf Menurut Propinsi dan Daerah Tahun 1980 dan 1990	42
4.8	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990	43
4.9	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas Menurut Propinsi/Kepulauan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 1980 dan 1990	44
4.10	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke atas Menurut Kabupaten/Kotamadya, Bahasa yang Di pakai Sehari-hari dan Jenis Kelamin, Tahun 1990	45
4.11	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke atas Menurut Kabupaten/Kotamadya, Bahasa yang Di pakai Sehari-hari dan Jenis Kelamin, Tahun 1990 (Daerah Pedesaan)	46
4.12	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke atas Menurut Kabupaten/Kotamadya, Bahasa yang Di pakai Sehari-hari dan Jenis Kelamin, Tahun 1990 (Daerah Kota+Pedesaan)	47
4.13	Persentase Angka Masih Sekolah Pada Tingkat SD, SMTP, SMTA dan Universitas Menurut Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 1980 dan 1990	48
4.14	Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas yang Masih Sekolah Menurut Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 1990	49
4.15	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke atas yang Masih Sekolah Menurut Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990	50
4.16	Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Tingkat Sekolah, Tahun 1981 dan 1990	51
5.1	Banyaknya Penduduk, Angkatan Kerja dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Daerah, Tahun 1971, 1980 dan 1990	54
5.2	Persentase Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan, Jenis Kelamin dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990	55

5.3	Persentase Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990	56
5.4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Ketergantungan Ekonomi Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tahun 1980 dan 1990	57
5.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Daerah Tahun 1971, 1980 dan 1990	59
5.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990	60
5.7	Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tahun 1971, 1980 dan 1990	62
5.8	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990	63
5.9	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 1980 dan 1990	65
5.10	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 1990	66
5.11	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jenis Pekerjaan Utama, Tahun 1980 dan 1990	67
5.12	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tahun 1980 dan 1990	68
5.13	Persentase Tingkat Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin, dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990	69
5.14	Persentase Tingkat Pengangguran Menurut Jenis Kelamin, Tahun 1980 dan 1990	70

6.1	Jumlah Rumahtangga dan Laju Pertumbuhan Rumah Tangga Tahun 1971-1980 dan 1980-1990 Menurut Kabupaten/Kotamadya	72
6.2	Hubungan Antara Angka Kematian Bayi dengan Fasilitas Rumahtangga Tahun 1990	73
6.3	Persentase Rumahtangga Menurut Luas Lantai dan Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990 Daerah Kota+Pedesaan	74
6.4	Persentase Rumahtangga Menurut Luas Lantai dan Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990 Daerah Kota	75
6.5	Persentase Rumahtangga Menurut Luas Lantai dan Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990 Daerah Pedesaan	76
6.6	Persentase Rumahtangga Menurut Penggunaan Jenis Bahan Bakar Untuk Penerangan dan Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990 Daerah Kota+Pedesaan	78
6.7	Persentase Rumahtangga Menurut Penggunaan Jenis Bahan Bakar Untuk Penerangan dan Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990 Daerah Pedesaan	79
6.8	Persentase Rumahtangga Menurut Penggunaan Jenis Bahan Bakar Untuk Penerangan dan Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990 Daerah Kota	80
6.9	Persentase Rumahtangga menurut Penggunaan Bahan Bakar Untuk Memasak dan Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990 Daerah Kota+Pedesaan	82
6.10	Persentase Rumahtangga menurut Penggunaan Bahan Bakar Untuk Memasak dan Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990 Daerah Kota	83
6.11	Persentase Rumahtangga menurut Penggunaan Bahan Bakar Untuk Memasak dan Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990 Daerah Pedesaan	84
6.12	Persentase Rumahtangga Menurut Sumber Air Minum dan Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990 Daerah Kota+Pedesaan	86
6.13	Persentase Rumahtangga Menurut Sumber Air Minum dan Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990 Daerah Kota	87

6.14	Persentase Rumahtangga Menurut Sumber Air Minum dan Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990 Daerah Pedesaan	88
6.15	Persentase Rumahtangga Menurut Tempat Buang Air Besar dan Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990 Daerah Kota+Pedesaan	89
6.16	Persentase Rumahtangga Menurut Tempat Buang Air Besar dan Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990 Daerah Kota	90
6.17	Persentase Rumahtangga Menurut Tempat Buang Air Besar dan Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990 Daerah Pedesaan	91
6.18	Persentase Rumahtangga Menurut Barang Rumahtangga yang Dimiliki dan Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990 Daerah Kota+Pedesaan	92
6.19	Persentase Rumahtangga Menurut Barang Rumahtangga yang Dimiliki dan Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990 Daerah Kota	93
6.20	Persentase Rumahtangga Menurut Barang Rumahtangga yang Dimiliki dan Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990 Daerah Pedesaan	94
6.21	Rata-rata Tanah Pertanian yang dikuasai per Rumahtangga di Daerah Pedesaan Menurut Kabupaten, Tahun 1983	95

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kebutuhan data atau informasi guna keperluan perencanaan di bidang kependudukan, sosial ekonomi dan bidang lainnya dirasakan semakin meningkat. Hal ini terutama dalam menyongsong tahap tinggal landas. Namun, dewasa ini data yang diperlukan masih kurang memadai, sehingga sistem informasi kependudukan belum sepenuhnya berfungsi secara efektif dalam menunjang program-program kependudukan.

Salah satu hambatan dalam penyediaan data atau informasi yang akurat, tepat waktu, dan dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan, adalah belum adanya mekanisme dan media yang dapat digunakan pada setiap jenjang administrasi. Keadaan ini menjadi dasar dibuatnya Profil Kependudukan Propinsi Jawa Barat.

Tujuan penulisan Profil Kependudukan Propinsi Jawa Barat ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi data atau informasi kependudukan di Jawa Barat, sehingga dapat menunjang pembangunan di bidang kependudukan. Profil Kependudukan Propinsi Jawa Barat ini terdiri dari tujuh bab. Bab I merupakan Pendahuluan, dilanjutkan dengan Tingkat Pertumbuhan, Persebaran dan Komposisi Penduduk dalam Bab II. Bab III dan Bab IV akan berturut-turut menguraikan Komponen Perubahan Penduduk dan Pendidikan. Bab V berisi Ketenagakerjaan, sedangkan Bab VI berisi Perumahan dan Lahan Pertanian. Kesimpulan dan Saran akan diuraikan dalam Bab VII.

## 1.2. Ruang Lingkup

Profil Kependudukan Propinsi Jawa Barat ini membahas data kependudukan di tingkat kabupaten/kotamadya di Jawa Barat. Namun, untuk beberapa data, hanya untuk tingkat propinsi saja

yang disajikan. Hal ini disebabkan tidak tersedianya data tersebut untuk tingkat kabupaten/kotamadya. Untuk keperluan perbandingan, data nasional juga akan dicantumkan.

### **1.3. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penyusunan profil kependudukan Jawa Barat berasal dari hasil sensus dan survei-survei yang dilaksanakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS), serta sumber-sumber lainnya. Sensus yang dimaksudkan di sini adalah Sensus Penduduk tahun 1971, 1980, dan 1990, sedangkan hasil survei berasal dari Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 1985. Sumber lainnya adalah Registrasi Penduduk.

### **1.4. Gambaran Umum Daerah Jawa Barat**

#### **1.4.1. Geografi dan Wilayah Administrasi**

Luas wilayah Propinsi Jawa Barat tercatat 44.176 Km<sup>2</sup> (32,80 persen dari luas Pulau Jawa, atau 2,18 persen dari luas Indonesia). Propinsi ini terletak di ujung sebelah barat pulau Jawa; yaitu antara 5° 50' - 7° 50' Lintang Selatan dan 104° 48' Bujur Timur, yang berbatasan dengan Selat Sunda di sebelah barat, Laut Jawa dan DKI Jakarta di bagian utara, Propinsi Jawa Tengah di sebelah timur, dan Samudera Indonesia di bagian selatan.

Secara administrasi, Jawa Barat terdiri dari 20 kabupaten dan empat kotamadya, dengan jumlah kecamatan sebanyak 469 buah. Diantara kabupaten yang ada, Kabupaten Bandung mempunyai kecamatan yang paling banyak (38 buah) sedang Kabupaten Purwakarta mempunyai jumlah kecamatan paling sedikit, yaitu 10 buah. Di tingkat kotamadya, Kotamadya Bandung memiliki kecamatan terbanyak (26 buah) dan Kotamadya Sukabumi terkecil, yaitu hanya empat buah saja. Jumlah desa/kelurahan yang ada di Jawa Barat tercatat sebanyak 7.101 buah. Tabel 1.1 memuat jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di setiap kabupaten/kotamadya di Jawa Barat.

Tabel 1.1: Banyaknya Kecamatan dan Desa/Kelurahan  
Berikut Nama Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya  
Tahun 1990

Kabupaten/ Kotamadya	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Nama Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya
[1]	[2]	[3]	[4]
01. Pandeglang	16	335	Pandeglang
02. L e b a k	15	300	Rangkas Bitung
03. B o g o r	29	530	Cibinong
04. Sukabumi	27	356	Sukabumi
05. Cianjur	21	313	Cianjur
06. Bandung	38	448	Soreang
07. G a r u t	28	403	Garut Kota
08. Tasikmalaya	29	412	Tasikmalaya
09. Ciamis	25	358	Ciamis
10. Kuningan	17	569	Kuningan
11. Cirebon	21	424	Sumber
12. Majalengka	17	327	Majalengka
13. Sumedang	17	269	Sumedang
14. Indramayu	19	310	Indramayu
15. S u b a n g	18	250	Subang
16. Purwakarta	10	192	Purwakarta
17. Karawang	14	302	Karawang
18. Bekasi	20	237	Bekasi
19. Tangerang	21	360	Tangerang
20. Serang	27	412	Serang
21. Kod. Bogor	5	22	Bogor
22. Kod. Sukabumi	4	15	Sukabumi
23. Kod. Bandung	26	135	Bandung
24. Kod. Cirebon	5	22	Cirebon
Jawa Barat	469	7101	

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat (1991<sup>b</sup>)



Propinsi Jawa Barat dikenal sebagai daerah yang paling subur di Jawa dan sangat kaya akan sumber-sumber alam yang dialiri sungai-sungai dan dibentengi gunung-gunung (Daroeman, 1972). Saat ini tidak kurang dari 514 buah sungai beserta anak-anak sungainya yang mengalir di Jawa Barat. Sungai-sungai ini dapat dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik. Sekitar 23 persen kebutuhan tenaga listrik nasional merupakan andil Jawa Barat. Di samping sungai-sungai yang mengalir, di Jawa Barat terdapat pula gunung-gunung, baik yang masih aktif maupun yang tidak aktif lagi. Gunung-gunung ini juga nampaknya dapat mengakibatkan tanah-tanah yang subur bagi pertanian, di samping dapat digunakan juga sebagai pembangkit listrik tenaga uap/panas.

#### 1.4.2. Keadaan Ekonomi

Pembangunan Jawa Barat lebih diarahkan pada pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, di mana pembangunan sektor industri yang ditunjang oleh sektor pertanian lebih diprioritaskan. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat per tahun dalam kurun waktu 1984-1989 berada di atas laju pertumbuhan ekonomi nasional. Selengkapnya diperlihatkan dalam Tabel 1.2. Tahun 1987 merupakan tahun dengan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat terendah (3,73 persen), sedangkan angka tertinggi dicapai dalam tahun 1984 (17,17 persen). Demikian pula dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita per tahun; yaitu 5,96 persen untuk Jawa Barat dan 3,37 persen untuk nasional. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ini masih di atas laju pertumbuhan penduduk dalam periode 1980-1990 (2,57 persen).

#### 1.4.3. Keadaan Sosial Budaya

Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Jawa Barat, yaitu sebanyak 98,03 persen (Tabel 1.3). Namun demikian, kehidupan beragama antara masyarakat muslim dan non-Muslim di Jawa Barat memperlihatkan tingkat kerukunan yang tinggi. Mereka dapat hidup secara berdampingan dan memiliki toleransi yang tinggi.

Tabel 1.2: Perkembangan PDRB Per Kapita Jawa Barat,  
Tahun 1984-1989 (Harga Konstan 1983)

Tahun	PDRB Jawa Barat (%)	PDB Nasional (%)	PDRB Perkapita Jawa Barat (%)	PDB Perkapita Nasional (%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1984	17,17	6,98	15,42	4,73
1985	6,12	2,46	7,78	0,31
1986	6,58	5,88	4,19	3,67
1987	3,73	4,93	1,43	2,77
1988	7,88	5,73	5,50	3,56
1989	7,82	7,39	5,45	5,18
Rata-rata	8,22	5,56	5,96	3,37

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat  
dan Bappeda Tk. I Jawa Barat (1992<sup>a</sup>)

Sarana peribadatan di Jawa Barat dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Banyaknya sarana peribadatan di Jawa Barat pada tahun 1990 diilustrasikan dalam Tabel 1.4.

Tabel 1.5 memperlihatkan adanya peningkatan jumlah penduduk Jawa Barat yang mampu berbahasa Indonesia. Jumlah penduduk Jawa Barat yang menggunakan bahasa Indonesia meningkat dari 10,09 persen pada tahun 1980 menjadi 13,05 persen pada tahun 1990. Walaupun demikian, tingkat penggunaan bahasa Indonesia tersebut masih relatif rendah. Kabupaten Bekasi memiliki persentase terbesar dalam hal pemakaian bahasa Indonesia (58,68 persen), sedangkan Kabupaten Ciamis memiliki persentase terendah, yaitu 0,21 persen.

Tabel 1.3: Jumlah Pemeluk Agama menurut Agama yang dianut di Jawa Barat

Agama	1986		1987		1988		1989		1990	
		(%)		(%)		(%)		(%)		(%)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
Islam	28427098	98,20	29926122	97,87	29984255	97,88	30168440	98,12	32698318	98,03
Katolik	132702	0,46	203449	0,67	203499	0,66	114336	0,37	155933	0,47
Protestan	224182	0,77	255735	0,84	255735	0,84	339149	1,10	306376	0,92
Hindu	15722	0,06	34578	0,11	34578	0,11	21638	0,07	34706	0,10
Budha	134601	0,46	142053	0,46	142053	0,46	83678	0,27	132569	0,40
Lainnya	14576	0,05	14576	0,05	14576	0,05	21318	0,07	28910	0,08
Jumlah	28948881	100,00	30576513	100,00	30634646	100,00	30748559	100,00	33356872	100,00

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat (1991<sup>a</sup>)

Peningkatan angka melek huruf merupakan salah satu indikator sederhana untuk mengukur keberhasilan di bidang pendidikan. Selain itu, angka melek huruf merupakan komponen di dalam indeks mutu hidup (IMH), di samping angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Indeks ini digunakan untuk mengukur pembangunan sumber daya manusia secara fisik. Dilihat dari IMH, posisi Jawa Barat pada tahun 1980 masih berada di bawah posisi nasional; yaitu 54,43 untuk Jawa Barat dan 57 untuk nasional (Tabel 1.6).

Tabel 1.4: Persentase Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990

Kabupaten/Kotamadya	Mesjid	Langgar	Mushola	Gereja Protestan	Gereja Katolik	Pura Hindu	Vihara Budha	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
01. Kab. Pandeglang	34,40	58,65	6,89	0,06	-	-	-	100,00
02. Kab. L e b a k	35,79	60,25	3,84	0,09	0,03	-	-	100,00
03. Kab. B o g o r	27,95	69,36	2,34	0,27	0,08	-	-	100,00
04. Kab. Sukabumi	30,67	66,52	2,70	0,07	0,01	-	0,03	100,00
05. Kab. Cianjur	24,70	70,62	4,42	0,21	0,01	-	0,04	100,00
06. Kab. Bandung	22,85	52,48	24,34	0,30	0,03	-	-	100,00
07. Kab. G a r u t	23,53	60,07	16,34	0,04	0,01	-	0,01	100,00
08. Kab. Tasikmalaya	32,23	49,69	17,86	0,16	0,06	-	0,02	100,00
09. Kab. Ciamis	30,85	65,01	3,80	0,29	0,05	-	0,01	100,00
10. Kab. Kuningan	12,32	67,80	19,58	0,13	0,17	-	-	100,00
11. Kab. Cirebon	13,30	79,58	6,04	0,37	0,18	-	0,53	100,00
12. Kab. Majalengka	13,83	70,02	15,66	0,42	0,07	-	-	100,00
13. Kab. Sumedang	31,13	50,88	17,83	0,16	-	-	-	100,00
14. Kab. Indramayu	14,16	81,79	3,27	0,67	0,11	-	-	100,00
15. Kab. S u b a n g	27,48	63,00	8,89	0,52	0,11	-	-	100,00
16. Kab. Purwakarta	22,91	70,72	5,78	0,37	0,15	-	0,07	100,00
17. Kab. Karawang	26,31	69,86	2,93	0,57	0,08	-	0,25	100,00
18. Kab. B e k a s i	26,47	67,46	4,67	1,03	0,03	-	0,34	100,00
19. Kab. Tangerang	21,21	72,77	5,24	0,46	-	-	0,32	100,00
20. Kab. S e r a n g	30,97	65,13	3,68	0,19	0,03	-	-	100,00
21. Kod. B o g o r	30,87	47,77	7,72	5,69	0,41	2,03	5,49	100,00
22. Kod. Sukabumi	30,75	41,18	21,12	6,68	0,27	-	-	100,00
23. Kod. Bandung	48,82	38,04	7,99	3,89	0,45	-	0,81	100,00
24. Kod. Cirebon	19,04	64,00	13,76	3,04	0,16	-	-	100,00
Jawa Barat	25,97	62,94	10,56	0,38	0,06	0,01	0,09	100,00

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat (1991<sup>b</sup>)

Tabel 1.5: Persentase Penduduk berumur 5 Tahun Keatas menurut Kabupaten/ Kotamadya, Bahasa Ibu yang Digunakan dan Jenis Kelamin Tahun 1990

Kota+Pedesaan

Kabupaten/ Kotamadya	Indonesia		Daerah		Asing		Tak Terjawab		Jumlah
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
01. Kab. Pandeglang	0,54	0,38	49,67	48,96	0,00	0,01	0,22	0,21	100,00
02. Kab. Lebak	0,42	0,35	50,21	48,57	0,00	0,00	0,27	0,27	100,00
03. Kab. Bogor	15,40	15,02	35,25	34,23	0,02	0,01	0,04	0,04	100,00
04. Kab. Sukabumi	0,52	0,38	49,79	49,20	0,01	0,00	0,05	0,05	100,00
05. Kab. Cianjur	0,43	0,39	49,77	49,28	0,01	0,00	0,06	0,05	100,00
06. Kab. Bandung	2,25	2,07	47,30	47,97	0,01	0,01	0,20	0,20	100,00
07. Kab. Garut	0,13	0,13	49,16	50,16	0,00	0,00	0,19	0,24	100,00
08. Kab. Tasikmalaya	0,33	0,31	48,68	50,33	0,01	0,01	0,18	0,15	100,00
09. Kab. Ciamis	0,10	0,11	48,63	50,77	0,01	0,01	0,19	0,18	100,00
10. Kab. Kuningan	0,27	0,21	49,31	50,13	0,00	-	0,04	0,04	100,00
11. Kab. Cirebon	1,03	1,04	48,26	49,22	0,00	-	0,22	0,24	100,00
12. Kab. Majalengka	0,30	0,27	48,71	50,40	-	-	0,14	0,18	100,00
13. Kab. Sumedang	0,24	0,19	49,40	50,11	0,01	-	0,02	0,02	100,00
14. Kab. Indramayu	0,51	0,41	48,96	49,76	-	-	0,17	0,19	100,00
15. Kab. Subang	0,56	0,48	48,69	49,95	-	-	0,17	0,16	100,00
16. Kab. Purwakarta	0,88	0,77	49,67	48,54	0,02	0,02	0,04	0,06	100,00
17. Kab. Karawang	3,79	3,79	46,21	46,11	0,01	0,01	0,04	0,05	100,00
18. Kab. Bekasi	29,4	29,26	20,23	20,33	0,08	0,05	0,31	0,32	100,00
19. Kab. Tangerang	4,34	23,60	25,92	25,49	0,04	0,04	0,29	0,28	100,00
20. Kab. Serang	2,30	1,94	47,92	47,42	0,03	0,01	0,22	0,17	100,00
21. Kod. Bogor	16,74	16,10	33,19	33,75	0,06	0,08	0,04	0,05	100,00
22. Kod. Sukabumi	8,71	7,01	40,73	42,94	0,06	0,11	0,25	0,20	100,00
23. Kod. Bandung	7,96	7,48	41,80	42,00	0,20	0,17	0,21	0,18	100,00
24. Kod. Cirebon	16,07	17,19	32,37	33,61	0,24	0,20	0,16	0,17	100,00
Jawa Barat	6,62	6,43	43,17	43,42	0,03	0,02	0,16	0,16	100,00

Sumber: BPS (1992)

Tabel 1.6: Perkembangan Indeks Mutu Hidup Menurut Kabupaten/  
Kotamadya dan daerah, Tahun 1980 dan 1990

Kabupaten/ Kotamadya	K o t a		Pedesaan		Kota+Pedesaan	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
01. Kab. Pandeglang	56,58	7,27	57,32	65,18	57,35	65,93
02. Kab. L e b a k	55,44	64,60	47,82	64,82	48,91	64,89
03. Kab. B o g o r	57,50	77,11	46,62	61,51	48,95	68,46
04. Kab. Sukabumi	61,39	71,20	55,14	67,32	55,27	67,66
05. Kab. Cianjur	58,37	70,35	56,77	66,77	56,77	67,28
06. Kab. Bandung	71,08	81,24	61,90	74,96	63,82	77,60
07. Kab. G a r u t	69,52	80,65	53,59	68,38	55,37	69,70
08. Kab. Tasikmalaya	60,82	75,66	62,84	68,41	62,39	69,56
09. Kab. C i a m i s	59,34	72,99	55,08	68,23	59,40	68,62
10. Kab. Kuningan	75,99	82,95	60,80	74,65	62,57	75,95
11. Kab. Cirebon	61,16	73,54	53,77	68,39	55,10	70,33
12. Kab. Majalengka	58,62	82,11	49,92	69,51	51,33	70,88
13. Kab. Sumedang	77,89	93,78	66,25	78,18	66,41	79,64
14. Kab. Indramayu	57,36	64,87	39,33	54,73	41,25	55,81
15. Kab. S u b a n g	68,37	83,24	49,33	67,69	50,05	69,22
16. Kab. Purwakarta	58,81	82,30	51,14	63,81	52,27	67,44
17. Kab. Karawang	67,48	70,95	39,42	55,83	43,33	58,89
18. Kab. B e k a s i	51,52	77,75	39,22	53,73	41,41	64,93
19. Kab. Tangerang	62,40	80,36	44,64	61,39	46,76	69,99
20. Kab. S e r a n g	73,61	77,76	46,16	54,47	50,26	58,25
21. Kod. B o g o r	56,03	88,51	-	-	56,23	88,51
22. Kod. Sukabumi	72,11	82,23	-	-	72,11	81,51
23. Kod. Bandung	75,10	84,08	-	-	75,10	84,08
24. Kod. Cirebon	67,29	81,41	-	-	67,29	68,81
Jawa Barat	66,31	78,47	52,63	65,01	54,43	68,58
Nasional*)	69,00	-	54,00	-	57,00	-

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat dan Bappeda Tk I Jawa Barat (1992<sup>b</sup>)

\*) BPS (1990)

## BAB II TINGKAT PERTUMBUHAN, PERSEBARAN, DAN KOMPOSISI PENDUDUK

### 2.1. Pendahuluan

Jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan yang masih tinggi, struktur umur yang masih muda serta persebarannya tidak merata merupakan ciri-ciri kependudukan Jawa Barat. Di samping itu kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya masih dalam tahap perkembangan. Berdasarkan data sensus penduduk beberapa aspek demografi akan dibahas di dalam bab ini.

### 2.2. Jumlah dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Sensus Penduduk tahun 1971 mencatat bahwa jumlah penduduk Jawa Barat saat itu sebanyak 21.620.950 orang. Dari kedua sensus berikutnya diperoleh data bahwa jumlah penduduk Jawa Barat tahun 1980 menjadi 27.449.840 orang dan pada tahun 1990 menjadi 35.381.682 orang (Tabel 2.1). Sensus Penduduk 1990 mengukuhkan Jawa Barat sebagai propinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, yang sebelumnya dipegang oleh Propinsi Jawa Timur.

Dilihat dari jumlah penduduk yang terkecil di Jawa Barat, hingga tahun 1990 Kotamadya Sukabumi tercatat dalam kriteria ini. Sedangkan untuk kriteria jumlah penduduk terbesar telah terjadi pergeseran dari Kabupaten Bandung kepada Kabupaten Bogor dengan jumlah penduduk sebesar 3.736.870 orang pada tahun 1990.

Rentang (range) jumlah penduduk di Jawa Barat 1.114.396 pada tahun 1971, 2.559.302 pada tahun 1980, dan 3.616.932 pada tahun 1990. Dengan demikian perpencaran jumlah penduduk per kabupaten/kotamadya dari waktu ke waktu semakin tidak merata.

Telah terjadi penurunan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat dari 2,66 persen dalam periode 1971 - 1980 menjadi 2,57 persen dalam periode 1980-1990. Yang menjadi persoalan adalah bahwa angka-angka tersebut masih di atas angka nasional.

Migrasi yang tidak seimbang (khususnya ke wilayah Botabek) diduga menjadi faktor penyebab yang membuat angka Jawa Barat demikian. Wilayah Botabek sendiri dalam periode 1980-1990 memiliki laju pertumbuhan sebesar 5,07 persen. Selama ini Botabek telah menjadi tempat pemukiman kembali (resettlement) oleh sebagian

Tabel 2.1: Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk menurut Kabupaten/Kotamadya Tahun 1971, 1980 dan 1990

Kabupaten/ Kotamadya	1971	1980	1990	Laju Pertumbuhan	
				71-80	80-90
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
01. Kab. Pandeglang	572628	694759	858435	2,15	2,14
02. Kab. L e b a k	546364	682868	873646	2,48	2,49
03. Kab. B o g o r	1667687	2493843	3736870	4,52	4,13
04. Kab. Sukabumi	1210,638	1517631	1848252	2,51	1,99
05. Kab. Cianjur	1125450	1387578	1662067	2,33	1,82
06. Kab. Bandung	1985410	2669200	3201332	3,31	1,83
07. Kab. G a r u t	1200407	1483035	1748616	2,35	1,66
08. Kab. Tasikmalaya	1313321	1593189	1214957	2,15	1,31
09. Kab. C i a m i s	1225597	1367578	1478476	1,21	0,78
10. Kab. Kuningan	658576	7864414	892228	1,97	1,27
11. Kab. Cirebon	1041874	1331690	1649428	2,73	2,16
12. Kab. Majalengka	749096	897722	1032023	2,01	1,40
13. Kab. Sumedang	637918	723627	831809	1,40	1,40
14. Kab. Indramayu	985361	1237450	1447830	2,53	1,58
15. Kab. S u b a n g	898227	1065251	1206664	1,89	1,25
16. Kab. Purwakarta	371491	457973	563039	2,32	2,09
17. Kab. Karawang	1003712	1236604	1491914	2,31	1,89
18. Kab. B e k a s i	830238	1143463	2104392	3,57	6,29
19. Kab. Tangerang	1066695	1529024	2764988	4,04	6,10
20. Kab. S e r a n g	859367	1109186	1470238	2,85	2,86
21. Kod. B o g o r	195142	246946	271341	2,60	0,95
22. Kod. Sukabumi	96242	109898	119938	1,48	0,88
23. Kod. Bandung	1200380	1461407	2058122	2,20	3,48
24. Kod. Cirebon	178529	223504	254477	2,51	1,31
Jawa Barat	21620950	27449840	35381682	2,66	2,57

Sumber: BPS (1991<sup>b</sup>)



DKI Jakarta. Di samping itu, wilayah Botabek merupakan kawasan industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Ini merupakan daya tarik dari wilayah Botabek. Mengurangkan Botabek dari Jawa Barat mengakibatkan laju pertumbuhan Jawa Barat menjadi kecil, yaitu 1,88 persen. Menurut kabupaten/kotamadya, laju pertumbuhan terendah untuk periode 1980-1990 terjadi di Kabupaten Ciamis (0,78 persen) dan Kabupaten Bekasi (6,29 persen) memiliki laju pertumbuhan tertinggi.

### 2.3. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Telah disebutkan di atas bahwa persebaran penduduk yang tidak merata sebenarnya bukan hanya masalah Jawa Barat saja, bahkan untuk Indonesia sekalipun. Hal ini menyangkut berbagai aspek, diantaranya aspek geografis dan tingkat pembangunan daerah. Begitu pula persebaran antara kota dan pedesaan tidak merata.

Menurut Tabel 2.2, pada tahun 1971 terdapat 12,42 persen penduduk kota dari seluruh penduduk Jawa Barat. Angka tersebut naik menjadi 20,82 persen pada tahun 1980 dan 34,51 persen pada 1990. Meningkatnya persentase penduduk kota tersebut, selain karena migrasi dari desa ke kota juga karena pengembangan wilayah atau perubahan status dari desa kepada kota.

Kepadatan penduduk per kabupaten/kotamadya diilustrasikan oleh Tabel 2.3. Kepadatan Jawa Barat pada tahun 1971 adalah 489 orang per Km<sup>2</sup>. Pada tahun 1980 Jawa Barat semakin padat lagi di mana setiap km<sup>2</sup> dihuni oleh 628 orang. Bahkan satu dekade kemudian, angka kepadatan tersebut menjadi 818 orang per Km<sup>2</sup>. Pada tahun 1990 tercatat Kotamadya Bandung (12.246,35 orang per km<sup>2</sup>) merupakan yang terpadat diantara semua kabupaten/kotamadya se Jawa Barat. Adapun Kabupaten Lebak merupakan daerah tingkat II terjarang dengan kepadatan sebesar 280,01 orang per Km<sup>2</sup>.

### 2.4. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk dapat dibedakan atas komposisi umur dan jenis kelamin. . Pertama akan dibahas mengenai komposisi umur. Untuk penduduk anak-anak (0-14 tahun), baik di kota maupun di desa persentasenya mengalami penurunan.

Tabel 2.2: Persentase Penduduk Urban Menurut Kabupaten/  
Kotamadya, Tahun 1971, 1980 dan 1990

Kabupaten/ Kotamadya	1971	1980	1990
[1]	[2]	[3]	[4]
01. Kab. Pandeglang	6,68	6,89	6,70
02. Kab. L e b a k	7,12	3,79	6,77
03. Kab. B o g o r	0	25,10	51,48
04. Kab. Sukabumi	0	13,37	18,06
05. Kab. Cianjur	12,86	12,91	14,55
06. Kab. Bandung	4,13	23,92	40,35
07. Kab. G a r u t	6,77	13,27	15,43
08. Kab. Tasikmalaya	10,36	15,13	20,42
09. Kab. C i a m i s	1	6,05	9,50
10. Kab. Kuningan	4,84	6,73	17,13
11. Kab. Cirebon	0	17,75	37,24
12. Kab. Majalengka	2,24	11,66	17,54
13. Kab. Sumedang	5,49	12,28	13,62
14. Kab. Indramayu	3,08	6,31	15,23
15. Kab. S u b a n g	4,72	10,17	14,03
16. Kab. Purwakarta	13,37	17,19	22,33
17. Kab. Karawang	6,11	13,87	22,74
18. Kab. B e k a s i	5,50	16,50	54,79
19. Kab. Tangerang	4,77	19,23	55,00
20. Kab. S e r a n g	6,55	10,97	18,30
21. Kod. B o g o r	100,00	100,00	100,00
22. Kod. Sukabumi	100,00	100,00	100,00
23. Kod. Bandung	100,00	100,00	98,46
24. Kod. Cirebon	100,00	100,00	96,24
Jawa Barat	12,42	20,82	34,51

Sumber: BPS (1991<sup>b</sup>)

Menggunakan data tahun 1980 dan tahun 1990, persentase penduduk anak-anak di daerah kota menurun dari 40,30 persen menjadi 35,65 persen; sementara di pedesaan bergerak turun dari 42,79 persen menjadi 38,57 persen (Tabel 2.4).

Di lain pihak, persentase penduduk tua (65 tahun ke atas) untuk daerah kota di Jawa Barat mengalami kenaikan dari 2,65 persen pada tahun 1980 menjadi 2,93 persen pada tahun 1990. Hal yang sama juga terjadi di daerah pedesaan di mana pada tahun 1980 tercatat sekitar 3,11 persen menjadi 3,93 persen pada tahun 1990. Terjadinya penurunan persentase penduduk umur muda dan kenaikan persentase pada penduduk usia tua mencerminkan bahwa struktur penduduk Jawa Barat sedang dalam proses meninggalkan penduduk umur muda.

Dari kedua jenis persentase ini didapat angka beban ketergantungan. Penduduk usia produktif (15-65 tahun) di Jawa Barat cenderung lebih dibebani oleh penduduk tua daripada oleh penduduk muda. Hal ini dikarenakan semakin menurunnya tingkat fertilitas di Jawa Barat dan semakin meningkatnya angka harapan hidup.

Rasio jenis kelamin (sex ratio) merupakan alat untuk menganalisa komposisi jenis kelamin. Tabel 2.5 memperlihatkan bahwa pada tahun 1980, untuk setiap 100 penduduk perempuan secara rata-rata terdapat sekitar 99,12 penduduk laki-laki. Keadaan ini menjadi terbalik pada tahun 1990 di mana rasionya menjadi 100,50. Di daerah kota untuk masa 10 tahun tersebut lebih konsisten yang ditandai dengan rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100. Pada tahun 1980 rasio jenis kelamin di kota sebesar 100,63 dan pada tahun 1990 menjadi 100,92. Jadi perbandingan kedua jenis kelamin di kota selama 10 tahun hampir tidak mengalami perubahan.

Apabila dilihat per kabupaten/kotamadya, rasio jenis kelamin ini cukup bervariasi. Pada tahun 1971; antara 95,28 (Kabupaten Majalengka) dan 102,62 (Kabupaten Bogor) pada tahun 1980; dan antara 96,55 (Kotamadya Cirebon) dan 103,16 (Kabupaten Bogor) pada tahun 1990. Daerah tingkat II yang memiliki sex ratio lebih dari 100 pada umumnya daerah industri, sehingga migran yang datang kebanyakan laki-laki.

Tabel 2.3: Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/  
Kotamadya, Tahun 1971, 1980 dan 1990

Kabupaten/ Kotamadya	Kepadatan Penduduk (Km <sup>2</sup> )		
	1971	1980	1990
[1]	[2]	[3]	[4]
01. Kab. Pandeglang	217	264	329
02. Kab. L e b a k	177	219	280
03. Kab. B o g o r	558	716	1113
04. Kab. Sukabumi	360	380	470
05. Kab. Cianjur	251	401	480
06. Kab. Bandung	626	896	1084
07. Kab. G a r u t	505	508	574
08. Kab. Tasikmalaya	477	578	662
09. Kab. C i a m i s	398	554	587
10. Kab. Kuningan	607	666	799
11. Kab. Cirebon	1062	1367	1693
12. Kab. Majalengka	785	742	254
13. Kab. Sumedang	399	491	585
14. Kab. Indramayu	491	630	748
15. Kab. S u b a n g	438	550	647
16. Kab. Purwakarta	380	552	579
17. Kab. Karawang	581	712	945
18. Kab. B e k a s i	519	891	1639
19. Kab. Tangerang	832	1196	2648
20. Kab. S e r a n g	467	591	784
21. Kod. B o g o r	9051	10855	11927
22. Kod. Sukabumi	7921	9045	9871
23. Kod. Bandung	14823	18055	12246
24. Kod. Cirebon	4948	5982	6811
Jawa Barat	489	628	818

Sumber: 1. BPS (1974) (diolah)  
2. BPS (1983<sup>a</sup>) (diolah)  
3. BPS (1992)

Tabel 2.4: Persentase Komposisi Penduduk menurut Umur dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990

Komposisi Penduduk	Kota		Pedesaan		Kota + Pedesaan	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1. Penduduk Tua ( $P_{65+}/P_x \times 100$ )	2,65	2,93	3,11	3,93	3,02	3,58
2. Penduduk Anak-anak ( $P_0/P_x \times 100$ )	40,30	35,65	42,79	38,57	42,26	37,56
3. Penduduk tua terhadap penduduk anak-anak ( $P_{65+}/P_x \times 100$ )	6,58	8,23	7,28	10,18	7,14	9,45
4. Beban Ketergantungan $\frac{P_{10-14} + P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100$	75,28	62,81	84,84	73,91	82,74	69,91
5. Beban Ketergantungan anak $\frac{P_{0-14}}{P_{15-64}} \times 100$	70,63	58,04	79,09	67,08	77,23	63,82
6. Beban Ketergantungan penduduk tua $\frac{P_{65+}}{P_{15-64}} \times 100$	4,65	4,77	5,75	6,83	5,51	6,09

Sumber: 1. BPS (1983\*) (diolah)

2. BPS (1992)

Keterangan: P = Penduduk

Tabel 2.5: Sex Ratio Menurut Kabupaten/Kotamadya  
Tahun 1971, 1980 dan 1990

Kabupaten/ Kotamadya	1971	1980	1990
[1]	[2]	[3]	[4]
01. Kab. Pandeglang	99.59	100.64	102.23
02. Kab. L e b a k	100.65	101.52	103.07
03. Kab. B o g o r	101.78	102.62	103.16
04. Kab. Sukabumi	99.43	99.91	101.88
05. Kab. Cianjur	98.88	99.48	101.41
06. Kab. Bandung	97.82	99.25	99.95
07. Kab. G a r u t	95.64	96.56	98.71
08. Kab. Tasikmalaya	94.54	95.98	97.75
09. Kab. C i a m i s	96.84	99.60	96.64
10. Kab. Kuningan	96.05	97.46	99.92
11. Kab. Cirebon	94.76	96.52	98.74
12. Kab. Majalengka	94.09	95.28	97.41
13. Kab. Sumedang	97.36	97.77	98.78
14. Kab. Indramayu	96.18	97.12	98.66
15. Kab. S u b a n g	97.71	97.76	99.39
16. Kab. Purwakarta	100.06	99.99	102.24
17. Kab. Karawang	99.15	99.33	100.54
18. Kab. B e k a s i	99.99	100.79	100.90
19. Kab. Tangerang	99.94	102.44	102.76
20. Kab. S e r a n g	97.31	99.06	102.70
21. Kod. B o g o r	101.44	101.02	101.46
22. Kod. Sukabumi	97.61	97.07	98.58
23. Kod. Bandung	100.07	102.04	101.39
24. Kod. Cirebon	94.55	96.44	96.55
Jawa Barat	98,01	99,12	100,50

Sumber: BPS (1991<sup>b</sup>)

## 2.5. Formasi Rumahtangga

Rumahtangga dalam sensus penduduk didefinisikan sebagai kelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang biasanya tinggal bersama dan makan dari satu dapur, atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan dan mengurus keperluan hidupnya sendiri. Di dalam setiap rumahtangga biasanya terdapat kepala rumahtangga, Isteri/suami, anak kandung, anak angkat, menantu, cucu, orang tua/mertua, famili, pembantu dan lainnya.

Berdasarkan formasi tersebut, di dalam Tabel 2.6 ditampilkan persentase penduduk menurut hubungan dengan kepala rumahtangga. Di daerah kota jumlah penduduk yang berstatus sebagai anak berjumlah 47,89 persen, sedangkan di daerah pedesaan berjumlah 46,86 persen, dan untuk Jawa Barat berjumlah 47,22 persen. Lebih kecilnya angka persentase di daerah pedesaan diduga karena perpindahan ke kota yang dilakukan oleh anak-anak yang sudah dewasa. Adanya status saudara dan bukan saudara di dalam suatu rumahtangga menunjukkan bahwa di Jawa Barat istilah 'extended family' masih tetap ada. Di satu pihak hal ini mencerminkan kegotongroyongan hidup (saling tolong-menolong), di lain pihak memperlihatkan adanya ketergantungan satu sama lain. Di kota, mereka yang berstatus 'bukan saudara' melebihi yang berstatus 'saudara'. Ini karena adanya pembantu rumahtangga, sopir pribadi, atau lainnya yang tinggal bersama dalam rumahtangga yang bersangkutan.

Tabel 2.6: Persentase Penduduk menurut Hubungan Dengan Kepala rumahtangga, 1990

Hubungan dengan Kepala RT	Kota			Pedesaan			Kota+Pedesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. Kepala RT	37,10	5,18	21,21	41,88	6,32	24,13	40,22	5,93	23,12
2. Isteri/Suami	0,03	34,56	17,22	0,02	40,75	20,36	0,02	38,62	19,27
3. Anak	50,01	45,75	47,89	49,73	43,98	46,86	49,83	44,59	47,22
4. Saudara	5,07	6,42	5,74	5,90	6,64	6,27	5,61	6,56	6,09
5. Bukan Saudara	8,12	8,09	8,10	2,47	2,30	2,38	4,31	4,29	4,30
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS-(1992)

Keterangan: L = Laki-laki

P = Perempuan

## BAB III KOMPONEN PERUBAHAN PENDUDUK

### 3.1. Pendahuluan

Perubahan jumlah penduduk disebabkan oleh adanya perubahan/perbedaan nilai komponen demografi, yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Diketahui bahwa Jawa Barat pada tahun 1990 merupakan propinsi dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 35.381.682 penduduk. Ada 21.620.950 orang yang tercatat sebagai penduduk Jawa Barat pada tahun 1971, dan 27.449.840 orang pada tahun 1980. Pertambahan-pertambahan penduduk tersebut merupakan resultan dari ketiga komponen demografi tersebut.

### 3.2. Fertilitas

Fertilitas yang berpengaruh terhadap penambahan jumlah penduduk bagi Jawa Barat masih menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan propinsi lain di pulau Jawa, bahkan dengan angka nasional sekalipun. Salah satu faktor yang berpengaruh, yaitu rendahnya usia kawin pertama, terutama bagi penduduk wanita.

Pada periode 1967-1970 Total Fertility Rate (TFR) untuk Jawa Barat adalah 6,335 sedangkan TFR secara nasional adalah 5,605. Pada tahun 1981-1984 TFR Jawa Barat turun menjadi 4,305 sementara untuk nasional menjadi 4,055. Keberhasilan program Keluarga Berencana di Jawa Barat memiliki andil besar di dalam penurunan TFR ini (Tabel 3.1).

Child Woman Ratio (CWR) yang menyatakan banyaknya anak-anak umur 0-4 tahun per 1000 wanita usia reproduktif (15-49) juga telah mengalami penurunan. Telah terjadi penurunan CWR dari 701 pada tahun 1971 menjadi 636 pada tahun 1980 dan 474 untuk tahun 1990. Secara kasar angka ini memberikan indikasi telah terjadinya penurunan kelahiran dalam kurun waktu lima tahun sebelum pengumpulan data.



Tabel 3.1: Age Specific Fertility Rates (ASFR)  
dan Total Fertility Rate (TFR)  
Tahun 1980 dan 1990

Umur Perempuan	1980	1990	Perubahan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
15 - 19	0,10940	0,06229	-43,06
20 - 24	0,23378	0,15446	-33,93
25 - 29	0,21111	0,15159	-28,19
30 - 34	0,16284	0,11998	-26,32
35 - 39	0,11172	0,07968	-28,68
40 - 44	0,04829	0,03478	-27,98
45 - 49	0,01495	0,01048	-29,90
TFR	4,46045	3,06635	-31,25

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>) (diolah)  
2. BPS (1992)

Keterangan: Metode "Last Live Birth"

### 3.2.1. Persentase Perempuan Yang Pernah Kawin

Banyaknya perempuan yang pernah kawin di Jawa Barat akan mempunyai peranan terhadap angka kelahiran, terutama untuk kelompok umur muda. Persentase penduduk perempuan yang pernah kawin pada periode 1980-1990 menurun sebesar 4,36 persen yaitu dari 74,23 persen (1980) menjadi 69,37 persen (1990). Ditunjukkan oleh Tabel 3.2 bahwa penurunan persentase pada kelompok umur muda (15-24) jauh lebih besar dibandingkan dengan penurunan pada kelompok-kelompok umur yang lebih tua. Tentunya diharapkan bahwa penurunan ini dapat memberikan sumbangan terhadap penurunan angka kelahiran di Jawa Barat.

### 3.2.2. Umur Perkawinan Pertama

Dengan semakin meningkatnya umur perkawinan pertama diharapkan akan memberikan penurunan di dalam kelahiran. Median umur perkawinan pertama digunakan sebagai alat ukur di dalam profil ini. Walaupun median umur perkawinan menunjukkan peningkatan, tetapi nilai median tersebut masih tergolong rendah. Tabel 3.3 memperlihatkan bahwa pada tahun 1980 median umur perkawinan pertama di Jawa Barat adalah 16,22 tahun dan angka ini meningkat menjadi 16,93 tahun pada Tahun 1990. Selain median umur perkawinan pertama, ditampilkan pula rata-rata umur perkawinan pertama yang dihitung dengan metoda "Singulate Mean Age At First Marriage", biasa disingkat dengan SMAM (UN,1983). Diasumsikan bahwa tidak terjadi perkawinan pada penduduk di bawah usia 15 tahun. Hasilnya, rata-rata umur perkawinan pertama di Jawa Barat

Tabel 3.2: Persentase dari Penduduk Wanita yang pernah kawin. Tahun 1980-1990

U m u r	1980	1990	Perubahan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
15 - 19	45,69	28,52	-17,17
20 - 24	88,51	75,08	-13,43
25 - 29	96,72	93,58	- 3,14
30 - 34	98,70	97,93	- 0,77
35 - 39	99,38	98,85	- 0,53
40 - 44	99,48	99,19	- 0,29
45 - 49	99,61	99,41	- 0,20
Jumlah	74,23	69,87	- 4,36

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>) (diolah)  
2. BPS (1992)

Tabel 3.3: Median Umur Perkawinan Pertama  
menurut golongan umur Perempuan  
dan daerah, Tahun 1980 dan 1990

Umur Perempuan	Kota		Pedesaan		Kota+Pedesaan	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
15 - 19	16,76	17,01	16,13	16,46	16,22	16,56
20 - 24	17,86	18,19	16,48	16,21	16,74	17,54
25 - 29	18,07	18,91	16,25	16,87	16,59	17,41
30 - 34	17,61	18,56	15,86	16,56	16,07	17,14
35 - 39	17,33	18,16	15,89	16,60	16,06	17,05
40 - 44	17,04	17,75	15,89	16,28	16,99	16,68
45 - 49	16,76	17,56	15,86	16,38	16,94	16,69
T o t a l	16,52	17,93	16,00	16,55	16,22	16,93

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>) (diolah)  
2. BPS (1992)

masih di bawah angka nasional, baik untuk daerah kota maupun pedesaan ; walaupun di Jawa Barat sendiri telah terjadi peningkatan. SMAM tersebut meningkat dari 18,00 pada tahun 1971 menjadi 18,60 pada tahun 1980 dan menjadi 20,40 pada tahun 1990. SMAM untuk nasional adalah 19,60 pada tahun 1971, 20,00 pada tahun 1980 dan 21,90 pada tahun 1990.

### 3.2.3. Keluarga Berencana

Tujuan ganda dari program Keluarga Berencana (KB) yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera secara umum telah membuahkan hasil. Dengan semakin banyaknya akseptor KB diharapkan tidak hanya sekedar menurunnya tingkat kelahiran, melainkan juga meningkatnya kesejahteraan ibu dan anak. Persentase peserta KB aktif di Jawa Barat selama periode 1987-

1990 yang ditunjukkan dalam Tabel 3.5 mengalami peningkatan. Peserta KB aktif yang menggunakan metoda modern telah meningkat dari 43,3 persen pada tahun 1987 menjadi 49,7 persen pada tahun 1990. Sementara pemakaian metoda tradisional telah menurun dari 2,5 persen pada tahun 1987 menjadi 1,3 persen pada tahun 1990. Di dalam metoda modern itu sendiri telah terjadi penurunan pemakaian bagi alat kontrasepsi IUD (1,4 persen) dan MOW (1,0 persen).

Tabel 3.4: Rata-rata Umur Kawin Pertama  
menurut Daerah, Tahun 1971, 1980 dan 1990

Daerah	Tahun	Jawa Barat	Nasional
[1]	[2]	[3]	[4]
Kota	1971	20,90	21,10
	1980	21,20	21,80
	1990	22,70	24,00
Pedesaan	1971	17,50	18,80
	1980	17,80	19,40
	1990	18,90	20,80
Kota+Pedesaan	1971	18,00	19,60
	1980	18,60	20,00
	1990	20,40	21,90

Sumber: 1. BPS (1974) (diolah)  
2. BPS (1983<sup>a</sup>) (diolah)  
3. BPS (1992)

### 3.3. Mortalitas

Angka kematian bayi (AKB) biasa digunakan sebagai angka ringkasan dalam hal mortalitas. Angka kematian ini merupakan suatu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di samping sebagai indikator kesehatan.

Angka kematian bayi telah mengalami penurunan, baik secara regional maupun nasional. Walaupun dari waktu ke waktu mengalami penurunan, AKB Jawa Barat masih berada di atas AKB nasional. AKB Indonesia pada tahun 1980 adalah 112 per 1000 kelahiran hidup, sementara AKB Jawa Barat masih 128,27. Selanjutnya, pada tahun 1990 AKB nasional telah mencapai 70 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan AKB Jawa Barat baru mencapai 89,13. AKB per kabupaten/kotamadya pada tahun 1980 dan 1990 ditampilkan dalam Tabel 3.6.

AKB tertinggi pada tahun 1980 dicapai oleh Kabupaten Bandung yakni 166,53 per 1000 kelahiran hidup dan terendah dicapai oleh Kotamadya Bandung yakni 75,44 per 1000 kelahiran hidup. Perubahan urutan ini telah berubah dalam satu dekade berikutnya, di mana Kabupaten Serang merupakan kabupaten dengan AKB tertinggi (123,77) dan AKB terendah diraih oleh Kotamadya Bogor (33,58). AKB ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi yang terjadi di masing-masing daerah di samping tingkat kesadaran akan pentingnya lingkungan yang sehat.

Ukuran lain yang sering diaplikasikan dalam menganalisa kematian adalah angka harapan hidup pada waktu lahir yang mempunyai kaitan dengan angka kematian bayi. Kedua ukuran ini mempunyai korelasi negatif artinya jika AKB tinggi maka angka harapan hidupnya menjadi rendah dan sebaliknya. Masih dalam Tabel 3.6 angka harapan hidup per kabupaten/kotamadya ditampilkan.

Angka kematian anak di Jawa Barat juga mengalami penurunan selama periode 1980-1990. Dari Tabel 3.7 nampak bahwa pada tahun 1980 angka kematian anak di Jawa Barat adalah 207 untuk setiap 1000 kelahiran hidup dan angka ini turun menjadi 134 untuk setiap kelahiran hidup pada tahun 1990. Semakin membaiknya kondisi ekonomi masyarakat dan dilaksanakannya program perbaikan gizi masyarakat, terutama untuk anak balita, oleh pemerintah nampaknya

merupakan faktor penyebab menurunnya angka kematian anak di Jawa Barat.

### 3.4. Migrasi

Berpindahnya penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dapat dibagi ke dalam kedua kelompok yaitu migrasi permanen dan sirkuler. Migrasi permanen adalah gerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan niat (maksud) untuk menetap di daerah tujuan. Sedangkan mobilitas sirkuler ialah gerakan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain tanpa niat untuk menetap di daerah tujuan. Penghitungan migrasi berdasarkan maksud/niat tersebut tidak operasional karena dengan faktor-faktor tertentu dapat menyebabkan niat tersebut berubah.

Tabel 3.5: Persentase Peserta KB aktif menurut Metode Kontrasepsi yang digunakan Tahun 1987 dan 1990

Metode Kontrasepsi	1987	1990	Perubahan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
IUD	8,8	7,4	-1,4
MOW	2,2	1,2	-1,0
MOP	0,1	1,1	1,0
IMPLANT	0,1	3,0	2,9
MKET	11,2	12,7	1,5
Suntikan	13,3	18,9	5,6
Pil	18,0	17,8	-0,2
Kondom	0,8	0,3	-0,5
NON MKET	32,1	37,0	4,9
Total Metode Modern	43,3	49,7	6,4
Tradisional	2,5	1,3	-1,2
Semua Metode	45,8	51,0	5,2

Sumber: 1. Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat (1988)  
2. Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat (1991<sup>a</sup>)

Tabel 3.6: Perkiraan Angka Kematian Bayi dan  
Angka Harapan Hidup, Tahun 1980 dan 1990

Kabupaten/ Kotamadya	Angka Kematian Bayi (AKB)		Angka Harapan Hidup (e°)	
	1980	1990	1980	1990
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
01. Kab. Pandeglang	120,02	98,99	50,1	54,0
02. Kab. L e b a k	146,91	96,71	45,4	54,5
03. Kab. B o g o r	143,80	90,65	46,0	55,7
04. Kab. Sukabumi	132,13	96,71	47,9	54,5
05. Kab. Cianjur	129,02	100,50	48,4	53,8
06. Kab. Bandung	166,53	66,20	52,6	60,7
07. Kab. G a r u t	132,91	91,41	47,8	55,5
08. Kab. Tasikmalaya	115,52	95,96	50,9	54,7
09. Kab. C i a m i s	116,86	94,44	56,4	55,0
10. Kab. Kuningan	101,26	61,58	53,6	61,9
11. Kab. Cirebon	112,52	71,59	51,5	59,6
12. Kab. Majalengka	136,80	78,52	47,1	58,2
13. Kab. Sumedang	95,20	57,74	54,7	62,7
14. Kab. Indramayu	143,02	103,53	46,1	53,2
15. Kab. S u b a n g	129,02	74,67	48,5	59,0
16. Kab. Purwakarta	141,27	96,71	46,6	54,4
17. Kab. Karawang	149,25	109,52	45,0	52,0
18. Kab. B e k a s i	150,80	93,68	44,8	55,0
19. Kab. Tangerang	146,13	82,31	45,6	57,3
20. Kab. S e r a n g	139,91	123,77	46,6	49,3
21. Kod. B o g o r	137,58	33,58	47,0	68,4
22. Kod. Sukabumi	83,82	57,74	57,1	62,8
23. Kod. Bandung	75,44	49,78	58,7	64,6
24. Kod. Cirebon	85,20	91,41	54,7	55,5
Jawa Barat	128,27	89,13	48,6	56,0

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat dan Bappeda Tk I  
Jawa Barat (1992)

Dalam aplikasinya, perhitungan migrasi dilakukan melalui beberapa pendekatan. Diantaranya, migrasi seumur hidup yang dihitung dengan memperhatikan perbedaan antara tempat pencacahan dengan tempat lahir. Migrasi total, pendekatan lainnya, dihitung dengan memperhatikan antara tempat tinggal terakhir dan tempat tinggal di mana ia dicacah. Selanjutnya migrasi resen didasarkan kepada perbedaan antara tempat tinggal sekarang dan tempat tinggal lima tahun yang lalu.

Tabel 3.7: Angka Kematian Anak (5q0) per 1000  
Kelahiran Hidup, Tahun 1980 dan 1990

Daerah	Tahun	Jawa Barat	Nasional
Kota	1980	163	130
	1990	95	75
Pedesaan	1980	219	175
	1990	151	112
Kota+Pedesaan	1980	207	165
	1990	134	104

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>) (diolah)  
2. BPS (1992)

Keterangan : Dihitung dengan Metode Trussell (West)

Seperti dalam Tabel 3.8 penduduk yang lahir di Pulau Sumatera dan kemudian berpindah ke Pulau Jawa selain cenderung semakin meningkat juga memiliki persentase terbesar dibandingkan dengan yang pindah dari pulau-pulau lainnya. Demikian pula perpindahan dari pulau Jawa ke Sumatera memiliki ciri yang serupa. Dari data tersebut, berapa banyaknya perpindahan dari Jawa Barat-luar Jawa Barat dan sebaliknya tidak nampak.



Tabel 3.8: Penduduk menurut Tempat Lahir dan  
Tempat Tinggal Sekarang (X 1000)  
Tahun 1971, 1980 dan 1990

Tempat Lahir	Tempat Tinggal Sekarang	Tempat Tinggal Sekarang					Jumlah
		Tahun	Sumatra	Jawa	Kali- mantan	Sula- wesi	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
Sumatera	1971	18885	348	6	8	6	19253
	1980	24825	718	26	23	20	25612
	1990	32903	1014	48	28	33	34026
Jawa	1971	1735	75370	90	57	53	77305
	1980	2906	90000	374	167	137	93584
	1990	3387	105893	867	371	345	110863
Kalimantan	1971	71	75	5024	6	2	5124
	1980	20	122	6165	10	5	6322
	1990	22	189	7947	18	8	8184
Sulawesi	1971	90	98	23	8431	52	8694
	1980	145	137	124	10109	140	10655
	1990	71	173	190	11885	155	12474
Kep. Lain	1971	28	62	3	17	7741	7851
	1980	31	115	11	74	10126	10357
	1990	51	173	38	198	13092	13552
Luar Negeri	1971	46	75	6	7	6	140
	1980	40	59	10	8	7	124
	1990	19	59	3	6	4	91
Tak Ter- jawab	1971	-	-	-	-	-	-
	1980	29	66	7	10	11	123
	1990	19	25	3	4	7	58
Jumlah	1971	20801	76028	5152	8526	7860	118367
	1980	27996	91217	6717	10401	10446	146777
	1990	36472	107526	9096	12510	12644	179248

Sumber: 1. BPS (1974)  
2. BPS (1983<sup>a</sup>)  
3. BPS (1992)

Namun demikian, Tabel 3.9 menyajikan data perpindahan antar propinsi di Pulau Jawa. Dari tahun ke tahun terlihat bahwa neraca migrasi Jawa Barat mengalami surplus. Walaupun demikian, migrasi netonya cenderung semakin mengecil dan mengarah kepada pencapaian tingkat yang seimbang. Migrasi masuk ada pada Propinsi DKI Jakarta, pada tahun 1971, sekitar 40,07 persen, dan pada tahun 1985 menjadi 38,90 persen. Sedangkan Propinsi Jawa Barat, migrasi masuk ada kecenderungan semakin meningkat dari 1,77 persen (1971) menjadi 3,66 persen (1980) dan meningkat lagi menjadi 4,40 persen (1985). Tetapi disisi lain mereka yang keluar dari Jawa Barat ada tendensi semakin menurun dari 5,52 persen (1971) menjadi 5,42 persen (1980) dan turun lagi menjadi 5,40 persen (1985). Perbedaan antara migrasi masuk dan keluar ini akan mengakibatkan migrasi netto semakin mengecil seperti pada tahun 1971, 1980 dan 1985 masing-masing sekitar 3,75 persen, 1,76 persen dan 1,00 persen.

Tabel 3.9: Persentase Migrasi Masuk, Migrasi Ke luar dan Migrasi Neto Semasa Hidup Menurut Propinsi di Pulau Jawa Tahun 1971,1980 dan 1985

Propinsi	Migrasi Masuk			Migrasi Keluar			Migrasi Netto		
	1971	1980	1985	1971	1980	1985	1971	1980	1985
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
DKI Jakarta	40,07	39,97	38,90	2,91	6,16	7,50	37,16	33,81	31,40
Jawa Barat	1,77	3,66	4,40	5,52	5,42	5,40	3,75	1,76	1,00
Jawa Tengah	4,07	5,65	7,80	10,73	9,21	22,40	6,66	2,65	14,60
DI Yogyakarta	1,19	1,38	1,90	8,22	12,73	12,30	7,03	11,34	10,40
Jawa Timur	1,17	1,60	1,80	2,94	5,47	5,80	1,77	3,87	4,00

Sumber: BPS (1987)

Dari Tabel 3.10, ternyata bahwa DKI Jakarta mempunyai migrasi masuk terbesar, dibandingkan dengan propinsi-propinsi di Pulau Jawa. Hal ini sejalan dengan migrasi berdasarkan tempat lahir. Bahwa DKI Jakarta sebagai tempat tujuan para migran karena tersedianya sarana dan prasarana yang lebih lengkap dibandingkan dengan propinsi lain. Propinsi Jawa Barat, mengalami migrasi netto yang semakin menaik dari 0,2 persen (1980) menjadi 0,8 persen (1985). Hal tersebut karena makin bertambahnya para migran yang masuk ke Propinsi Jawa Barat.

Dari para migran di Jawa Barat, beberapa alasan dari mereka mengapa pindah, ternyata hampir sebageaian migran menjawab alasan lainnya paling dominan sehingga mereka pindah, baik di kota maupun di pedesaan Jawa Barat. Sedangkan alasan pindah karena pekerjaan menempati urutan kedua yang terbesar baik laki-laki maupun perempuan. Sekolah merupakan alasan pindah yang terkecil persentasenya, sedangkan alasan pindah karena transmigrasi tidak ada (lihat Tabel 3.11).

Tabel 3.10 : Persentase Migrasi Masuk, Migrasi Keluar dan Migrasi Netto menurut Tempat Tinggal Lima Tahun yang lalu di Pulau Jawa Tahun 1980 dan 1985

Propinsi	Migrasi Masuk		Migrasi Keluar		Migrasi Netto	
	1980	1985	1980	1985	1980	1985
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
DKI Jakarta	13,6	9,9	7,0	5,8	6,6	4,1
Jawa Barat	2,2	2,1	2,0	1,3	0,2	0,8
Jawa Tengah	0,8	0,7	4,1	2,6	-3,3	-1,9
DI Yogyakarta	7,8	4,2	3,0	3,9	0,8	0,3
Jawa Timur	0,8	0,6	2,2	1,2	-1,4	-0,6

Sumber: BPS (1987)

Tabel 3.11: Persentase Migran Berdasarkan Tempat Tinggal Terakhir Sebelumnya dan Alasan Pindah, Tahun 1985

Alasan Pindah	K o t a		P e d e s a a n	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Transmigrasi	-	-	-	-
Pekerjaan	41,6	14,0	24,6	8,7
Sekolah	8,8	6,7	3,3	3,1
Lainnya	49,6	79,3	71,9	87,9
Tak Terjawab	-	-	0,2	0,3
Jumlah	100,0 (1036429)	100,0 (961422)	100,0 (850027)	100,0 (708498)

Sumber: BPS (1987)

#### 3.4.1. Karakteristik Migran

Berdasarkan ratio jenis kelamin; maka para migran masuk paling banyak di dominasi oleh laki-laki. Hal ini dapat diperlihatkan dari ratio jenis kelamin di masing-masing wilayah pembangunan di Jawa Barat yang melebihi 100 (lihat Tabel 3.12).

Sejalan dengan tingkat pendidikan dari masyarakat Jawa Barat yang mayoritas berpendidikan tamat SD, demikian halnya untuk para migran masuk, baik untuk migran semasa hidup, total dan risen, mayoritaspun mereka berpendidikan SD atau rendah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.12: Rasio Jenis Kelamin Migran Masuk  
menurut Jenis Migran per Wilayah  
Pembangunan, Tahun 1984

Wilayah Pembangunan	Semasa Hidup	Total	Risen
[1]	[2]	[3]	[4]
Banten	113,11	111,56	111,20
Botabek	113,54	111,99	108,03
Sukabumi	129,65	118,56	130,10
Bandung Raya	130,22	135,55	140,07
Priangan Timur	245,46	247,59	381,04
Cirebon	130,60	142,17	162,05
Purwasuka	119,70	118,64	98,35

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat dan Bappeda TK.I  
Jawa Barat (1985)

Tabel 3.13: Persentase Migran Masuk menurut  
Tingkat Pendidikan, Tahun 1984

Wilbang	Tingkat Pendidikan	Semasa Hidup	Total	Risen
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Banten	Rendah	65,15	56,65	54,57
	Menengah	40,35	40,00	42,20
	Tinggi	3,50	3,35	3,23
Botabek	Rendah	56,14	56,63	55,25
	Menengah	40,36	40,02	41,57
	Tinggi	3,50	3,35	3,18
Sukabumi	Rendah	71,16	73,08	70,30
	Menengah	27,83	25,99	28,47
	Tinggi	1,01	0,93	1,23
Bandung Raya	Rendah	66,30	67,07	64,83
	Menengah	30,75	20,45	31,95
	Tinggi	2,95	3,48	3,23
Priangan Timur	Rendah	86,94	87,77	79,78
	Menengah	12,30	11,60	18,54
	Tinggi	0,76	0,63	1,68
Cirebon	Rendah	58,42	63,85	63,23
	Menengah	39,15	33,66	33,98
	Tinggi	2,47	2,49	2,79
Purwasuka	Rendah	81,84	82,26	83,74
	Menengah	17,59	17,16	15,42
	Tinggi	0,57	0,58	0,84

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat dan Bappeda TK.I  
Jawa Barat (1985)

Keterangan: Rendah = Belum/tdk Sekolah, Blm tamat SD, tamat SD

Menengah = SMTP dan SMTA

Tinggi = Akademi/Universitas

## BAB IV PENDIDIKAN

### 4.1. Pendahuluan

Angka melek huruf dan tingkat partisipasi kedua-duanya telah memperlihatkan perbaikan yang cukup nyata. Namun, karena perkembangan ini tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk, sehingga banyaknya anak-anak yang putus sekolah dan buta huruf pun tetap meningkat.

Telah disebutkan di atas, bahwa angka melek huruf merupakan salah satu alat ukur di bidang pendidikan. Tingkat pendidikan yang ditamatkan, kemampuan berbahasa Indonesia, dan tingkat partisipasi sekolah merupakan jenis alat ukur lainnya dalam bidang pendidikan.

### 4.2. Angka Buta Huruf

Menurut Ananta (1985), angka buta huruf merupakan suatu determinan mutu modal manusia yang relevan karena dengan menurunnya buta huruf maka dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut lebih siap menerima ide-ide baru yang diperlukan dalam suatu pembangunan. Angka buta huruf di daerah kota lebih rendah daripada angka di daerah pedesaan. Lebih banyaknya sarana dan prasarana pendidikan di kota merupakan salah satu penyebab ketimpangan kota-pedesaan ini. Lebih besarnya peluang bagi penduduk kota untuk bisa memperoleh pendidikan formal merupakan alasan lainnya. Pada tahun 1990 angka buta huruf di kota tercatat sebanyak 8,05 persen sementara di daerah pedesaan mencapai 17,31 persen. Dari Tabel 4.1 nampak bahwa sekitar 12,70 persen dari seluruh penduduk Jawa Barat masih berstatus buta huruf. Kabupaten dan Kotamadya yang memiliki angka buta huruf terendah berturut-turut yaitu Tasikmalaya (5,38 persen) dan Bandung (2,67); sementara Kabupaten Indramayu (35,26 persen) dan Kotamadya Cirebon (7,47) tercatat sebagai dua daerah yang memiliki angka buta huruf tertinggi (Tabel 4.2).

Dilihat dari komposisi jenis kelamin, persentase buta huruf penduduk laki-laki di Jawa Barat lebih rendah dibandingkan dengan persentase untuk penduduk perempuan. Hal ini konsisten untuk setiap tahun. Pada tahun 1990 persentase buta huruf laki-laki sebesar 6,88 persen sedangkan perempuan 15,87 persen. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel 4.3.

Tabel 4.1: Persentase Angka Buta Huruf menurut Jenis Kelamin dan Daerah, Tahun 1971, 1980 dan 1990

Daerah	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	1971	1980	1990	1971	1980	1990	1971	1980	1990
1. Kota	8,59	6,98	3,88	22,05	20,31	10,33	15,44	14,14	8,05
2. Pedesaan	27,92	17,26	9,87	47,64	36,51	21,35	38,08	32,37	17,31
3. Kota+Pedesaan	25,40	12,14	6,88	44,38	28,54	15,87	35,16	24,98	12,70

Sumber: 1. BPS (1974)  
 2. BPS (1983a)  
 3. BPS (1992)



Tabel 4.2: Persentase Angka Buta Huruf Menurut Kabupten/  
Kotamadya, Tahun 1971, 1980 dan 1990

Kabupaten/ Kotamadya	1971	1980	1990
[1]	[2]	[3]	[4]
01. Kab. Pandeglang	28,62	22,89	12,16
02. Kab. L e b a k	46,62	26,85	16,37
03. Kab. B o g o r	45,76	29,17	11,67
04. Kab. Sukabumi	31,16	19,44	9,55
05. Kab. Cianjur	30,25	17,39	7,82
06. Kab. Bandung	24,93	14,61	6,85
07. Kab. G a r u t	21,44	18,53	8,11
08. Kab. Tasikmalaya	22,49	11,58	5,38
09. Kab. C i a m i s	27,07	17,21	9,07
10. Kab. Kuningan	35,20	22,78	13,90
11. Kab. Cirebon	42,51	35,90	20,80
12. Kab. Majalengka	34,44	27,51	14,56
13. Kab. Sumedang	22,08	16,35	7,84
14. Kab. Indramayu	64,55	52,57	35,26
15. Kab. S u b a n g	51,41	37,53	22,11
16. Kab. Purwakarta	31,55	21,06	10,33
17. Kab. Karawang	50,02	44,76	22,96
18. Kab. B e k a s i	61,32	46,32	18,61
19. Kab. Tangerang	48,10	33,72	13,99
20. Kab. S e r a n g	33,45	28,29	14,26
21. Kod. B o g o r	19,99	12,92	4,05
22. Kod. Sukabumi	12,75	8,94	3,16
23. Kod. Bandung	20,24	7,15	2,67
24. Kod. Cirebon	13,32	13,76	7,47
Jawa Barat	35,16	24,98	12,70

Sumber: 1. BPS (1974)  
2. BPS (1983<sup>a</sup>)  
3. BPS (1992)

Tabel 4.3: Persentase Angka Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin dan Umur, Tahun 1980 dan 1990

Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki+Perempuan	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
10-14	6,74	1,60	7,75	1,62	7,22	1,61
15-19	7,72	1,24	13,59	2,26	10,75	1,75
20-24	9,41	2,01	19,02	5,42	14,75	3,82
25-29	11,16	4,25	22,33	10,86	16,75	7,68
30-34	13,95	6,43	30,48	10,83	22,27	10,61
35-39	16,11	7,64	38,55	18,21	27,39	12,66
40-44	24,19	10,65	52,65	26,19	38,50	18,33
45-49	30,87	11,91	57,75	31,90	44,58	21,83
50+	42,44	26,91	72,98	52,66	57,72	40,01
Tak Terjawab	48,64	53,44	72,76	74,63	58,84	64,26

Sumber: 1. BPS (1983a)  
2. BPS (1992)

Membandingkan angka buta huruf dengan kelompok umur; baik di kota maupun di pedesaan, seperti dalam Tabel 4.4, diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- a. secara horisontal (untuk kelompok umur yang sama dan tahun yang berbeda) angka buta huruf menunjukkan penurunan;
- b. secara vertikal (untuk kelompok umur yang berbeda pada tahun yang sama) angka buta huruf di Jawa Barat memperlihatkan korelasi positif;
- c. secara diagonal (untuk suatu kelompok umur pada tahun 1980 dibandingkan dengan kohor tersebut pada tahun 1990) angka buta huruf cenderung meningkat, kecuali untuk usia 10-14 pada tahun 1980. Diduga faktor migrasi berperan dalam masalah ini. Fenomena demikian cukup menarik untuk diteliti lebih jauh.

Tabel 4.4: Persentase Angka Buta Huruf Menurut Daerah dan Umur, Tahun 1980 dan 1990

Umur	Kota		Pedesaan		Kota+Pedesaan	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
10-14	3,19	0,84	8,33	2,00	7,22	1,61
15-19	3,55	0,76	13,31	2,39	10,75	1,75
20-24	4,88	1,63	18,11	5,36	14,75	3,82
25-29	5,39	3,58	19,95	10,12	16,75	7,68
30-34	7,44	5,09	25,96	13,84	22,27	10,61
35-39	11,84	6,26	31,12	16,04	27,39	12,66
40-44	20,22	9,48	42,92	22,52	38,50	18,33
45-49	27,55	12,61	48,51	26,04	44,58	21,83
50+	40,31	28,28	61,83	44,90	57,72	40,01
Tak Terjawab	8,06	45,51	59,01	69,18	58,84	64,26

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>)  
2. BPS (1992)

#### 4.3. Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

Menurut sensus, seseorang dikatakan "tamat" pendidikannya jika orang tersebut meninggalkan sekolah setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah sampai akhir dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah baik dari sekolah negeri maupun swasta. Seperti terlihat dalam Tabel 4.5, peningkatan persentase penduduk yang menamatkan suatu jenjang pendidikan formal terjadi pada hampir semua tingkat pendidikan, baik di kota maupun di pedesaan, kecuali untuk mereka yang tergolong tidak/belum tamat SD. Kenyataan ini tentunya merupakan cerminan dari semakin meningkatnya pendapatan masyarakat, kesadaran orangtua, dan pembangunan sarana dan prasarana di bidang pendidikan. Namun demikian, 'diskriminasi' pendidikan menurut jenis kelamin masih tetap terlihat dari lebih rendahnya persentase yang dimiliki penduduk perempuan (Tabel 4.6).

#### 4.4 Kemampuan Berbahasa Indonesia

Oleh karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan sekaligus merupakan alat komunikasi utama, maka kemampuan berbahasa Indonesia memberikan dukungan yang kuat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Terdapat sekitar 6,38 persen bagi laki-laki dan 9,78 persen bagi perempuan pada tahun 1990 yang tidak bisa berbahasa Indonesia.

Tabel 4.5: Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	K o t a		Pedesaan		Kota+Pedesaan	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1. Tidak/Belum Pernah Sekolah	-	7,43	-	17,02	-	13,64
2. Tidak/Belum Tamat SD	40,78	24,39	63,87	37,21	57,97	32,69
3. Sekolah Dasar	31,55	31,25	29,66	36,30	30,14	34,52
4. SMTP Umum	12,11	14,75	2,94	4,88	5,28	8,37
5. SMTP Kejuruan	2,36	1,18	0,78	0,44	1,19	0,71
6. SMTA Umum	6,74	11,35	0,98	1,90	2,45	5,24
7. SMTA Kejuruan	5,02	6,42	1,61	1,87	2,48	3,48
8. Diploma I/II	-	0,53	-	0,09	-	0,25
9. Akademi	0,77	1,15	0,10	0,16	0,27	0,48
10. Universitas	0,67	1,54	0,07	0,13	0,22	0,63
% Jumlah	100,00 (3646840)	100,00 (9304482)	100,00 (10632989)	100,00 (17077960)	100,00 (14279829)	100,00 (26382442)

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>)

2. BPS (1992)

Tabel 4.6: Penduduk Yang Berumur 10 Tahun Ke atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Tahun 1990

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	Lk (%)	Pr (%)	Lk+Pr (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Tidak/Belum Pernah Sekolah	1166382 (8,88)	2432048 (18,35)	3598430 (13,64)
2. Tidak/belum Tamat SD	4261473 (32,46)	4363241 (32,92)	8624714 (32,69)
3. Sekolah Dasar	4699327 (35,79)	4408243 (33,26)	9107570 (34,52)
4. SMTP Umum	1227633 (9,35)	981479 (7,41)	2209112 (8,37)
5. SMTP Kejuruan	110976 (0,85)	75231 (0,57)	186207 (0,71)
6. SMTA Umum	857181 (6,53)	524439 (3,96)	1381620 (5,24)
7. SMTA Kejuruan	567702 (4,32)	349955 (2,64)	917657 (3,48)
8. Diploma I/II	37726 (0,29)	26973 (0,20)	64699 (0,25)
9. Akademi	83241 (0,63)	43190 (0,33)	126431 (0,48)
10. Universitas	116892 (0,89)	48784 (0,37)	165676 (0,63)
11. Tak Terjawab	198 (0,00)	128 (0,00)	326 (0,00)
Jumlah	13128731 (100,00)	13253711 (100,00)	26382442 (100,00)

Sumber: BPS (1992)

Seperti halnya peta angka buta huruf, Indramayu merupakan kabupaten yang memiliki persentase terbesar dari penduduk yang tidak bisa bahasa Indonesia; sedangkan untuk tingkat kotamadya dipegang oleh Kotamadya Cirebon. Selanjutnya, sudah merupakan situasi yang umum bahwa penduduk yang tidak bisa bahasa Indonesia lebih banyak di daerah pedesaan.

#### 4.5 Partisipasi Sekolah

Banyaknya penduduk yang masih sekolah sering diidentikkan dengan besarnya penduduk yang tidak berada di pasar kerja. Dengan kata lain, hal ini bisa membendung besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja. Angka Masih Sekolah (School Enrollment Rate), rasio antara jumlah murid pada usia tertentu dengan jumlah penduduk pada usia yang sama, dipakai sebagai alat untuk mengukur tingkat kesertaan penduduk dalam pendidikan. Angka masih sekolah penduduk laki-laki pada tahun 1990 adalah sebagai berikut: untuk tingkat SD mencapai 89,58 persen, SMTP sebesar 49,82 persen, SMTA sebesar 32,40 persen, universitas sebesar 10,86 persen. Pola demikian berlaku pula bagi penduduk perempuan, hanya nilai persentasenya yang lebih kecil. Berdasarkan kabupaten/kotamadya, pada tahun 1990 Angka Masih Sekolah untuk SD di Jawa Barat berkisar antara 42,62 (Kotamadya Bandung) dan 73,49 (Kabupaten Cianjur); antara 14,15 (Kabupaten Cianjur) dan 21,01 (Kotamadya Cirebon) untuk SMTP; antara 5,03 (Kabupaten Sukabumi) dan 17,17 (Kotamadya Sukabumi) untuk tingkat SMTA; dan antara 1,49 (Kabupaten Sukabumi) dan 15,65 (Kotamadya Bandung) untuk pendidikan tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari satu jenjang pendidikan ke jenjang berikutnya terjadi penyusutan kesertaan. Dengan kata lain, senantiasa terdapat sejumlah penduduk yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 4.7: Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Yang Buta Huruf Menurut Propinsi dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990

Propinsi/ Pulau	Kota		Pedesaan		Kota+Pedesaan	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990
[1]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Jawa	15,6	8,4	35,6	21,9	30,5	16,9
a. DKI Jakarta	10,9	4,5	25,1	-	11,7	4,5
b. Jawa Barat	12,1	6,1	28,5	16,0	25,0	12,7
c. Jawa Tengah	20,3	11,9	36,7	21,6	33,6	18,9
d. Jawa Timur	15,4	13,5	34,8	26,1	30,4	20,4
e. DI Jogjakarta	15,4	11,0	41,0	27,2	36,8	22,7
2. Sumatra	9,1	4,2	22,4	11,1	19,7	9,3
3. Kalimantan	14,2	6,4	34,1	15,0	29,6	12,5
4. Sulawesi	13,7	7,0	32,0	19,7	28,9	16,8
5. Kepulauan lain	16,7	9,2	40,3	29,1	37,1	25,3
Indonesia	14,5	7,6	33,2	19,7	28,8	15,8

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>)  
2. BPS (1992)

Tabel 4.8: Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun  
Ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang  
Ditamatkan dan Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990

Kabupaten/ Kotamadya	Tdk/ blm Sekolah	Tdk/ blm tmt SD	Tmt SD	SMTP Umum	SMTP Keju- ruan	SMTA Umum	SMTA Keju- ruan	D I/II	D III	Uni- ver- si tas	Tak Ter- ja- wab	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
01. Kab. Pandeglang	13,19	41,10	33,99	5,16	0,90	2,12	3,06	0,13	0,16	0,19	-	100,00
02. Kab. L e b a k	18,69	36,08	32,49	4,85	0,44	1,69	2,48	0,09	0,08	0,11	-	100,00
03. Kab. B o g o r	13,83	35,59	28,34	9,56	0,76	6,26	4,09	0,29	0,59	0,69	0,00	100,00
04. Kab. Sukabumi	10,65	42,66	37,02	4,65	0,59	2,00	2,16	0,08	0,10	0,09	-	100,00
05. Kab. Cianjur	8,43	34,53	47,32	4,88	0,44	2,02	1,92	0,11	0,16	0,19	-	100,00
06. Kab. Bandung	6,58	30,83	40,69	10,44	0,68	5,96	3,54	0,26	0,44	0,58	0,00	100,00
07. Kab. G a r u t	7,85	39,41	38,54	7,22	0,59	3,09	2,68	0,17	0,00	0,23	0,00	100,00
08. Kab. Tasikmalaya	6,04	30,58	49,56	6,68	0,62	3,13	2,67	0,17	0,21	0,34	-	100,00
09. Kab. C i a m i s	9,05	25,92	51,83	6,49	0,83	2,50	2,78	0,15	0,25	0,20	-	100,00
10. Kab. Kuningan	14,36	30,13	43,16	5,91	0,63	2,43	2,83	0,13	0,23	0,19	-	100,00
11. Kab. Cirebon	20,16	39,05	28,11	6,27	0,46	3,07	2,29	0,10	0,26	0,23	-	100,00
12. kab. Majalengka	14,75	29,14	44,97	5,49	0,47	2,07	2,46	0,15	0,22	0,28	-	100,00
13. Kab. Sumedang	7,14	25,03	51,29	7,52	0,65	3,85	3,65	0,25	0,32	0,30	0,00	100,00
14. Kab. Indramayu	36,24	35,39	19,73	4,29	0,36	2,03	1,60	0,08	0,15	0,14	-	100,00
15. Kab. S u b a n g	24,25	35,89	29,35	5,28	0,49	2,32	1,94	0,14	0,12	0,22	0,00	100,00
16. Kab. Purwakarta	12,72	37,53	33,90	7,54	1,22	3,43	3,19	0,13	0,20	0,14	-	100,00
17. Kab. Karawang	24,00	40,46	24,31	5,24	0,44	2,67	2,05	0,13	0,27	0,43	0,00	100,00
18. Kab. B e k a s i	20,61	28,34	23,99	10,51	0,77	8,33	4,77	0,52	1,04	1,12	-	100,00
19. Kab. Tangerang	16,21	30,01	25,40	12,27	0,67	8,24	4,85	0,38	0,84	1,13	0,00	100,00
20. Kab. S e r a n g	16,65	36,05	30,19	7,99	0,93	3,45	4,05	0,15	0,26	0,29	-	100,00
21. Kod. B o g o r	4,97	19,69	27,53	16,73	159	18,20	6,97	0,54	1,24	2,64	-	100,00
22. Kod. Sukabumi	3,57	18,64	34,35	16,30	2,27	12,76	9,31	0,44	1,06	1,30	-	100,00
23. Kod. Bandung	2,62	17,02	31,35	17,42	1,28	17,66	7,26	0,68	1,82	2,89	0,00	100,00
24. Kod. Cirebon	8,12	23,03	24,73	15,57	1,84	14,27	6,97	0,73	1,19	1,55	-	100,00
Jawa Barat	13,64	32,69	34,52	8,37	0,71	5,24	3,48	0,25	0,48	0,63	0,00	100,00

Sumber: BPS (1992)



**Tabel 4.9: Persentase Penduduk Berumur 10 tahun Keatas  
Menurut Propinsi/Pulau dan Pendidikan  
Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 1980 dan 1990**

Pulau/ Propinsi		Tdk/bim tamat		Tmt SD		SMTP		SMTA/ Akademi/ Universitas		Jumlah	
		1980	1990	1980	1990	1980	1990	1980	1990	1980	1990
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	
1.	Jawa	56,1	36,3	28,9	38,1	8,0	12,0	6,9	13,6	100,00	100,00
	a. DKI Jakarta	34,1	20,4	29,5	30,5	16,3	18,7	20,2	30,4	100,00	100,00
	b. Jawa Barat	58,0	37,4	30,1	39,5	6,5	10,7	5,4	12,3	100,00	100,00
	c. Jawa Tengah	61,2	40,1	26,6	39,2	7,0	10,4	5,2	10,2	100,00	100,00
	d. DI Jogjakarta	42,6	26,6	31,2	32,0	12,9	16,7	13,3	24,7	100,00	100,00
	e. Jawa Timur	57,5	37,4	29,5	38,3	7,4	12,4	5,6	11,9	100,00	100,00
2.	Sumatra	57,6	39,3	27,5	32,2	9,0	14,6	6,0	13,8	100,00	100,00
3.	Kalimantan	60,9	42,0	24,7	31,0	8,4	13,7	5,9	13,3	100,00	100,00
5.	Sulawesi	55,3	37,3	28,4	32,9	9,0	14,4	7,3	15,4	100,00	100,00
6.	Kepulauan lain	56,2	39,9	30,0	34,4	7,7	12,4	6,2	13,4	100,00	100,00
Indonesia		56,6	37,5	28,5	35,9	8,2	12,8	6,9	13,7	100,00	100,00

Sumber: BPS (1992)

Tabel 4.10: Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun Ke atas Menurut Bahasa yang Dipakai Sehari-hari dan Jenis Kelamin per Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1990

Daerah : Kota

Kabupaten/ Kotamadya	Bahasa Indonesia		Bukan Bahasa Indonesia				Jumlah
	Lk	Pr	Bisa B.Indonesia Lk	Pr	Tdk Bisa B.Indonesia Lk	Pr	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
01. Kab. Pandeglang	2,38	1,98	42,62	41,42	4,99	6,62	100,00
02. Kab. L e b a k	3,93	3,58	42,86	39,73	3,93	5,96	100,00
03. Kab. B o g o r	26,80	26,34	21,53	20,33	2,07	2,92	100,00
04. Kab. Sukabumi	1,62	1,29	43,56	41,21	5,02	7,30	100,00
05. Kab. Cianjur	1,56	1,30	43,78	41,95	4,59	6,82	100,00
06. Kab. Bandung	5,87	5,82	39,95	38,95	4,00	5,41	100,00
07. Kab. G a r u t	0,35	0,30	43,61	42,95	5,21	7,57	100,00
08. Kab. Tasikmalaya	1,25	0,92	44,54	44,72	3,55	5,02	100,00
09. Kab. C i a m i s	0,52	0,60	45,03	44,81	3,39	5,65	100,00
10. Kab. Kuningan	0,93	0,54	44,22	41,45	4,61	8,24	100,00
11. Kab. Cirebon	2,57	2,80	40,57	36,69	6,09	11,29	100,00
12. Kab. Majalengka	1,31	1,16	43,57	42,53	3,99	7,44	100,00
13. Kab. Sumedang	1,12	0,65	46,70	44,76	3,04	3,73	100,00
14. Kab. Indramayu	2,29	2,30	38,65	33,56	8,32	14,88	100,00
15. Kab. Subang	1,85	1,68	43,09	40,52	4,74	8,12	100,00
16. Kab. Purwakarta	4,98	3,88	42,73	41,46	2,76	4,19	100,00
17. Kab. Karawang	4,91	4,61	40,00	36,24	5,42	8,81	100,00
18. Kab. Bekasi	42,14	41,99	7,23	7,20	0,55	0,89	100,00
19. Kab. Tangerang	38,46	37,32	11,17	10,47	1,05	1,53	100,00
20. Kab. Serang	11,82	10,36	37,20	34,78	2,03	3,82	100,00
21. Kod. B o g o r	18,68	17,96	29,99	29,94	1,36	2,06	100,00
22. Kod. Sukabumi	9,24	7,46	38,75	40,12	1,77	2,67	100,00
23. Kod. Bandung	9,92	9,67	38,42	37,48	1,86	2,64	100,00
24. Kod. Cirebon	18,47	20,43	28,61	27,85	1,70	2,93	100,00
Jawa Barāt	16,83	16,48	30,47	29,23	25,75	4,23	100,00

Sumber: BPS (1992)

Tabel 4.11: Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun Ke atas Menurut Bahasa yang Dipakai Sehari-hari dan Jenis Kelamin per Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1990

Daerah : Pedesaan

Kabupaten/ Kotamadya	Bahasa Indonesia		Bukan Bahasa Indonesia				Jumlah
	-----		Bisa B.Indonesia		Tdk Bisa B.Indonesia		
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
01. Kab. Pandeglang	0,48	0,37	39,82	35,51	10,16	13,65	100,00
02. Kab. L e b a k	0,23	0,18	38,76	32,51	11,94	16,39	100,00
03. Kab. B o g o r	8,20	7,48	34,90	30,61	7,92	10,89	100,00
04. Kab. Sukabumi	0,33	0,23	40,99	36,46	9,09	12,91	100,00
05. Kab. Cianjur	0,35	0,31	41,27	37,85	8,70	11,51	100,00
06. Kab. Bandung	0,48	0,22	41,20	38,76	8,02	11,31	100,00
07. Kab. G a r u t	0,10	0,08	41,14	38,78	8,30	11,61	100,00
08. Kab. Tasikmalaya	0,07	0,07	43,15	41,93	5,94	8,84	100,00
09. Kab. C i a m i s	0,06	0,06	42,69	40,82	6,19	10,19	100,00
10. Kab. Kuningan	0,16	0,15	42,59	39,14	6,85	11,12	100,00
11. Kab. Cirebon	0,62	0,64	38,98	32,39	10,07	17,30	100,00
12. Kab. Majalengka	0,31	0,13	40,85	37,01	8,05	13,65	100,00
13. Kab. Sumedang	0,11	0,10	42,93	40,81	6,47	9,59	100,00
14. Kab. Indramayu	0,27	0,16	36,41	26,71	13,02	23,43	100,00
15. Kab. S u b a n g	0,40	0,34	39,53	33,68	9,44	16,61	100,00
16. Kab. Purwakarta	0,20	0,17	41,41	36,37	9,04	12,80	100,00
17. Kab. Karawang	4,09	4,15	35,58	29,31	10,29	16,58	100,00
18. Kab. Bekasi	22,35	21,83	23,53	21,51	4,30	6,49	100,00
19. Kab. Tangerang	14,37	13,47	30,78	27,49	5,30	8,59	100,00
20. Kab. Serang	1,41	1,13	40,00	33,88	8,92	14,65	100,00
21. Kod. B o g o r	-	-	-	-	-	-	-
22. Kod. Sukabumi	-	-	-	-	-	-	-
23. Kod. Bandung	2,12	4,36	41,50	41,43	4,05	6,54	100,00
24. Kod. Cirebon	3,34	3,73	34,12	25,92	12,64	20,26	100,00
Jawa Barat	2,75	2,57	38,85	34,74	8,33	12,75	100,00

Sumber: BPS (1992)

Tabel 4.12: Persentase Penduduk Berumur Lima Tahun Ke atas Menurut Bahasa yang Dipakai Sehari-hari dan Jenis Kelamin per Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1990

Daerah Kota+Pedesaan

Kabupaten/ Kotamadya	Bahasa Indonesia		Bukan Bahasa Indonesia				Jumlah
	-----		Bisa B.Indonesia		Tdk Bisa B.Indonesia		
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
01. Kab. Pandeglang	0,61	0,47	40,01	35,91	9,81	13,18	100,00
02. Kab. L e b a k	0,49	0,42	39,05	33,02	11,37	15,65	100,00
03. Kab. B o g o r	17,93	17,35	27,91	25,23	4,86	6,72	100,00
04. Kab. Sukabumi	0,56	0,42	41,46	37,33	8,34	11,88	100,00
05. Kab. Cianjur	0,53	0,46	41,65	38,46	8,09	10,81	100,00
06. Kab. Bandung	2,67	2,50	40,69	38,84	6,38	8,91	100,00
07. Kab. G a r u t	0,14	0,11	41,52	39,43	7,81	10,98	100,00
08. Kab. Tasikmalaya	0,31	0,24	43,44	42,50	5,45	8,06	100,00
09. Kab. C i a m i s	0,10	0,11	42,91	41,20	5,92	9,76	100,00
10. Kab. Kuningan	0,29	0,21	42,86	39,53	6,47	10,63	100,00
11. Kab. Cirebon	1,35	1,45	39,58	34,00	8,57	15,05	100,00
12. Kab. Majalengka	0,48	0,31	41,33	37,98	7,34	12,57	100,00
13. Kab. Sumedang	0,24	0,18	43,44	41,35	6,00	8,79	100,00
14. Kab. Indramayu	0,58	0,49	36,75	27,75	12,31	22,13	100,00
15. Kab. S u b a n g	0,61	0,53	40,03	34,63	8,78	15,42	100,00
16. Kab. Purwakarta	1,27	1,00	41,71	37,51	7,64	10,87	100,00
17. Kab. Karawang	4,28	4,25	36,59	30,90	9,17	14,81	100,00
18. Kab. B e k a s i	33,24	32,93	14,56	13,63	2,23	3,41	100,00
19. Kab. Tangerang	27,84	26,79	19,82	17,98	2,93	4,64	100,00
20. Kab. S e r a n g	3,35	2,85	39,48	34,05	7,64	12,64	100,00
21. Kod. B o g o r	18,68	17,96	29,99	29,94	1,36	2,06	100,00
22. Kod. Sukabumi	9,24	7,46	38,75	40,12	1,77	2,67	100,00
23. Kod. Bandung	9,80	9,59	38,47	37,54	1,90	2,70	100,00
24. Kod. Cirebon	17,94	19,85	28,80	27,78	2,09	3,54	100,00
Jawa Barat	7,66	7,42	35,93	32,82	6,38	9,78	100,00

Sumber: BPS (1992)

Tabel 4.13: Persentase Angka Masih Sekolah Pada Tingkat SD, SMTP, SMTA dan Universitas Menurut Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 1980 dan 1990

Daerah	Tahun	SD		SMTP		SMTA		Universitas	
		L	P	L	P	L	P	L	P
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Kota	1980	90,99	90,53	80,15	69,47	56,15	40,99	22,49	9,97
	1990	93,31	93,56	74,88	65,43	52,05	41,45	18,71	11,88
Pedesaan	1980	80,47	80,33	51,84	43,54	22,49	10,44	4,95	1,59
	1990	87,77	88,12	45,26	40,70	20,51	14,90	4,92	1,98
Kota+	1980	82,48	82,32	49,99	58,16	31,57	18,38	10,01	3,60
Pedesaan	1990	89,58	89,91	49,82	55,26	32,40	25,76	10,86	5,94

Sumber: 1. BPS (1983\*) (diolah)  
2. BPS (1992)

Tabel 4.14: Penduduk Berumur Lima Tahun Ke atas Yang Masih Sekolah Menurut daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 1990

Daerah/ Jenis Kelamin	Penduduk Berumur Lima Tahun Keatas	Penduduk Masih Sekolah	%
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Kota</b>			
Laki-laki	5426024	1676110	30,89
Perempuan	5414301	1517341	28,02
Laki-laki+Perempuan	10840325	3193451	29,46
<b>Pedesaan</b>			
Laki-laki	10122213	2369248	23,41
Perempuan	10148572	2152709	21,21
Laki-laki+Perempuan	20270785	4521957	22,31
<b>Kota+Pedesaan</b>			
Laki-laki	15548237	4045358	26,02
Perempuan	15562873	3670050	23,53
Laki-laki+Perempuan	31111110	7715408	24,80

Sumber: BPS (1992)

Tabel 4.15: Persentase Penduduk yang Berumur Lima Tahun Ke atas yang Masih Sekolah Menurut Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1990

Kabupaten/ Kotamadya	Golongan Umur						Tak	
	5-6	7-12	13-15	16-18	19-24	25+	Tjwb	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
01. Kab. Pandeglang	4,18	72,36	15,65	5,54	1,59	0,68	-	100,00
02. Kab. L e b a k	3,92	72,23	16,21	5,55	1,57	0,52	-	100,00
03. Kab. B o g o r	5,20	63,74	17,51	8,85	3,99	0,71	-	100,00
04. Kab. Sukabumi	4,66	73,49	14,75	5,03	1,49	0,58	-	100,00
05. Kab. Cianjur	4,14	73,39	14,15	6,12	1,52	0,68	-	100,00
06. Kab. Bandung	5,66	64,39	16,62	8,55	3,84	0,94	-	100,00
07. Kab. G a r u t	4,30	69,17	16,35	7,39	2,13	0,66	-	100,00
08. Kab. Tasikmalaya	3,47	67,46	16,54	8,10	3,78	0,65	-	100,00
09. Kab. Ciamis	4,62	68,19	16,74	7,05	2,86	0,54	-	100,00
10. Kab. Kuningan	3,93	68,03	17,07	8,40	1,99	0,58	-	100,00
11. Kab. Cirebon	4,40	67,62	16,96	7,75	2,59	0,68	-	100,00
12. Kab. Majalengka	4,49	69,48	16,20	7,18	2,04	0,61	-	100,00
13. Kab. Sumedang	5,82	64,04	15,73	8,78	4,84	0,79	-	100,00
14. Kab. Indramayu	6,08	71,96	14,31	5,40	1,66	0,59	-	100,00
15. Kab. S u b a n g	4,79	70,14	15,09	7,28	2,01	0,69	-	100,00
16. Kab. Purwakarta	4,35	67,70	16,79	7,99	2,56	0,61	-	100,00
17. Kab. Karawang	4,14	70,25	15,62	6,78	2,43	0,78	-	100,00
18. Kab. B e k a s i	6,32	63,67	16,53	8,85	3,91	0,72	-	100,00
19. Kab. Tangerang	5,37	60,89	18,31	9,61	4,75	1,07	-	100,00
20. kab. S e r a n g	3,98	67,38	17,75	7,63	2,56	0,70	-	100,00
21. Kod. B o g o r	3,84	44,60	18,83	14,75	15,59	2,39	-	100,00
22. Kod. Sukabumi	6,19	50,45	19,74	17,17	5,82	0,63	-	100,00
23. Kod. Bandung	5,32	42,62	17,96	14,92	15,65	3,53	-	100,00
24. Kod. Cirebon	6,05	51,13	21,01	14,90	5,60	1,31	-	100,00
Jawa Barat	4,90	64,83	16,69	8,46	4,15	0,97	-	100,00

Sumber: BPS (1992)

Tabel 4.16: Rasio Murid Terhadap Guru Menurut Tingkat Sekolah Tahun 1981 - 1990

Tahun	SD	SMTp	SMTA
[1]	[2]	[3]	[4]
1981	43,32	17,00	13,94
1982	33,94	18,68	13,94
1988	27,00	18,00	13,00
1990	27,00	14,00	12,00

Sumber: 1. BPS (1983<sup>b</sup>)  
2. BPS (1991<sup>a</sup>)



## BAB V KETENAGAKERJAAN

### 5.1. Pendahuluan

Pengumpulan data ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik sejak tahun 1961 menggunakan konsep **Labor Force Standard** (Depnaker, Departemen Transmigrasi dan BPS, 1982). Namun suatu fenomena tidak selalu bisa didekati dengan konsep ini. Oleh karena itu pengembangan konsep telah dilakukan. Analisa ketenagakerjaan secara komprehensif sangat membutuhkan data yang dapat dipercaya dan cukup terperinci. Biro Pusat Statistik menyediakan data ketenagakerjaan, baik dari sensus maupun survei-survei khusus.

Penduduk usia kerja di Indonesia mencakup penduduk berumur 10 tahun ke atas. Oleh karena angkatan kerja merupakan subset dari penduduk usia kerja, maka angkatan kerjapun dipengaruhi oleh komposisi umur dan jenis kelamin. Jadi, apabila terdapat kenaikan jumlah penduduk menurut umur, maka penduduk usia kerja dan angkatan kerjapun akan mengalami kenaikan.

Demikian pula laju pertumbuhannya. Laju pertumbuhan angkatan kerja dalam periode 1971-1980 sebesar 2,88 persen per tahun, tetapi pada periode 1980-1990 laju pertumbuhan tersebut menanjak hampir dua kali lipatnya, yaitu menjadi 4,22 persen per tahun. Antara kota dan pedesaan, banyaknya penduduk angkatan kerja di pedesaan jauh lebih banyak daripada di kota. Ini sejalan dengan jumlah penduduknya. Meskipun demikian, laju pertumbuhan angkatan kerja di kota lebih cepat daripada laju pertumbuhan di desa. Walaupun fasilitas pendidikan, yang dapat membendung angkatan kerja, di daerah kota lebih tersedia, namun cepatnya laju pertumbuhan angkatan kerja di kota lebih disebabkan oleh membanjirnya para pencari kerja dari desa. Sejalan dengan sosial budaya Jawa Barat, bahkan Indonesia, angkatan kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan angkatan kerja perempuan. Pembahasan selengkapnya akan dibahas di dalam sub bab berikutnya.

## 5.2. Komposisi Tenaga Kerja

Penduduk usia kerja menurut jenis kegiatannya dapat dibedakan ke dalam angkatan kerja yang terdiri dari penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan; dan bukan angkatan kerja yakni penduduk yang masih sekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya. Berdasarkan Tabel 5.2 diketahui bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), yang dihitung dengan membandingkan penduduk angkatan kerja dan penduduk usia kerja, telah mengalami kenaikan. TPAK tahun 1980 adalah 45,41 persen dan pada tahun 1990 menjadi 49,72 persen. Kenaikan semacam ini terjadi pula baik untuk penduduk yang bekerja maupun yang mencari kerja. Selengkapnya bisa dilihat dalam Tabel 5.2.

Membandingkan antara angkatan kerja di desa dan di kota, sudah disebutkan di atas bahwa volume angkatan kerja di desa lebih besar daripada volume di kota. Di samping itu struktur perekonomian antara daerah pedesaan yang berbeda dengan daerah kota di mana pada daerah pedesaan kegiatan ekonomi lebih bersifat informal dan di kota lebih ke arah formal, sehingga kegiatan memasuki pasar kerja akan lebih mudah terjadi pada daerah pedesaan, tanpa harus memenuhi suatu kualitas manusia tinggi.

Di atas telah disinggung, bahwa volume angkatan kerja pria lebih besar dibanding dengan volume angkatan kerja wanita. Rendahnya persentase angkatan kerja perempuan ini dapat dimaklumi karena masih banyaknya penduduk perempuan yang mempunyai kegiatan mengurus rumahtangga. Jumlah wanita di kota yang mengurus rumahtangga terdapat 47,61 persen pada tahun 1980 dan sebesar 44,14 persen pada tahun 1990. Sementara itu, jumlah wanita di daerah pedesaan yang mengurus rumahtangga bergerak dari 49,44 persen pada tahun 1980 ke 46,73 persen pada tahun 1990 (Tabel 5.2).

Menurut kelompok umur, persentase angkatan kerja terbesar, baik di daerah kota maupun di pedesaan, dicapai pada usia 25-29 tahun bagi laki-laki yaitu dengan memberikan kontribusi lebih dari 15 persen (pada tahun 1990). Sementara itu, perempuan di

kota menyumbang persentase angkatan kerja tertinggi pada usia 20-24 tahun sebesar hampir 15 persen, dan pada usia 25-29 tahun di daerah pedesaan dengan sumbangan sebesar 12,61 persen (Tabel 5.3).

Tabel 5.1: Banyaknya Penduduk, Angkatan Kerja dan Laju Pertumbuhan menurut Jenis Kelamin dan Daerah, Tahun 1971, 1980 dan 1990

Jenis Keterangan	Tahun	Kota			Pedesaan			Kota+Pedesaan		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1. Penduduk	1971	1331574	1351549	2683123	9302391	9636436	18937827	10633965	10986985	21620950
	1980	2893998	2876870	5770868	10770571	10908401	21678972	13664569	13785271	27449840
	1990	6132675	6077040	12209715	11603098	11568869	23171967	17735773	17645909	35381682
2. Laju Per tumbuhan Penduduk (%)	1971/ 1980	8,89	8,65	8,77	1,62	1,37	1,49	2,79	2,52	2,65
	1980/ 1990	7,80	7,76	7,78	0,75	0,59	0,67	2,64	2,50	2,57
	1971/ 1980/ 1990									
3. Angkatan Kerja	1971	536633	182956	719589	4159698	1810036	5969734	4696331	1992992	6689323
	1980	1194153	403480	1597633	5090095	1990437	7080532	6284248	2393917	8678165
	1990	3020486	1276853	4297339	6180815	2640290	8821105	9201301	3917143	13118444
4. Laju Per tumbuhan Angkatan Kerja(%)	1971/ 1980	9,18	9,07	9,15	2,24	1,05	1,89	3,25	2,03	2,89
	1980/ 1990	9,72	12,21	10,40	1,96	2,87	2,22	3,89	5,05	4,22
	1971/ 1980/ 1990									

Sumber: 1. BPS (1974)

2. BPS (1983<sup>a</sup>)

3. BPS (1992)

Keterangan : L = Laki-laki

P = Perempuan

Tabel 5.2: Persentase Penduduk Usia Kerja menurut  
Jenis Kegiatan, Jenis Kelamin dan Daerah  
Tahun 1980 dan 1990

Jenis Kegiatan	Tahun	Kota			Pedesaan			Kota+Pedesaan		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
I. Angkatan Kerja	1980	57,81	19,36	38,50	69,14	26,19	47,32	66,66	24,72	45,41
	1990	65,02	27,41	46,19	72,86	30,72	51,65	70,08	29,55	49,72
1.1. Bekerja	1980	56,22	18,78	37,42	68,14	25,42	46,44	65,53	23,99	44,48
	1990	61,45	25,48	43,44	70,88	29,31	49,96	67,54	27,96	47,66
1.2. Menacari Pekerjaan	1980	1,59	0,58	1,08	1,00	0,77	0,88	1,13	0,73	0,93
	1990	3,57	1,93	2,75	1,98	1,41	1,69	2,54	1,59	2,06
II. Bukan Angkatan Kerja	1980	42,18	80,64	61,50	30,86	73,81	52,68	33,34	75,28	54,59
	1990	34,98	72,59	53,81	27,14	69,28	48,35	29,92	70,45	50,28
2.1. Sekolah	1980	27,46	22,08	24,76	16,87	12,91	14,86	19,19	14,88	17,01
	1990	23,61	20,46	22,03	15,70	13,35	14,52	18,50	15,85	17,17
2.2. Mengurus Rumah tangga	1980	0,81	47,61	24,32	1,09	49,44	25,65	1,03	49,05	25,36
	1990	0,87	44,14	22,54	0,94	46,73	23,98	0,92	45,82	23,47
2.3. Lainnya	1980	13,91	10,94	12,42	12,91	11,46	12,18	13,13	11,35	2,23
	1990	10,49	7,99	9,24	10,50	9,20	9,85	10,50	8,78	9,63
Jumlah (I + II)	1980	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1990	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: 1. BPS (1983\*)

2. BPS (1992)

Keterangan: L = Laki-laki

P = Perempuan

Penghitungan TPAK kasar ini sangat dipengaruhi oleh penduduk yang berumur 10 tahun ke bawah oleh karena itu pengaruh tersebut dapat dihilangkan dengan tidak mengikut sertakan kepada penduduk yang kurang umurnya 10 tahun, sehingga akan mendapatkan tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai berikut. Pada daerah kota dan pedesaan dari 45,41 persen (1980) menjadi 49,72 persen

Tabel 5.3: Persentase Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990

Kelompok Umur	Kota				Pedesaan				Kota+Pedesaan			
	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki		Perempuan	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990	1980	1990	1980	1990	1980	1990
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]
10 - 14	0,98	1,22	3,07	3,41	2,98	2,77	4,27	4,02	2,60	2,26	2,06	3,82
15 - 19	7,61	8,02	16,20	18,37	9,54	10,52	12,33	12,36	9,17	9,70	12,99	14,32
20 - 24	16,44	15,80	17,97	20,64	12,48	12,06	12,78	11,96	13,24	13,29	13,66	14,79
25 - 29	17,94	16,78	13,19	14,99	15,07	14,19	11,91	12,61	15,61	15,04	12,13	13,38
30 - 34	12,09	15,47	9,06	11,20	11,26	12,68	9,91	11,33	11,42	13,59	9,76	11,28
35 - 39	12,53	13,23	9,47	9,07	12,10	12,00	11,40	10,64	12,18	12,40	11,07	10,37
40 - 44	10,59	8,36	9,53	6,16	10,09	8,42	10,63	8,69	10,18	8,40	10,44	7,86
45 - 49	7,11	7,48	7,46	5,31	7,93	7,75	8,87	8,57	7,18	7,66	8,63	7,51
50 - 54	6,34	5,70	6,39	4,44	7,19	6,65	7,66	7,30	7,02	6,34	7,45	6,37
55 - 59	3,30	3,05	3,20	2,62	3,80	4,19	3,94	4,79	3,72	3,81	3,82	4,09
60 - 64	2,58	2,44	2,46	2,02	3,90	4,20	3,52	4,21	3,65	3,62	3,34	3,50
65 +	2,30	2,43	1,92	1,77	3,58	4,59	2,71	3,52	3,35	3,88	2,58	2,95
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: 1. BPS (1983\*)

2. BPS (1992)

Keterangan: L = Laki-laki

P = Perempuan

Tabel 5.4: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Ketergantungan Ekonomi menurut Jenis Kelamin dan daerah, Tahun 1980 dan 1990

Jenis Indikator	Tahun	Kota			Pedesaan			Kota+Pedesaan		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kasar (%)	1980	41,26	14,02	27,68	47,26	18,25	32,66	45,99	17,37	31,61
	1990	49,25	21,01	35,20	53,43	22,82	38,07	51,88	22,20	37,08
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	1980	57,82	19,36	38,50	69,14	26,19	47,32	66,66	24,72	45,41
	1990	65,02	27,41	46,19	72,86	30,72	51,65	70,09	29,56	49,72
3. Tingkat Ketergantungan Ekonomi (%)	1980	-	-	261,21	-	-	206,18	-	-	216,31
	1990	-	-	184,12	-	-	162,69	-	-	169,71

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>)  
2. BPS (1992)

(1990) dengan perincian laki-laki dari 66,66 persen (1980) naik menjadi 70,04 persen (1990). Demikian halnya perempuan naik dari 24,72 persen (1980) menjadi 29,56 persen (1990).

Di daerah kota untuk laki-laki mengalami kenaikan dari 57,82 persen (1980) menjadi 65,02 persen (1990) dan perempuan dari 19,36 persen (1980) menjadi 27,41 persen (1990). Sedangkan daerah pedesaan juga terjadi hal yang sama yaitu naik, laki-laki dari 69,14 persen (1980) mejadi 72,86 persen (1990) dan perempuan dari 26,19 persen (1980) menjadi 30,72 persen (1990) (Tabel 5.4).

Tabel 5.5 menunjukkan tingkat partisipasi angkatan kerja yang dibedakan umur, jenis kelamin dan daerah selama 1971 - 1990. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dihitung dari jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas. TPAK ini dipengaruhi oleh berbagai faktor demografi, sosial dan ekonomi, di mana faktor tersebut diantaranya adalah umur, status perkawinan, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan.

Pola dan perkembangan TPAK laki-laki di Jawa Barat selama periode 1971 - 1990 menunjukkan hal yang berbeda terhadap TPAK perempuan, yang mana TPAK laki-laki lebih tinggi baik itu di daerah kota maupun di daerah pedesaan. Berdasarkan struktur umur, untuk umur 10 - 29 tahun selama periode 1971 - 1990 TPAK laki-laki di daerah kota lebih rendah jika dibandingkan dengan TPAK di daerah pedesaan. Perbedaan yang menyebabkan rendahnya TPAK laki-laki di daerah kota tersebut karena terjadi peningkatan fasilitas pendidikan dan perbaikan dibidang ekonomi yang berbeda antara daerah kota dan daerah pedesaan. TPAK laki-laki ini dilihat dari terendah dan tertinggi selama periode 1971 - 1990 tidak terjadi sesuatu pergeseran, yang mana terendah tetap saja ada pada laki-laki dengan umur 10 - 14 tahun dan tertinggi ada pada umur 35 - 39 tahun. Sehingga perbedaan dari struktur umur penduduk laki-laki nampak tidak terlalu berpengaruh terhadap TPAK-nya.

TPAK penduduk perempuan di Jawa Barat selama periode 1971 - 1990 ternyata menunjukkan angka lebih tinggi di pedesaan dari pada di kota. Rendahnya partisipasi penduduk perempuan di dalam angkatan kerja di daerah kota tidak hanya disebabkan masih terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor non pertanian, tetapi juga karena sifat dari pekerjaan di kota yang umumnya mengharuskan perempuan meninggalkan rumah. Hal ini menimbulkan konflik antara tugas kaum perempuan sebagai isteri dan ibu rumahtangga di satu pihak dan tugasnya sebagai pekerja di lain pihak. Sebaliknya, di pedesaan kebanyakan perempuan bekerja di pertanian keluarga dan tidak perlu bekerja di luar lingkungan keluarga atau dalam lingkungan yang asing bagi mereka sehingga tugas rumahtangga juga dapat dilakukan bersama-sama dengan pekerjaan mereka.

Mengamati TPAK menurut jenis pendidikan, hampir tidak ada perubahan untuk TPAK dengan pendidikan rendah. Begitu pula untuk SMTP kejuruan. Walaupun demikian, TPAK pada SMTP kejuruan lebih besar daripada TPAK pada SMTP umum. Kemungkinan penduduk yang mempunyai pendidikan kejuruan merasa lebih siap memasuki pasar kerja. Selain tingkat pendidikan tersebut, TPAKnya memperlihatkan kenaikan.

Tabel 5.5: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  
menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin  
dan daerah, Tahun 1971, 1980 dan 1990

Kelompok Umur	Kota			Pedesaan			Kota+Pedesaan		
	1971	1980	1990	1971	1980	1990	1971	1980	1990
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. Laki-laki	58,7	57,8	68,3	65,0	69,1	72,9	67,1	66,7	70,1
10 - 14	8,1	3,3	5,0	16,5	11,5	11,7	15,4	9,8	9,4
15 - 19	32,4	26,9	34,6	55,4	51,5	56,4	51,6	45,0	48,2
20 - 24	64,4	65,4	73,3	80,5	82,5	85,7	77,6	77,7	80,4
25 - 29	85,4	87,5	91,0	88,0	92,2	95,6	87,6	91,1	93,9
30 - 34	94,5	92,4	96,2	89,7	93,8	97,2	90,3	93,5	96,8
35 - 39	94,0	94,4	96,7	90,1	94,0	97,4	90,5	94,1	97,1
40 - 44	92,1	93,0	96,2	89,6	93,7	97,0	89,9	93,6	96,8
45 - 49	85,5	90,5	95,5	88,6	93,0	96,2	88,3	92,5	95,8
50 - 54	79,5	79,1	88,7	85,8	89,2	94,2	85,0	87,3	92,5
55 - 59	67,3	65,7	76,1	82,2	85,5	91,0	80,2	81,3	86,6
60 - 64	48,6	57,6	61,4	75,6	78,6	84,9	73,6	74,9	78,2
65 +	40,1	39,9	43,2	70,9	55,6	63,4	68,2	52,8	57,8
2. Perempuan	19,3	19,4	27,4	27,9	26,2	30,7	26,9	24,7	29,6
10 - 14	7,8	3,6	6,1	11,4	7,1	7,7	10,9	6,3	7,2
15 - 19	17,3	18,3	31,3	25,5	24,2	29,8	24,2	22,7	30,4
20 - 24	20,9	23,3	38,5	26,0	24,9	30,4	26,2	24,5	33,6
25 - 29	21,3	23,3	32,7	29,6	27,9	33,0	28,7	26,9	32,9
30 - 34	24,6	24,1	30,8	32,3	27,9	36,5	31,4	30,1	34,4
35 - 39	25,7	24,2	32,2	34,8	34,2	40,0	33,7	32,3	37,4
40 - 44	28,2	29,2	32,3	38,4	37,2	42,7	37,4	36,0	39,4
45 - 49	25,6	27,9	30,9	38,7	40,0	44,8	37,1	37,6	40,6
50 - 54	25,7	27,1	30,0	36,8	37,8	43,7	35,5	35,8	39,6
55 - 59	18,6	22,2	24,6	35,1	35,4	42,5	32,8	32,6	36,9
60 - 64	20,7	17,9	20,5	29,6	28,5	35,6	28,6	26,6	31,2
65 +	18,6	9,7	12,0	25,5	15,9	20,1	24,6	14,8	17,8

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>)  
2. BPS (1992)



Tabel 5.6: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin, Pendidikan Tertinggi yang di tamatkan dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990

Pendidikan Tertinggi Yg ditamatkan	Tahun	Kota			Pedesaan			Kota+Pedesaan		
		Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1. Blm/Tdk Pernah Sekolah	1980	68,86	23,37	36,37	78,94	30,34	47,42	78,16	29,55	46,27
	1990	71,80	23,60	37,41	81,60	31,75	48,36	79,94	30,10	46,25
2. Blm/Tdk Tamat Sekolah Dasar	1980	48,36	15,81	31,42	62,21	22,26	44,01	59,72	21,00	41,33
	1990	49,42	19,11	33,42	63,22	26,22	44,79	59,75	24,26	41,80
3. Sekolah Dasar	1980	61,27	16,94	39,94	74,20	26,02	52,90	70,92	23,44	49,44
	1990	65,79	26,21	45,36	78,96	33,83	57,79	75,02	31,23	53,82
4. SLTP Umum	1980	49,73	15,33	34,16	59,30	16,71	44,42	54,16	15,82	38,40
	1990	57,60	24,24	41,71	64,45	23,99	48,60	60,44	24,16	44,32
5. SLTP Kejuruan	1980	68,28	19,49	49,62	72,11	21,96	56,68	70,27	20,57	53,09
	1990	70,57	23,65	50,71	73,46	27,90	56,30	71,82	25,29	53,02
6. SLTA Umum	1980	62,42	26,76	50,39	77,78	34,28	65,40	67,26	28,74	54,85
	1990	73,95	37,78	59,56	81,49	40,05	68,23	75,90	38,23	61,60
7. SLTA Kejuruan	1980	79,84	53,35	69,88	86,56	65,03	80,46	83,32	58,17	74,79
	1990	88,66	57,57	76,08	90,69	67,44	82,83	89,42	60,63	78,44
8. Diploma I/II	1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1990	88,02	65,06	77,66	91,48	75,45	86,62	88,98	66,81	77,74
9. Akademi	1980	86,80	52,54	77,50	87,48	47,67	79,28	86,99	51,47	77,98
	1990	90,24	62,57	80,36	89,07	70,13	84,21	90,03	63,45	80,95
10. Universitas	1980	92,04	61,39	84,77	91,80	47,84	82,01	91,98	58,44	84,14
	1990	93,30	74,33	87,58	91,78	59,36	83,74	93,08	72,60	87,05

Sumber: 1. BPS (1974)  
 2. BPS (1983\*)  
 3. BPS (1992)

### 5.3. Penduduk Yang Bekerja

Bekerja menurut sensus penduduk adalah mereka yang selama seminggu yang lalu melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Mereka yang melakukan kegiatan yang menghasilkan sesuatu yang digunakan sendiri tidak termasuk ke dalam kategori bekerja.

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa pada tahun 1971 ada sebanyak 5.715.500 penduduk yang bekerja (89,86 persen diantaranya di pedesaan), kemudian pada tahun 1980 naik menjadi 8.500.943 orang (81,74 persen diantaranya di pedesaan). Pada tahun 1990 jumlah pekerja ini melonjak menjadi 12.574.116 orang (67,86 persen diantaranya di pedesaan). Meningkatnya jumlah pekerja dari tahun ke tahun menunjukkan semakin banyaknya kesempatan kerja yang diciptakan. Hal ini tentu saja bertalian dengan membaiknya situasi perekonomian Jawa Barat. Tetapi, menurunnya persentase pekerja di pedesaan berarti kesempatan kerja yang tersedia di daerah ini tidak sebanding dengan meningkatnya permintaan kerja. Bisa juga diantara para pencari kerja di pedesaan justru memperoleh kerja di kota, misalnya dalam sektor informal.

Dilihat per lapangan usaha, penduduk yang bekerja di sektor pertanian secara absolut masih tinggi dan meningkat; dari 4.062.242 orang pada tahun 1980 menjadi 4.630.405 orang pada tahun 1990. Tetapi, secara relatif justru terjadi penurunan yaitu dari 48,22 persen pada tahun 1980 menjadi 37,15 persen pada tahun 1990. Kecuali jasa kemasyarakatan, sektor-sektor lain memperlihatkan kenaikan. Persentase kenaikan tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan sebesar 5,73 persen dan kenaikan terendah di sektor listrik, gas dan air yaitu 0,14 persen (Tabel 5.8). Pergeseran peranan dari sektor pertanian ke sektor non pertanian sejalan dengan arah pembangunan ekonomi di Propinsi Jawa Barat.

Tabel 5.7: Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas yang Bekerja  
Menurut Jenis Kelamin dan Daerah, Tahun 1971, 1980 dan 1990

Jenis Kelamin	Tahun	Kota	Pedesaan	Kota+Pedesaan
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
Laki-laki	1971	453252	3684163	4137415
	1980	1161243	5016243	6177486
	1990	2854739	6013042	8867781
Perempuan	1971	126163	1451922	1578085
	1980	391416	1932041	2323457
	1990	1187103	2519232	3706375
Laki-laki+Perempuan	1971	579415	5136085	5715500
	1980	1552639	6948284	8500943
	1990	4041842	8532274	12574116

Sumber: 1. BPS (1974)  
2. BPS (1983<sup>a</sup>)  
3. BPS (1992)

Kuznets (1966) mengelompokkan lapangan usaha ke dalam tiga sektor yaitu Sektor A (agriculture atau Pertanian), Sektor M (manufacture) terdiri dari Pertambangan, Industri, Listrik dan Das, Air Minum, Bangunan, dan Sektor S (service) terdiri dari Angkutan, Perdagangan, Keuangan dan Jasa Kemasyarakatan. Meskipun sektor pertanian masih dominan di Jawa Barat tetapi peranannya menurun. Sementara itu, peranan sektor M dan sektor S memperlihatkan peningkatan. Dengan demikian, di Jawa Barat telah terjadi pergeseran peran dari sektor A ke sektor M dan sektor S. Pergeseran tersebut menandakan bahwa pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan, telah memberikan hasil.

Tabel 5.8: Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan daerah, Tahun 1980 dan 1990

Lapangan Pekerjaan Utama	1980	%	1990	%	Perubahan [(5)-(3)]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
01. Pertanian, Kehutanan Perburuan, Perikanan	4062242	48,22	4630405	37,15	-11,07
02. Pertambangan dan Penggalian	68117	0,81	136748	1,10	0,29
03. Industri Pengolahan	891560	10,58	2032365	16,31	5,73
04. Listrik, Gas dan air	12122	0,14	34567	0,28	0,14
05. Bangunan	353474	4,20	715941	5,74	1,54
06. Perdagangan Besar, Eceran, Rumahmakan	1351891	16,05	2351048	18,86	2,81
07. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	302479	3,59	664799	5,33	1,74
08. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan	52670	0,63	138660	1,11	0,48
09. Jasa Kemasyarakatan	1320324	15,67	1753165	14,07	-1,60
10. Lainnya	9012	0,11	4914	0,04	-0,07
11. Tak Terjawab	77052	-	111504	-	-
Jumlah	8500943	100,00	12574116	100,00	-

Sumber: 1. BPS (1983a)  
2. BPS (1992)

Mayoritas pekerja yang tidak pernah sekolah berada di sektor A, yakni 63,87 persen pada tahun 1980 dan 58,97 persen pada tahun 1990. Juga mereka yang tidak/belum tamat SD persentasenya masih relatif besar. Jumlah pekerja dengan pendidikan rendah di sektor M tidak terlalu banyak, walaupun menunjukkan peningkatan. Seperti halnya dengan sektor M, sektor S lebih memerlukan pendidikan menengah ke atas. Kontradiksinya dengan sektor M, peranan sektor S dalam periode 1980-1990 mengalami penurunan. Dilihat dari status pekerjaan, pekerja keluarga memberikan persentase yang paling tinggi yaitu 71,49 persen pada tahun 1980 dan 70,91 persen pada tahun 1990. Di sektor M, Buruh/Karyawan merupakan status pekerjaan dengan persentase terbesar yaitu 26,93 persen pada tahun 1980 dan 41,38 persen pada tahun 1990. Sedang di sektor S, mereka yang berstatus berusaha sendiri tanpa bantuan orang lainlah yang terbesar yaitu 49,15 persen pada tahun 1980 dan 65,77 persen pada tahun 1990. Selengkapnya disajikan dalam Tabel 5.10.

Terlihat dalam Tabel 5.11, bahwa persentase penduduk yang bekerja menurut jenis pekerjaan untuk tenaga usaha pertanian mengalami penurunan sekitar 11,40 persen dari 48,50 persen pada tahun 1980 menjadi 37,10 persen pada tahun 1990. Untuk pekerja yang tergolong "Blue Collar" masih tergolong tinggi persentase kenaikannya dibandingkan dengan pekerja yang tergolong "White Collars". Rendahnya pertumbuhan dalam "White Collars" ini erat kaitannya dengan masalah kualitas tenaga kerja, terutama masih rendahnya pendidikan.

#### 5.4. Pengangguran

Mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan digolongkan ke dalam pengangguran terbuka. Persentase tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat berdasarkan Tabel 5.12, untuk kurun 1980-1990 mengalami kenaikan dari 2,04 persen pada tahun 1980 menjadi 4,15 persen pada tahun 1990. Tingkat pengangguran terbuka di kota lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Membandingkan pengangguran terbuka menurut jenis kelamin, terlihat bahwa selama kurun 1980-1990 baik di daerah kota maupun di daerah pedesaan persentase pengangguran perempuan lebih besar.

**Tabel 5.9: Persentase Penduduk Berumur 10 tahun keatas yang Bekerja selama Seminggu yang lalu menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan dan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 1980 dan 1990**

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Tahun	A	M	S	%	(Jumlah)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
01.Tdk Pernah Sekolah	1980	63,87	11,05	25,08	100,00	2191923
	1990	58,97	14,23	26,80	100,00	1634587
02.Tdk/Blm Tamat SD	1980	53,04	15,94	31,02	100,00	3362331
	1990	48,22	20,27	31,51	100,00	3516364
03.Sekolah Dasar	1980	40,48	18,71	40,81	100,00	2085693
	1990	38,75	24,65	36,60	100,00	4715284
04.SMTP Umum	1980	10,90	24,99	64,11	100,00	278640
	1990	11,64	37,20	51,16	100,00	909996
05.SMTP Kejuruan	1980	11,62	20,86	67,52	100,00	87392
	1990	11,37	28,95	59,68	100,00	94220
06.SLTA Umum	1980	7,64	20,41	71,95	100,00	182132
	1990	5,05	31,89	63,06	100,00	753677
07.SLTA Kejuruan	1980	4,93	14,66	80,41	100,00	255023
	1990	3,85	27,14	69,01	100,00	688279
08.Diploma I/II	1980	-	-	-	-	-
	1990	1,15	13,33	85,52	100,00	48869
09.Akademi/DI/III	1980	3,99	13,90	82,11	100,00	29556
	1990	1,41	19,22	79,37	100,00	97150
10.Universitas	1980	5,64	11,27	83,09	100,00	26282
	1990	2,49	18,36	79,15	-	-
11.Tak Terjawab	1980	33,76	19,15	42,91	100,00	1967
	1990	39,26	37,78	22,96	100,00	13528
Jumlah	1980	48,22	15,73	36,05	100,00	8500943
	1990	37,15	23,43	39,42	100,00	12574116

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>)  
2. BPS (1992)

Tabel 5.10: Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu menurut Status Pekerjaan Utama dan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 1980 dan 1990

Status Pekerjaan Utama	A		M		S		% Jumlah	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990	1980	1990
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1. Berusaha Sendiri Tanpa Bantuan Orang Lain	40,92	25,86	9,93	8,37	49,15	65,77	100,00 (2345102)	100,00 (2593156)
2. Berusaha dengan Dibantu ART/Buruh Tidak Tetap	64,17	61,27	10,41	9,51	25,42	29,22	100,00 (2115686)	100,00 (2878370)
3. Berusaha Dengan Buruh Tetap	27,78	30,80	29,69	33,10	42,53	36,10	100,00 (244355)	100,00 (213844)
4. Buruh/Karyawan	34,97	20,97	26,93	41,38	38,10	37,65	100,00 (2646775)	100,00 (1469858)
5. Pekerja Keluarga	71,49	70,91	7,76	9,40	20,75	19,69	100,00 (1040284)	100,00 (1469858)
6. Tak Terjawab	41,16	23,94	17,12	31,21	41,72	44,85	100,00 (108741)	100,00 (13273)
%	48,22	37,15	15,73	23,43	36,05	39,42	100,00 (8500943)	100,00 (12574116)

Sumber: 1. BPS (1983\*)  
2. BPS (1992)

Tabel 5.11: Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jenis Pekerjaan Utama, 1980 dan 1990

Jenis Pekerjaan Utama	1980		1990		Perubahan	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah (4)-(2)	% (5)-(3)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1. Tenaga Profesional, Tehnisi dan yang Sejenis	252362	3,00	445475	3,57	193113	0,57
2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan	8409	0,10	27302	0,22	18893	0,12
3. Tenaga Tata Usaha dan yang Sejenisnya	286642	3,41	660916	5,30	374274	1,89
4. Tenaga Usaha Penjualan	1360089	16,16	2308019	18,50	947930	2,34
5. Tenaga Usaha Jasa	366655	4,36	566919	4,55	200264	0,19
6. Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	4082260	8,50	4627996	37,10	545736	-11,40
7. Tenaga Produksi, Operator Alat Angkutan, Pekerja Kasar	1977267	23,49	3825937	30,67	1848370	7,18
8. Lainnya	83612	0,99	10140	0,08	-73472	-0,91
9. Tak Terjawab	83647	-	101412	-	-17765	-
Jumlah	8500943	100,00	12574116	100,00	4073173	-

Sumber: 1. BPS (1983\*)  
2. BPS (1992)



**Tabel 5.12: Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tahun 1980 dan 1990**

Jenis Kelamin	Kota		Pedesaan		Kota + Pedesaan	
	1980	1990	1980	1990	1980	1990
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1. Laki-laki	2,76	5,49	1,45	2,71	1,70	3,62
2. Perempuan	2,99	7,03	2,93	4,59	2,94	5,38
Jumlah	2,82	5,95	1,87	3,27	2,04	4,15

Sumber: BPS (1992)

Tabel 5.13 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Pengangguran terbuka paling banyak dialami oleh mereka yang mempunyai pendidikan SMTA, terutama perempuan. Penganggur yang tidak berpendidikan memiliki persentase yang tidak besar. Penyebabnya adalah selain sebagian besar penduduk Jawa Barat memiliki pendidikan juga mereka yang tidak pernah sekolah itu tidak memiliki banyak alternatif dalam mencari kerja; biasanya mereka bekerja di pertanian atau sebagai pembantu rumah tangga.

Dengan batas 35 jam seminggu, maka mereka yang bekerja kurang dari 35 jam dikatakan sebagai pekerja yang kurang optimal dan dikatakan sebagai setengah penganggur. Setengah pengangguran di Jawa Barat mengalami penurunan, di mana pada tahun 1980 terdapat 37,51 persen dan turun menjadi 30,90 persen pada tahun 1990. Turunnya tingkat setengah penganggur ini erat kaitannya dengan perbaikan tingkat pengupahan, pendidikan dan jenis pekerjaan dari orang yang bekerja banyak yang mengalami kesesuaian.

Tabel 5.13: Persentase Tingkat Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Jenis Kelamin dan Daerah, Tahun 1980 dan 1990

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan		Kota			Pedesaan			Kota + Pedesaan		
Tahun	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	Lk	Pr	Lk+Pr	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1. Tidak/Belum Pernah Sekolah	1980	1,00	0,94	0,98	1,18	3,31	2,06	1,17	3,10	1,98
	1990	1,75	1,20	1,50	1,27	2,57	1,84	1,34	2,35	1,79
2. Tidak/Belum Tamat SD	1980	2,17	2,08	2,15	1,28	2,60	1,60	1,40	2,53	1,67
	1990	3,37	4,04	3,57	1,73	3,20	2,16	2,08	3,38	2,46
3. Sekolah Dasar	1980	2,58	2,86	2,64	1,57	2,45	1,76	1,79	2,54	1,95
	1990	4,35	5,80	4,78	2,73	5,27	3,46	3,16	5,49	3,81
4. SMTP Umum	1980	3,50	4,94	3,79	3,50	4,63	3,65	3,50	4,82	3,72
	1990	6,40	8,60	7,01	6,05	11,60	7,13	6,25	9,59	7,06
5. SMTP Kejuruan	1980	3,55	5,46	3,84	1,75	2,37	1,78	2,59	4,01	2,78
	1990	3,62	6,71	4,23	3,70	10,34	4,94	3,66	8,25	4,54
6. SMTA Umum	1980	4,51	8,25	5,18	4,09	6,77	4,49	4,36	7,78	4,92
	1990	10,08	14,79	11,27	10,13	19,69	11,93	10,10	15,81	11,44
7. SMTA Kejuruan	1980	4,84	5,85	5,13	2,76	3,74	2,99	3,72	4,87	4,02
	1990	6,85	8,91	7,48	5,55	9,40	6,61	6,36	9,08	7,16
8. Diploma I/II	1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1990	4,44	7,63	5,64	1,82	10,70	4,17	3,69	8,22	5,27
9. Akademi	1980	1,38	3,10	1,69	1,09	-	0,96	1,29	2,47	1,49
	1990	3,92	8,73	5,26	3,49	6,69	4,17	3,84	8,47	5,08
10. Universitas	1980	1,33	2,33	1,50	1,50	2,33	1,61	1,37	2,33	1,52
	1990	4,90	8,90	5,92	6,17	8,00	6,50	5,08	8,81	6,00
Jumlah	1980	2,70	2,99	2,82	2,93	2,93	1,87	1,70	2,94	2,04
	1990	5,48	7,03	5,95	2,71	4,59	3,27	3,62	5,38	4,15

Sumber: BPS (1992) (diolah)

Tabel 5.14: Persentase Tingkat Pengangguran Menurut  
Jenis Kelamin, Tahun 1980 dan 1990

Tahun	Lk	Pr	Lk + Pr
[1]	[2]	[3]	[4]
1980	31,25	53,93	37,51
1990	24,14	45,59	30,90

Sumber: BPS (1992)

<https://jabar.bps.go.id>

## BAB VI PERUMAHAN DAN LAHAN PERTANIAN

### 6.1. Pendahuluan

Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan rumahtangga, kebutuhan akan sarana tempat tinggalpun semakin meningkat. Tercatat bahwa banyaknya rumahtangga di Jawa Barat terus meningkat dari 4.797.249 rumahtangga pada tahun 1971 menjadi 6.100.713 rumahtangga pada tahun 1980 dan pada tahun 1990 telah mencapai 8.179.898 rumahtangga (Tabel 6.1). Dengan demikian, dalam kurun waktu 1980-1990 telah terjadi pertambahan sebanyak 2.079.185 rumahtangga atau 207.919 rumahtangga per tahun. Dengan asumsi bahwa setiap rumahtangga memerlukan satu buah rumah, maka kebutuhan akan sarana tempat tinggal tersebut diperkirakan sebanyak 207.919 unit ditambah dengan tunggakan tahun-tahun sebelumnya.

Di dalam kenyataannya, distribusi pembangunan perumahan tidak selalu sebanding dengan pertambahan rumahtangga di setiap kabupaten/kotamadya. Sebagai contoh, besarnya pertambahan rumahtangga di kawasan Botabek diimbangi dengan banyaknya pembangunan komplek-komplek perumahan. Di lain pihak, banyaknya unit rumah yang dibangun di kabupaten-kabupaten Lebak, Pandeglang dan Sumedang (dengan pertambahan rumahtangga yang hampir seimbang) belum tentu proporsional.

Rumah sehat tidak selalu harus diidentikkan dengan fasilitas rumahtangga saja, melainkan juga memperhatikan kesehatan lingkungan. Secara deskriptif dapat dikatakan bahwa fasilitas lingkungan dari suatu rumah dapat mempengaruhi kesehatan penghuninya, terutama bayi dan anak-anak. Pada akhirnya, ini semua akan mempengaruhi angka kematian bayi (AKB). Menggunakan data Sensus Penduduk 1990 (Tabel 6.2), terlihat adanya hubungan negatif antara kedua peubah tersebut. Semakin baik fasilitas rumahtangga (TV dan luas lantai) dan fasilitas lingkungan (air minum, air mandi dan kakus) menyebabkan semakin rendahnya AKB.

**Tabel 6.1: Jumlah Rumahtangga dan Laju Pertumbuhan  
Rumahtangga Tahun 1971-1980 dan 1980-1990  
Menurut Kabupaten/Kotamadya**

**Daerah : Kota + Pedesaan**

Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Rumahtangga		Laju Pertumbuhan Rumahtangga		
	1971	1980	1990	71-80	80-90
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
01.Kab.Pandeglang	186250	144117	112640	1,79	2,60
02.Kab.Lebak	189815	145394	118223	2,30	2,70
04.Kab.Bogor	779770	517146	349636	4,39	4,19
05.Kab.Sukabumi	461274	352107	269522	2,98	2,74
06.Kab.Cianjur	414692	325759	253849	2,78	2,44
07.Kab.Bandung	733023	578893	431480	3,28	2,39
07.Kab.Garut	395386	319152	262343	2,18	2,17
08.Kab.Tasikmayala	448146	365493	296227	2,34	2,06
09.Kab.Ciamis	414477	356047	303293	1,78	1,53
10.Kab.Kuningan	204706	172184	149661	1,55	1,75
11.Kab.Cirebon	367743	291350	245819	1,88	2,36
12.Kab.Majalengka	273875	222531	190962	1,69	2,10
13.Kab.Sumedang	227185	185208	158696	1,71	2,06
14.Kab.Indramayu	365364	298433	234863	2,67	2,04
15.Kab.Subang	324305	265536	214373	2,38	2,02
16.Kab.Purwakarta	135640	105749	83871	2,58	2,52
17.Kab.Karawang	366187	289956	229707	2,59	2,36
18.Kab.Bekasi	456745	240863	171639	3,79	6,61
19.Kab.Tangerang	564499	306762	208761	4,32	6,29
20.Kab.Serang	301689	231022	187457	2,32	2,70
21.Kod.Bogor	54249	46130	35782	2,77	1,63
22.Kod.Sukabumi	28348	22208	18925	1,77	2,47
23.Kod.Bandung	433108	274401	224047	2,25	4,67
24.Kod.Cirebon	53422	44272	35273	2,53	1,80
<b>Jawa Barat</b>	<b>81798989</b>	<b>6100713</b>	<b>4797249</b>	<b>2,68</b>	<b>2,97</b>

Sumber: BPS (1991b)

Tabel 6.2: Hubungan Antara Angka Kematian Bayi dengan Fasilitas Rumah tangga Tahun 1990

Daerah	AKB	Persentase Rumah tangga dengan				Luas Lantai <40 m <sup>2</sup>
		Sungai sbg Sumber Air Minum	Sungai sbg Sumber Air Mandi	Selain Kakus	TV	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<b>Daerah dengan AKB rendah</b>						
1. Kod. Bogor	33,58	0,37	3,23	17,73	66,86	30,06
2. Kod. Bandung	49,78	0,03	0,73	2,41	65,36	48,08
3. Kab. Sumedang	57,74	1,92	4,78	37,54	26,48	44,40
4. Kod. Sukabumi	57,74	0,36	3,74	1,40	61,50	35,91
5. Kab. Kuningan	61,58	0,18	10,40	45,55	26,56	17,88
<b>Rata-rata</b>	<b>52,08</b>	<b>0,57</b>	<b>4,58</b>	<b>20,93</b>	<b>49,35</b>	<b>35,27</b>
<b>Daerah dengan AKB tinggi</b>						
1. Kab. Pandeglang	98,99	7,78	20,07	68,57	10,03	34,57
2. Kab. Cianjur	100,50	6,25	16,84	33,90	14,00	50,61
3. Kab. Indramayu	103,58	8,15	9,42	61,84	13,40	32,13
4. Kab. Karawang	109,52	3,44	8,19	56,99	20,09	40,09
5. Kab. Serang	123,77	12,36	18,11	67,54	22,92	26,88
<b>Rata-rata</b>	<b>107,27</b>	<b>7,60</b>	<b>14,53</b>	<b>57,77</b>	<b>16,09</b>	<b>36,86</b>

Sumber: 1. BPS (1992)  
2. Tabel 3.6

Tabel 6.3: Persentase Rumah tangga menurut Luas Lantai (m<sup>2</sup>)  
per Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990

Daerah : Kota+Pedesaan

Kabupaten/ Kotamadya	<20	20- 29	30- 39	40- 49	50- 69	70- 99	100- 149	150- 199	200- 299	300+	Jumlah Total
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
01. Kab. Pandeglang	4,13	13,99	16,45	20,56	22,93	16,76	3,81	0,67	0,30	0,42	100,00
02. Kab. Lebak	6,25	18,65	22,40	21,26	18,37	99,84	9,84	2,48	0,29	0,15	100,00
03. Kab. Bogor	7,97	11,22	16,35	18,72	22,47	14,44	5,95	1,61	0,79	0,48	100,00
04. Kab. Sukabumi	11,26	24,33	21,15	18,87	14,24	6,61	1,86	0,51	0,40	0,73	100,00
05. Kab. Cianjur	7,96	21,60	21,05	18,80	18,00	8,55	2,36	0,55	0,37	0,76	100,00
06. Kab. Bandung	10,43	23,65	21,69	15,72	13,11	9,67	3,79	0,91	0,58	0,44	100,00
07. Kab. Garut	9,41	25,12	28,97	16,72	10,89	6,02	2,14	0,35	0,20	0,19	100,00
08. Kab. Tasikmayala	7,94	22,49	24,32	28,48	14,27	8,09	3,12	0,59	0,32	0,34	100,00
09. Kab. Ciamis	3,14	12,33	16,79	21,78	25,81	14,48	4,34	0,63	0,36	0,34	100,00
10. Kab. Kuningan	1,49	5,83	10,56	18,63	35,38	21,69	4,69	0,64	0,55	0,54	100,00
11. Kab. Cirebon	3,57	11,13	15,54	17,93	28,83	15,96	4,95	1,40	0,45	0,26	100,00
12. Kab. Majalengka	3,20	10,50	18,61	21,42	27,66	13,88	3,50	0,69	0,30	0,27	100,00
13. Kab. Sumedang	40,04	16,03	24,33	21,16	17,62	11,33	3,61	0,82	0,35	0,69	100,00
14. Kab. Indramayu	5,53	11,53	15,07	21,15	24,43	15,70	4,50	1,14	0,52	0,43	100,00
15. Kab. Subang	6,52	13,77	22,23	23,18	19,72	10,87	2,61	0,65	0,23	0,21	100,00
16. Kab. Purwakarta	5,42	14,80	18,20	20,09	19,82	14,01	4,47	0,76	0,80	1,63	100,00
17. Kab. Karawang	4,99	13,46	21,64	25,46	18,29	10,20	3,12	0,79	0,58	1,47	100,00
18. Kab. Bekasi	5,13	9,66	12,71	19,22	24,81	17,77	7,32	1,65	0,90	0,82	100,00
19. Kab. Tangerang	8,90	9,35	11,16	11,88	24,12	18,42	7,24	2,31	1,20	0,37	100,00
20. Kab. Serang	4,41	9,10	13,37	18,41	23,78	19,83	7,95	1,88	0,80	0,46	100,00
21. Kod. Bogor	7,82	9,23	13,01	13,27	16,29	18,39	11,82	3,96	3,43	2,75	100,00
22. Kod. Sukabumi	8,01	14,14	13,76	12,95	18,48	13,83	9,25	4,93	2,75	1,84	100,00
23. Kod. Bandung	21,68	14,28	12,12	11,04	11,36	13,08	8,37	3,13	2,98	1,97	100,00
24. Kod. Cirebon	6,62	7,52	10,83	12,89	22,66	19,09	11,25	4,07	2,81	2,25	100,00
1980	11,10	20,35	19,77	18,31	17,18	9,18	2,72	0,60	0,38	0,42	100,00
Jawa Barat 1990	7,59	15,27	18,14	18,73	20,06	12,97	4,68	1,20	0,72	0,63	100,00

Sumber: 1. BPS (1983a)  
2. BPS (1992)

Tabel 6.4: Persentase Rumah tangga Menurut Luas Lantai (m<sup>2</sup>) per Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990

Daerah : Kota

Kabupaten/ Kotamadya	<20	20- 29	30- 39	40- 49	50- 69	70- 99	100- 149	150- 199	200- 299	300+	Jumlah Total
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
01. Kab. Pandeglang	4,59	13,21	15,96	16,15	21,94	18,76	6,81	1,19	0,80	0,59	100,00
02. Kab. Lebak	10,48	11,29	15,62	13,69	23,83	16,09	6,44	0,86	0,85	0,85	100,00
03. Kab. Bogor	10,31	9,35	14,32	15,59	22,14	16,43	7,63	2,43	1,19	0,60	100,00
04. Kab. Sukabumi	8,03	15,75	18,31	18,96	17,59	12,32	5,44	1,74	1,23	0,63	100,00
05. Kab. Cianjur	11,93	16,87	16,41	15,43	15,92	13,58	5,79	1,65	1,35	1,08	100,00
06. Kab. Bandung	13,24	19,97	17,72	14,33	12,52	12,99	5,83	1,51	1,17	0,72	100,00
07. Kab. Garut	10,33	19,79	23,45	16,47	12,56	10,60	5,05	0,97	0,58	0,50	100,00
08. Kab. Tasikmayala	10,22	15,15	16,64	14,83	16,22	15,18	8,06	1,72	1,23	0,75	100,00
09. Kab. Ciamis	4,25	13,64	17,18	17,90	20,37	15,13	6,51	1,69	1,98	1,28	100,00
10. Kab. Kuningan	1,41	5,53	8,79	13,12	30,93	30,07	7,59	1,27	0,77	1,50	100,00
11. Kab. Cirebon	3,29	7,82	13,20	19,08	27,70	19,15	6,84	1,60	0,86	0,43	100,00
12. Kab. Majalengka	4,30	9,17	16,59	20,21	23,37	15,72	7,29	1,74	1,03	0,57	100,00
13. Kab. Sumedang	7,95	14,74	15,36	15,77	18,02	17,14	6,82	2,38	1,46	0,36	100,00
14. Kab. Indramayu	3,45	9,29	12,26	20,73	25,42	19,76	5,43	1,74	0,92	1,02	100,00
15. Kab. Subang	6,50	14,64	23,37	18,05	16,75	12,67	4,61	1,03	0,32	0,55	100,00
16. Kab. Purwakarta	4,60	5,94	12,41	18,03	20,44	21,31	10,86	1,64	2,89	1,87	100,00
17. Kab. Karawang	6,20	1,14	19,99	22,04	18,34	13,19	4,68	1,96	1,32	0,88	100,00
18. Kab. Bekasi	6,62	9,91	12,50	15,33	22,82	19,94	8,86	2,16	1,20	0,65	100,00
19. Kab. Tangerang	13,31	9,86	8,81	11,86	21,49	20,11	9,25	3,04	1,79	0,46	100,00
20. Kab. Serang	7,49	8,67	11,27	11,48	20,45	23,24	11,83	2,94	1,66	0,94	100,00
21. Kod. Bogor	7,82	9,23	13,01	13,27	16,29	18,39	11,84	3,96	3,43	2,75	100,00
22. Kod. Sukabumi	8,06	14,14	13,76	12,95	18,48	13,83	9,25	4,93	2,75	1,84	100,00
23. Kod. Bandung	21,45	14,18	12,12	11,06	11,40	13,15	8,49	3,16	3,02	1,97	100,00
24. Kod. Cirebon	6,87	7,70	10,63	12,76	21,89	19,08	11,58	4,22	2,92	2,35	100,00
1980	16,92	17,68	16,46	14,25	14,99	10,94	5,25	1,56	1,11	0,84	100,00
Jawa Barat 1990	11,18	12,26	13,95	14,70	18,68	16,43	7,80	2,37	1,65	0,97	100,00

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>)  
2. BPS (1992)



Tabel 6.5: Persentase Rumah tangga menurut luas lantai (m<sup>2</sup>) per Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990

Daerah : Pedesaan

Kabupaten/ Kotamadya	<20	20- 29	30- 39	40- 49	50- 69	70- 99	100- 149	150- 199	200- 299	300+	Jumlah Total
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
01. Kab. Pandeglang	4,10	14,04	16,48	20,85	22,99	16,62	3,62	0,63	0,27	0,40	100,00
02. Kab. Lebak	5,97	19,13	22,85	21,75	18,01	9,43	2,22	0,25	0,11	0,28	100,00
03. Kab. Bogor	5,57	13,14	18,43	21,93	22,81	12,41	4,22	0,76	0,37	0,18	100,00
04. Kab. Sukabumi	11,88	25,97	21,70	18,85	13,60	5,51	1,22	0,28	0,24	0,75	100,00
05. Kab. Cianjur	7,37	22,31	21,74	19,30	18,31	7,81	1,81	0,38	0,22	0,71	100,00
06. Kab. Bandung	8,72	25,90	24,16	16,58	13,47	7,64	2,55	0,55	0,22	0,27	100,00
07. Kab. Garut	9,26	25,99	29,92	16,76	10,62	5,27	1,66	0,25	0,13	0,13	100,00
08. Kab. Tasikmayala	7,44	24,12	26,02	19,29	13,83	6,57	2,03	0,34	0,11	0,25	100,00
09. Kab. Ciamis	3,04	12,22	10,75	22,11	26,27	14,42	4,16	0,54	0,22	0,26	100,00
10. Kab. Kuningan	1,50	5,88	10,89	19,66	36,21	20,13	4,15	0,52	0,51	0,55	100,00
11. Kab. Cirebon	3,72	12,97	16,84	17,29	29,45	14,19	3,96	0,28	0,21	0,16	100,00
12. Kab. Majalengka	2,99	10,75	18,99	21,64	28,47	13,53	2,79	0,45	0,17	0,21	100,00
13. Kab. Sumedang	3,53	16,21	25,52	21,88	17,56	10,56	3,79	0,62	0,20	0,34	100,00
14. Kab. Indramayu	5,85	11,89	15,52	21,22	24,28	15,06	4,35	0,35	0,46	0,73	100,00
15. Kab. Subang	6,51	13,62	22,02	23,85	20,10	10,59	2,33	0,60	0,21	0,17	100,00
16. Kab. Purwakarta	5,62	17,01	19,64	20,60	19,67	12,20	2,88	0,54	0,28	0,57	100,00
17. Kab. Karawang	4,68	13,99	22,06	26,34	18,28	9,43	2,72	0,48	0,39	1,63	100,00
18. Kab. Bekasi	3,44	9,37	12,97	23,64	27,06	15,30	2,57	0,06	0,57	0,01	100,00
19. Kab. Tangerang	3,29	8,71	14,17	23,31	27,49	16,27	4,70	0,37	0,44	0,25	100,00
20. Kab. Serang	3,74	9,19	13,82	19,91	24,50	19,10	7,11	0,65	0,62	0,35	100,00
21. Kod. Bogor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Kod. Sukabumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Kod. Bandung	36,28	20,26	12,21	8,87	8,87	8,47	8,84	1,28	0,42	1,68	100,00
24. Kod. Cirebon	0,47	3,04	15,95	16,10	41,50	19,14	3,18	0,38	0,24	-	100,00
1980	9,79	20,95	20,51	19,22	17,67	8,78	2,15	0,39	0,21	0,33	100,00
Jawa Barat 1990	5,93	16,66	20,09	20,60	20,70	11,37	3,23	0,66	0,29	0,48	100,00

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>)  
2. BPS (1992)

## 6.2. Luas Lantai

Tingkat kesejahteraan rumahtangga dapat pula dilihat dari luas lantai rumah yang dihuninya. Dikaitkan dengan banyaknya anggota rumahtangga, hal ini akan mencerminkan kesehatan rumahtangga tersebut. Tabel 6.3 memperlihatkan perbandingan dua hasil sensus penduduk (SP'80 dan SP'90). Dari tabel ini terlihat adanya penurunan persentase rumahtangga dengan luas lantai kurang dari 40 m<sup>2</sup>, yaitu dari 51,22 persen pada tahun 1980 menjadi 41,00 per sen. Pergeseran persentase ini diduga ada hubungannya dengan semakin baiknya pendapatan masyarakat dan semakin tersedianya rumah-rumah sehat yang bisa dibeli oleh masyarakat. Keadaan serupa terjadi baik di kota maupun di pedesaan (Tabel 6.4 dan 6.5).

## 6.3. Penggunaan Bahan Bakar

Dengan semakin baiknya jenis bahan bakar yang digunakan dalam suatu rumahtangga dapat diartikan semakin baiknya kondisi rumahtangga tersebut. Selama periode 1980-1990, persentase rumahtangga di Jawa Barat yang menggunakan jenis penerangan dari listrik naik sangat drastis yaitu dari 13,93 persen (1980) menjadi 53,77 persen (1990) (Tabel 6.6). Kenaikan ini diimbangi oleh penurunan persentase dalam pemakaian lampu petromak, lampu minyak tanah dan lain-lain. Demikian pula keadaan di kota maupun di pedesaan (Tabel 6.7 dan 6.8).

Peningkatan program listrik masuk desa dan juga perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat diduga telah memacu peningkatan pemakaian listrik tersebut. Walaupun kenaikan persentase pemakaian listrik untuk penerangan sangat meningkat, namun jika dilihat cakupannya, hampir setengah dari jumlah rumahtangga di Jawa Barat belum menikmati listrik.

Penggunaan bahan bakar untuk penerangan dan untuk memasak tidak selalu dari jenis bahan bakar yang sama. Dengan demikian, besarnya persentase penggunaan bahan bakar untuk penerangan tidak

Tabel 6.6: Persentase Rumahtangga Menurut Penggunaan Jenis Bahan Bakar untuk Penerangan per Kabupaten/ Kotamadya Tahun 1990

Daerah : Kota + Pedesaan

Kabupaten/ Kotamadya	Listrik	Gas	Petromak	Minyak Tanah	Lain- nya	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
01.Kab.Pandeglang	14,22	0,15	4,26	81,23	0,14	100,00
02.Kab.Lebak	10,26	0,17	7,97	81,21	0,38	100,00
03.Kab.Bogor	66,70	0,13	4,15	28,96	0,06	100,00
04.Kab.Sukabumi	36,41	0,20	4,14	58,98	0,27	100,00
05.Kab.Cianjur	37,13	0,17	5,51	56,84	0,35	100,00
06.Kab.Bandung	78,37	0,18	3,16	18,08	0,21	100,00
07.Kab.Garut	52,83	0,13	3,04	43,06	0,94	100,00
08.Kab.Tasikmayala	48,18	0,12	3,25	56,21	0,25	100,00
09.Kab.Ciamis	37,15	0,15	2,11	60,39	0,19	100,00
10.Kab.Kuningan	52,47	0,15	4,61	39,66	0,12	100,00
11.Kab.Cirebon	61,51	0,19	7,16	30,93	0,20	100,00
12.Kab.Majalengka	45,15	0,12	7,00	47,39	0,34	100,00
13.Kab.Sumedang	62,52	0,16	1,77	35,19	0,36	100,00
14.Kab.Indramayu	22,47	0,18	8,30	68,53	0,52	100,00
15.Kab.Subang	34,17	0,13	7,56	57,73	0,42	100,00
16.Kab.Purwakarta	43,68	0,30	4,84	50,96	0,21	100,00
17.Kab.Karawang	41,13	0,21	6,10	51,73	0,83	100,00
18.Kab.Bekasi	6,76	0,27	3,21	28,40	0,37	100,00
19.Kab.Tangerang	73,11	0,26	3,79	22,50	6,28	100,00
20.Kab.Serang	39,79	0,14	7,13	52,22	0,70	100,00
21.Kod.Bogor	93,97	0,28	1,49	4,23	0,03	100,00
22.Kod.Sukabumi	95,57	0,32	1,00	2,99	0,12	100,00
23.Kod.Bandung	96,51	0,33	1,12	1,99	0,05	100,00
24.Kod.Cirebon	86,79	0,30	2,47	10,40	0,04	100,00
Jawa Barat 1980	13,93	-	12,04	73,06	0,98	100,00
1990	53,77	0,19	4,44	41,28	0,32	100,00

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>)  
2. BPS (1992)

Tabel 6.7: Persentase Rumah tangga Menurut Penggunaan Jenis Bahan Bakar untuk Penerangan per Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990

Daerah : Pedesaan

Kabupaten/ Kotamadya	Listrik	Gas	Petromak	Minyak Tanah	Lain- nya	Jumlah	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
01.Kab.Pandeglang	10,83	0,14	4,40	84,49	0,15	100,00	
02.Kab.Lebak	6,15	0,17	7,94	85,33	0,41	100,00	
03.Kab.Bogor	47,06	0,07	5,15	47,69	0,03	100,00	
04.Kab.Sukabumi	27,32	0,21	4,37	67,79	0,31	100,00	
05.Kab.Cianjur	29,36	0,18	6,03	64,04	0,39	100,00	
06.Kab.Bandung	70,86	0,21	3,55	25,11	0,30	100,00	
07.Kab.Garut	46,76	0,14	3,43	48,58	1,08	100,00	
08.Kab.Tasikmayala	29,81	0,07	3,01	66,86	0,25	100,00	
09.Kab.Ciamis	33,26	0,14	2,22	64,20	0,18	100,00	
10.Kab.Kuningan	48,45	0,16	5,14	46,13	0,02	100,00	
11.Kab.Cirebon	52,68	0,16	8,36	38,63	0,17	100,00	
12.Kab.Majalengka	38,64	0,10	7,13	53,73	0,40	100,00	
13.Kab.Sumedang	58,97	0,17	1,97	38,50	0,39	100,00	
14.Kab.Indramayu	18,65	0,18	8,48	72,13	0,56	100,00	
15.Kab.Subang	29,67	0,12	7,69	62,06	0,46	100,00	
16.Kab.Purwakarta	32,85	0,24	5,33	61,38	0,20	100,00	
17.Kab.Karawang	34,81	0,23	6,31	57,64	1,01	100,00	
18.Kab.Bekasi	45,83	0,19	4,15	49,46	0,37	100,00	
19.Kab.Tangerang	53,55	0,11	5,64	40,31	0,39	100,00	
20.Kab.Serang	29,94	0,13	8,14	60,94	0,86	100,00	
21.Kod.Bogor	-	-	-	-	-	100,00	
22.Kod.Sukabumi	-	-	-	-	-	100,00	
23.Kod.Bandung	87,34	-	2,11	10,56	-	100,00	
24.Kod.Cirebon	38,28	0,38	0,95	60,39	-	100,00	
Jawa Barat	1980	5,57	-	11,98	81,40	1,04	100,00
	1990	38,44	0,15	5,24	55,76	0,41	100,00

Sumber: 1. BPS (1983a)  
2. BPS (1992)

Tabel 6.8: Persentase Rumah tangga Menurut Penggunaan Jenis Bahan Bakar untuk Penerangan per Kabupaten/ Kotamadya Tahun 1990

Daerah : Kota

Kabupaten/ Kotamadya	Listrik	Gas	Petromak	Minyak Tanah	Lain- nya	Jumlah	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	
01. Kab. Pandeglang	10,83	0,14	4,40	84,49	0,15	100,00	
02. Kab. Lebak	6,15	0,17	7,94	85,33	0,91	100,00	
03. Kab. Bogor	47,06	0,07	5,15	47,69	0,03	100,00	
04. Kab. Sukabumi	27,32	0,21	4,37	67,79	0,31	100,00	
05. Kab. Cianjur	29,36	0,18	6,03	64,04	0,39	100,00	
06. Kab. Bandung	70,86	0,21	3,55	25,11	0,30	100,00	
07. Kab. Garut	46,76	0,14	3,43	48,58	1,08	100,00	
08. Kab. Tasikmayala	29,81	0,07	3,01	66,86	0,25	100,00	
09. Kab. Ciamis	33,26	0,14	2,22	64,20	0,18	100,00	
10. Kab. Kuningan	48,45	0,16	5,14	46,13	0,02	100,00	
11. Kab. Cirebon	52,68	0,16	8,36	38,63	0,17	100,00	
12. Kab. Majalengka	38,64	0,10	7,13	53,73	0,40	100,00	
13. Kab. Sumedang	58,97	0,17	1,97	38,50	0,39	100,00	
14. Kab. Indramayu	18,65	0,18	8,48	72,13	0,56	100,00	
15. Kab. Subang	29,67	0,12	7,69	62,06	0,46	100,00	
16. Kab. Purwakarta	32,85	0,24	5,33	61,38	0,20	100,00	
17. Kab. Karawang	34,81	0,23	6,31	57,64	1,01	100,00	
18. Kab. Bekasi	45,83	0,19	4,15	49,46	0,37	100,00	
19. Kab. Tangerang	53,55	0,11	5,64	40,31	0,39	100,00	
20. Kab. Serang	29,94	0,13	8,14	60,94	0,80	100,00	
21. Kod. Bogor	-	-	-	-	-	100,00	
22. Kod. Sukabumi	-	-	-	-	-	100,00	
23. Kod. Bandung	87,34	-	2,10	10,56	-	100,00	
24. Kod. Cirebon	38,28	0,38	0,95	60,39	-	100,00	
Jawa Barat	1980	5,57	11,98	12,27	36,02	1,04	100,00
	1990	38,44	5,24	2,72	10,03	0,41	100,00

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>)  
2. BPS (1992)

harus sama dengan persentase yang digunakan untuk memasak. Hanya sekitar 0,93 persen dari jumlah rumahtangga di Jawa Barat pada tahun 1990 yang menggunakan listrik sebagai bahan bakar untuk memasak. Penggunaan listrik terbanyak untuk memasak terjadi di kota.

Jenis bahan bakar yang secara umum dikonsumsi untuk kepentingan memasak di daerah kota dan pedesaan tidak sama. Rumahtangga-rumahtangga di daerah kota cenderung memakai minyak (74,44 persen), sementara kayu merupakan bahan bakar yang umum di daerah pedesaan (77,07 persen) (Tabel 6.9 s/d 6.11).

#### 6.4. Sumber Air Minum dan Pembuangan Air

Tersedianya air bersih merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Dalam jumlah penduduk yang banyak seperti halnya di Jawa Barat bisa terjadi ketidak seimbangan antara permintaan dan persediaan akan air bersih. Di satu pihak jumlah penduduk yang besar memerlukan banyaknya kapasitas air bersih, tetapi di lain pihak jumlah penduduk demikian bisa menyebabkan rusaknya konservasi alam, termasuk air bersih.

Situasi penggunaan sumber air minum di Jawa Barat dalam periode 1980 - 1990 telah terjadi pergeseran (Tabel 6.12 s/d 6.14). Penggunaan sumur perigi telah mengalami penurunan dari 59,00 persen (1980) menjadi 47,96 persen (1990). Demikian pula di kota, dari 66,02 persen (1980) menjadi 49,96 persen (1990); dan di pedesaan dari 57,42 persen (1980) menjadi 49,96 persen (1990). Sebaliknya, persentase rumahtangga yang memakai air leding telah mengalami peningkatan, yaitu dari 3,72 persen (1980) menjadi 7,80 persen (1990). Demikian pula, di kota dari 13,19 persen (1980) menjadi 18,22 persen (1990); dan pedesaan dari 1,58 persen (1980) menjadi 2,97 persen (1990). Di samping itu, persentase penggunaan air sungai untuk keperluan minum juga mengalami penurunan.

Tabel 6.9: Persentase Rumah tangga Menurut Penggunaan Bahan Bakar Untuk Memasak per Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1990

Daerah : Kota dan Pedesaan

Kabupaten/ Kotamadya	Listrik	Minyak				Lainya	Jumlah	
		Gas	Tanah	Kayu	Arang			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
01.Kab.Pandeglang	0,28	0,43	10,04	89,10	0,08	0,07	100,00	
02.Kab.Lebak	0,35	0,19	6,99	92,04	0,31	0,06	100,00	
03.Kab.Bogor	1,01	2,41	52,33	43,81	0,03	0,42	100,00	
04.Kab.Sukabumi	0,31	0,32	21,98	77,20	0,11	0,08	100,00	
05.Kab.Cianjur	0,58	0,58	24,42	74,31	0,07	0,04	100,00	
06.Kab.Bandung	1,47	2,06	44,90	51,23	0,07	0,28	100,00	
07.Kab.Garut	0,75	0,45	22,23	75,92	0,05	0,60	100,00	
08.Kab.Tasikmayala	0,55	0,61	21,31	77,37	0,07	0,09	100,00	
09.Kab.Ciamis	0,59	0,42	8,51	90,39	0,06	0,03	100,00	
10.Kab.Kuningan	0,59	0,47	19,95	78,84	0,08	0,07	100,00	
11.Kab.Cirebon	0,83	0,70	41,47	56,66	0,02	0,07	100,00	
12.Kab.Majalengka	0,58	0,53	23,35	75,33	0,02	0,19	100,00	
13.Kab.Sumedang	0,43	0,79	21,76	76,88	0,08	0,04	100,00	
14.Kab.Indramayu	0,38	0,29	27,55	71,45	0,02	0,31	100,00	
15.Kab.Subang	0,50	0,35	27,24	71,46	0,05	0,40	100,00	
16.Kab.Purwakarta	0,93	0,72	25,03	73,09	0,03	0,20	100,00	
17.Kab.Karawang	0,75	1,07	58,07	39,53	0,04	0,53	100,00	
18.Kab.Bekasi	1,58	4,60	31,18	31,18	0,08	0,59	100,00	
19.Kab.Tangerang	1,70	5,10	65,21	27,07	0,08	0,84	100,00	
20.Kab.Serang	0,64	1,17	33,21	64,47	0,06	0,46	100,00	
21.Kod.Bogor	3,30	14,60	78,87	2,59	-	0,63	100,00	
22.Kod.Sukabumi	2,08	6,58	84,89	4,22	0,09	2,15	100,00	
23.Kod.Bandung	2,10	12,59	81,25	2,50	0,03	1,54	100,00	
24.Kod.Cirebon	1,11	12,73	75,06	10,56	0,07	0,46	100,00	
Jawa Barat	1980	0,06	0,31	32,55	66,25	0,04	0,55	100,00
	1990	0,93	2,24	38,43	57,95	0,06	0,39	100,00

Sumber: 1. BPS (1983\*)  
2. BPS (1992)

Tabel 6.10: Persentase Rumah tangga Menurut Penggunaan Bahan Bakar Untuk Memasak per Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990

Daerah : Kota

Kabupaten/ Kotamadya	Listrik	Gas	Minyak			Arang	Lainya	Jumlah
			Tanah	Kayu				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
01.Kab.Pandeglang	1,38	1,37	59,16	37,89	-	0,20	100,00	
02.Kab.Lebak	3,42	2,14	61,75	32,69	-	-	100,00	
03.Kab.Bogor	1,63	4,29	76,05	17,41	0,03	0,58	100,00	
04.Kab.Sukabumi	0,84	1,13	64,67	33,17	0,03	0,16	100,00	
05.Kab.Cianjur	1,79	2,95	74,50	20,60	0,05	0,10	100,00	
06.Kab.Bandung	1,98	4,80	73,49	19,19	0,05	0,48	100,00	
07.Kab.Garut	1,64	2,55	71,04	24,55	0,04	0,17	100,00	
08.Kab.Tasikmayala	0,90	2,79	71,05	24,74	0,08	0,44	100,00	
09.Kab.Ciamis	1,63	3,82	46,76	47,58	-	0,21	100,00	
10.Kab.Kuningan	0,99	1,55	53,89	43,28	0,21	0,07	100,00	
11.Kab.Cirebon	1,33	1,39	58,03	39,14	0,05	0,07	100,00	
12.Kab.Majalengka	1,78	1,94	64,71	31,47	-	0,31	100,00	
13.Kab.Sumedang	0,55	4,18	76,61	18,58	-	0,09	100,00	
14.Kab.Indramayu	0,77	1,16	62,76	34,97	-	0,34	100,00	
15.Kab.Subang	0,99	1,33	65,69	31,44	-	0,55	100,00	
16.Kab.Purwakarta	2,57	2,50	72,55	21,91	-	0,47	100,00	
17.Kab.Karawang	0,83	1,87	80,12	16,90	-	0,28	100,00	
18.Kab.Bekasi	2,21	8,32	78,99	9,60	0,09	0,79	100,00	
19.Kab.Tangerang	2,09	7,93	77,46	11,18	0,09	1,24	100,00	
20.Kab.Serang	1,66	3,76	75,23	17,63	-	1,72	100,00	
21.Kod.Bogor	3,03	14,60	78,88	2,59	-	0,63	100,00	
22.Kod.Sukabumi	2,08	6,58	84,89	4,22	0,09	2,15	100,00	
23.Kod.Bandung	2,13	12,78	81,43	2,16	0,03	1,47	100,00	
24.Kod.Cirebon	1,14	13,13	77,75	7,41	0,09	0,48	100,00	
Jawa Barat	1980	0,93	1,12	80,03	17,43	0,04	0,46	100,00
	1990	1,78	6,32	74,44	16,65	0,05	0,75	100,00

Sumber: 1. BPS (1983a)  
2. BPS (1992)



**Tabel 6.11: Persentase Rumah tangga Menurut Penggunaan Bahan Bakar Untuk Memasak per Kabupaten/Kotamadya Tahun 1990**

Daerah : Pedesaan

Kabupaten/ Kotamadya	Listrik	Minyak				Lainya	Jumlah	
		Gas	Tanah	Kayu	Arang			
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	
01.Kab.Pandeglang	0,20	0,37	6,79	92,49	0,09	0,06	100,00	
02.Kab.Lebak	0,14	0,06	3,40	95,93	0,13	0,23	100,00	
03.Kab.Bogor	0,37	0,47	27,97	70,90	0,03	0,25	100,00	
04.Kab.Sukabumi	0,21	0,17	13,79	85,64	0,12	0,07	100,00	
05.Kab.Cianjur	0,40	0,23	17,00	82,28	0,07	0,03	100,00	
06.Kab.Bandung	1,15	0,38	27,46	70,77	0,08	0,16	100,00	
07.Kab.Garut	0,61	0,11	14,26	84,31	0,06	0,67	100,00	
08.Kab.Tasikmalaya	0,48	0,13	10,25	89,07	0,06	0,01	100,00	
09.Kab.Ciamis	0,50	0,13	5,25	94,04	0,06	0,02	100,00	
10.Kab.Kuningan	0,51	0,27	13,61	8,55	0,05	0,08	100,00	
11.Kab.Cirebon	0,56	0,31	32,66	66,39	0,01	0,07	100,00	
12.Kab.Majalengka	0,40	0,40	15,52	83,63	0,17	0,17	100,00	
13.Kab.Sumedang	0,42	0,34	14,52	84,59	0,10	0,13	100,00	
14.Kab.Indramayu	0,32	0,14	22,00	77,20	0,03	0,30	100,00	
15.Kab.Subang	0,43	0,21	21,98	76,94	0,05	0,38	100,00	
16.Kab.Purwakarta	0,52	0,28	13,25	85,78	0,04	0,14	100,00	
17.Kab.Karawang	0,73	0,87	52,46	45,29	0,05	0,59	100,00	
18.Kab.Bekasi	0,87	0,38	42,61	55,68	0,08	0,37	100,00	
19.Kab.Tangerang	1,19	1,49	49,67	47,23	0,07	0,37	100,00	
20.Kab.Serang	0,41	0,61	24,10	74,63	0,07	0,18	100,00	
21.Kod.Bogor	-	-	-	-	-	-	-	
22.Kod.Sukabumi	-	-	-	-	-	-	-	
23.Kod.Bandung	0,42	0,42	70,03	23,22	-	5,91	100,00	
24.Kod.Cirebon	0,43	3,09	9,26	87,08	-	-	100,00	
Jawa Barat	1980	0,07	0,13	21,92	77,27	0,04	0,57	100,0
	1990	0,54	0,35	21,75	77,07	0,06	0,22	100,00

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>)  
2. BPS (1992)

Tempat pembuangan air besar yang sehat merupakan pelengkap fasilitas rumahtangga yang sehat pula. Nampaknya jenis fasilitas ini bagi rumahtangga belum begitu menggembirakan. Sekitar 17,32 persen dari seluruh rumahtangga di Jawa Barat pada tahun 1990 memiliki kakus sendiri dengan tangki septik, 8,77 persen menggunakan kakus sendiri tapi tanpa tangki septik. Lebih dari sepertiganya, rumahtangga di Jawa Barat menggunakan kakus bersama/umum sebagai tempat pembuangan air besar. Lebih dari sepertiga jumlah rumahtangga di kota sudah menggunakan kakus sendiri dengan tangki septik, sementara di desa baru mencapai 8,29 persen. Kakus bersama/umum nampaknya lebih populer di desa (35,63 persen) daripada di kota (29,83 persen).

#### 6.5. Pemilikan Barang Rumahtangga dan Lahan Pertanian

Pemilikan barang rumahtangga seperti buffet, kompor, sepeda, radio kaset, televisi, motor, dan mobil merupakan pelengkap yang dapat memberikan kenyamanan dan mencirikan status sosial dari penghuninya. Dari data SP'90 terlihat adanya kenaikan persentase rumahtangga yang memiliki barang-barang tersebut. Tercatat ada 8,98 persen dari seluruh rumahtangga yang memiliki sepeda motor dan sekitar 3,41 persen memiliki mobil.

Di samping itu, penguasaan lahan pertanian per rumahtangga di pedesaan sering dikaitkan dengan tingkat ekonomi rumahtangga yang bersangkutan. Berdasarkan data Sensus Pertanian 1983, mayoritas rumahtangga di pedesaan memiliki luas tanah pertanian yang sangat kecil yaitu untuk tanah sawah sekitar 0,36 Ha, sawah perpengairan 0,37 Ha dan tanah kering sekitar 0,54 Ha. Kondisi demikian hampir merata di seluruh kabupaten di Jawa Barat. Sejalan dengan perkembangan perumahan dan kawasan industri, lahan pertanian yang dikuasai oleh rumahtangga akan semakin berkurang apabila tidak diimbangi dengan pencetakan sawah baru. Adanya pembagiam tanah waris juga akan memecah tanah tersebut menjadi kepingan-kepingan lahan yang lebih kecil.

Tabel 6.12: Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum per Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1990

Daerah : Kota + Pedesaan

Kabupaten/ Kotamadya	Leding	Pompa Air	Sumur Perigi	Mata Air	Air Sungai	Air Hujan	Lain- nya	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
01. Kab. Pandeglang	6,68	3,28	48,12	22,79	7,78	0,52	0,84	100,00
02. Kab. Lebak	3,07	7,63	39,98	28,89	19,19	0,01	1,25	100,00
03. Kab. Bogor	6,61	16,13	54,09	21,62	1,21	0,02	0,31	100,00
04. Kab. Sukabumi	2,82	6,69	45,35	39,81	4,75	0,01	0,57	100,00
05. Kab. Cianjur	3,59	8,50	47,42	33,60	6,25	0,01	0,63	100,00
06. Kab. Bandung	5,79	11,94	51,55	29,06	0,98	0,02	0,66	100,00
07. Kab. Garut	5,02	3,80	42,93	38,82	8,42	0,03	0,98	100,00
08. Kab. Tasikmayala	3,91	5,88	50,57	35,17	2,23	0,87	0,37	100,00
09. Kab. Ciamis	3,18	3,55	61,36	30,22	0,95	0,02	0,79	100,00
10. Kab. Kuningan	5,13	9,28	58,07	27,10	0,18	0,01	0,22	100,00
11. Kab. Cirebon	9,95	15,20	68,15	4,92	0,81	0,03	0,95	100,00
12. Kab. Majalengka	3,54	13,50	55,27	26,59	0,94	0,02	0,17	100,00
13. Kab. Sumedang	4,92	3,26	42,61	46,96	1,92	-	0,32	100,00
14. Kab. Indramayu	6,84	40,29	40,91	0,99	8,15	1,91	0,91	100,00
15. Kab. Subang	4,27	34,85	44,40	15,07	0,91	0,07	0,43	100,00
16. Kab. Purwakarta	8,47	4,15	60,73	25,33	1,25	-	0,06	100,00
17. Kab. Karawang	4,18	41,12	49,02	1,38	3,44	0,57	0,29	100,00
18. Kab. Bekasi	5,58	56,08	33,53	0,90	2,51	0,26	0,12	100,00
19. Kab. Tangerang	7,10	46,50	41,84	0,89	1,88	0,54	1,24	100,00
20. Kab. Serang	6,95	10,11	53,61	13,80	12,36	2,08	1,09	100,00
21. Kod. Bogor	55,90	12,25	22,74	8,27	0,37	0,03	0,44	100,00
22. Kod. Sukabumi	25,43	41,44	30,13	2,19	0,36	0,06	0,39	100,00
23. Kod. Bandung	34,04	28,88	34,41	1,62	0,03	0,01	1,02	100,00
24. Kod. Cirebon	78,78	6,37	14,60	0,11	0,05	-	0,08	100,00
Jawa Barat 1980	3,72	5,52	59,00	23,67	6,18	0,09	1,82	100,00
1990	7,80	19,41	47,96	20,35	2,92	0,31	0,69	100,00

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>)  
2. BPS (1992)

Tabel 6.13: Persentase Rumah tangga Sumber Air Minum per Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1990

Daerah : Kota

Kabupaten/ Kotamadya	Leding	Pompa Air	Sumur Perigi	Mata Air	Air Sungai	Air Hujan	Lain- nya	Jumlah	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	
01. Kab. Pandeglang	52,46	6,12	24,07	16,55	0,80	-	-	100,00	
02. Kab. Lebak	30,36	50,83	13,26	1,27	3,83	-	0,43	100,00	
03. Kab. Bogor	11,24	24,75	54,31	8,37	0,81	0,04	0,47	100,00	
04. Kab. Sukabumi	10,22	21,72	52,67	13,89	1,30	-	0,22	100,00	
05. Kab. Cianjur	12,66	26,47	53,56	5,82	1,23	-	0,26	100,00	
06. Kab. Bandung	9,04	23,19	54,96	11,58	0,28	0,01	0,92	100,00	
07. Kab. Garut	17,34	9,48	66,83	5,88	0,12	0,08	0,26	100,00	
08. Kab. Tasikmayala	13,39	15,53	66,98	3,61	0,11	-	0,38	100,00	
09. Kab. Ciarnis	14,23	6,23	75,85	3,40	0,07	-	0,21	100,00	
10. Kab. Kuningan	13,28	11,59	51,63	22,80	0,27	-	0,42	100,00	
11. Kab. Cirebon	9,01	14,37	74,82	1,42	0,11	-	0,27	100,00	
12. Kab. Majalengka	12,19	20,50	63,30	2,93	0,15	0,05	0,87	100,00	
13. Kab. Sumedang	15,32	13,67	64,53	6,29	-	-	0,18	100,00	
14. Kab. Indramayu	34,72	15,82	37,55	0,14	10,89	0,14	0,73	100,00	
15. Kab. Subang	11,08	28,98	48,37	10,96	0,44	-	0,17	100,00	
16. Kab. Purwakarta	27,46	8,57	63,26	0,55	-	-	0,16	100,00	
17. Kab. Karawang	13,95	46,05	39,22	0,08	0,39	-	0,32	100,00	
18. Kab. Bekasi	8,30	73,69	15,81	0,54	0,01	0,01	1,63	100,00	
19. Kab. Tangerang	10,29	59,59	28,84	0,10	0,02	0,07	1,09	100,00	
20. Kab. Serang	21,73	20,38	51,29	4,38	1,07	0,26	0,89	100,00	
21. Kod. Bogor	55,90	12,25	22,74	8,27	0,37	0,03	0,44	100,00	
22. Kod. Sukabumi	25,43	41,44	30,13	2,19	0,36	0,06	0,39	100,00	
23. Kod. Bandung	33,89	28,78	34,66	1,62	0,03	0,01	1,02	100,00	
24. Kod. Cirebon	81,91	6,09	11,87	-	0,04	-	0,09	100,00	
Jawa Barat	1980	13,19	11,77	66,02	5,97	1,10	0,02	1,94	100,00
	1990	18,22	32,14	43,66	4,66	0,53	0,03	0,76	100,00

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>)  
2. BPS (1992)

Tabel 6.14: Persentase Rumah tangga Menurut Sumber Air Minum per Kabupaten/Kotamadya dan Sumber Air Minum, Tahun 1990

Daerah : Pedesaan

Kabupaten/ Kotamadya	Leding	Pompa Air	Sumur Perigi	Mata Air	Air Sungai	Air Hujan	Lain- nya	Jumlah	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	
01. Kab. Pandeglang	3,65	3,09	49,70	33,86	8,24	0,56	0,90	100,00	
02. Kab. Lebak	1,28	4,80	41,70	30,68	20,20	0,01	1,30	100,00	
03. Kab. Bogor	1,85	7,28	53,85	35,23	1,63	0,01	0,15	100,00	
04. Kab. Sukabumi	1,40	3,80	43,90	44,78	5,41	0,01	0,64	100,00	
05. Kab. Cianjur	2,24	5,83	46,51	27,72	6,99	0,02	0,68	100,00	
06. Kab. Bandung	3,81	5,06	49,47	39,72	1,41	0,03	0,50	100,00	
07. Kab. Garut	3,01	2,87	39,02	44,20	9,78	0,02	1,10	100,00	
08. Kab. Tasikmalaya	1,81	2,73	46,92	42,18	3,92	1,07	0,37	100,00	
09. Kab. Ciamis	2,23	3,32	60,12	32,50	0,97	0,02	0,84	100,00	
10. Kab. Kuningan	3,61	8,85	59,27	27,90	0,16	0,01	0,19	100,00	
11. Kab. Cirebon	10,46	15,66	64,45	6,86	1,20	0,05	1,32	100,00	
12. Kab. Majalengka	1,90	12,13	53,76	31,06	1,09	0,02	0,04	100,00	
13. Kab. Sumedang	3,55	1,88	39,71	52,34	2,17	-	0,35	100,00	
14. Kab. Indramayu	2,44	44,15	41,45	1,12	7,72	2,18	0,49	100,00	
15. Kab. Subang	3,34	35,65	43,86	15,63	0,97	0,08	0,47	100,00	
16. Kab. Purwakarta	3,77	3,06	60,10	31,48	1,56	-	0,04	100,00	
17. Kab. Karawang	1,69	39,86	51,51	1,72	4,22	0,72	0,82	100,00	
18. Kab. Bekasi	2,49	36,06	53,69	1,32	5,35	0,54	0,55	100,00	
19. Kab. Tangerang	3,06	29,90	58,34	1,88	4,24	1,14	1,43	100,00	
20. Kab. Serang	3,74	7,89	54,11	15,84	14,81	2,47	1,14	100,00	
21. Kod. Bogor	-	-	-	-	-	-	-	-	
22. Kod. Sukabumi	-	-	-	-	-	-	-	-	
23. Kod. Bandung	43,47	35,03	18,98	1,68	-	-	0,84	100,00	
24. Kod. Cirebon	2,71	13,15	81,01	2,85	0,28	-	-	100,00	
Jawa Barat	1980	1,58	4,11	57,42	27,65	7,32	0,11	1,80	100,00
	1990	2,97	13,51	49,96	27,62	4,84	0,44	0,66	100,00

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>)  
2. BPS (1992)

Tabel 6.15: Persentase Rumah tangga Menurut Tempat Buang Air Besar per Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1990

Daerah : Kota + Pedesaan

Kabupaten/ Kotamadya	Kakus Sendiri Dengan Tangki Septik	Kakus Sendiri Tanpa Tangki Septik	Kakus Bersama/ Umum	lainnya	Jumlah	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
01.Kab.Pandeglang	7,84	3,67	2,01	68,57	100,00	
02.Kab.Lebak	7,56	4,36	20,58	67,49	100,00	
03.Kab.Bogor	24,63	9,24	30,30	35,83	100,00	
04.Kab.Sukabumi	7,61	5,63	37,13	49,64	100,00	
05.Kab.Cianjur	6,05	9,68	50,36	33,90	100,00	
06.Kab.Bandung	18,95	9,35	50,34	21,36	100,00	
07.Kab.Garut	6,53	9,86	56,18	27,43	100,00	
08.Kab.Tasikmayala	6,79	9,94	46,32	36,95	100,00	
09.Kab.Ciamis	9,73	6,58	28,64	55,05	100,00	
10.Kab.Kuningan	22,25	4,04	28,16	45,55	100,00	
11.Kab.Cirebon	16,79	5,22	20,86	57,13	100,00	
12.Kab.Majalengka	14,61	3,99	25,41	55,99	100,00	
13.Kab.Sumedang	16,21	4,18	42,07	37,54	100,00	
14.Kab.Indramayu	16,48	5,09	16,59	61,84	100,00	
15.Kab.Subang	10,72	5,74	18,70	69,72	100,00	
16.Kab.Purwakarta	18,49	6,59	50,60	24,32	100,00	
17.Kab.Karawang	11,92	3,23	27,86	56,99	100,00	
18.Kab.Bekasi	33,40	7,41	28,24	30,95	100,00	
19.Kab.Tangerang	29,50	8,78	34,75	27,07	100,00	
20.Kab.Serang	41,94	3,18	14,34	67,54	100,00	
21.Kod.Bogor	55,05	10,36	18,69	17,73	100,00	
22.Kod.Sukabumi	28,88	33,78	35,94	1,40	100,00	
23.Kod.Bandung	26,81	39,29	31,49	2,41	100,00	
24.Kod.Cirebon	63,43	9,95	18,83	7,80	100,00	
Jawa Barat	1980	6,77	7,30	85,93	-	100,00
	1990	17,32	8,77	33,79	40,12	100,00

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>)

2. BPS (1992)

Tabel 6.16: Persentase Rumahtangga Menurut Tempat Buang Air Besar per Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1990

Daerah : Kota

Kabupaten/ Kotamadya	Kakus Sendiri Dengan Tangki Septik	Kakus Sendiri Tanpa Tangki Septik	Kakus Bersama/ Umum	Lainnya	Jumlah
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
01.Kab.Pandeglang	24,65	17,01	33,01	25,32	100,00
02.Kab.Lebak	45,48	12,60	22,65	19,28	100,00
03.Kab.Bogor	41,54	10,57	28,15	19,75	100,00
04.Kab.Sukabumi	23,25	14,04	44,23	18,47	100,00
05.Kab.Cianjur	13,80	36,82	32,15	17,24	100,00
06.Kab.Bandung	33,62	16,36	40,63	9,40	100,00
07.Kab.Garut	18,18	27,50	41,54	12,78	100,00
08.Kab.Tasikmalaya	20,49	30,54	26,88	22,09	100,00
09.Kab.Ciamis	45,60	20,74	37,35	34,53	100,00
10.Kab.Kuningan	38,34	9,53	29,83	22,30	100,00
11.Kab.Cirebon	27,42	7,84	20,47	44,27	100,00
12.Kab.Majalengka	38,00	7,31	14,01	40,71	100,00
13.Kab.Sumedang	47,29	9,18	33,87	9,65	100,00
14.Kab.Indramayu	36,78	4,26	10,11	48,85	100,00
15.Kab.Subang	26,71	12,61	27,32	33,96	100,00
16.Kab.Purwakarta	54,36	13,20	29,09	3,35	100,00
17.Kab.Karawang	34,38	6,37	30,96	28,29	100,00
18.Kab.Bekasi	55,97	8,96	24,04	11,03	100,00
19.Kab.Tangerang	42,07	9,73	33,87	14,33	100,00
20.Kab.Serang	44,35	5,54	22,03	28,07	100,00
21.Kod.Bogor	55,05	10,36	18,69	15,89	100,00
22.Kod.Sukabumi	28,88	33,78	35,94	1,40	100,00
23.Kod.Bandung	26,90	39,65	31,18	2,27	100,00
24.Kod.Cirebon	65,29	10,04	18,58	6,10	100,00
Jawa Barat 1980	18,80	19,15	62,05	-	100,00
1990	36,80	17,17	29,83	16,20	100,00

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>)  
2. BPS (1992)

Tabel 6.17: Persentase Rumahtangga Menurut Buang Air Besar per Kabupaten/Kotamadya. Tahun 1990

Daerah : Pedesaan

Kabupaten/ Kotamadya	Kakus Sendiri		Kakus Bersama/ Umum	lainnya	Jumlah	
	Dengan Tangki Septik	Tanpa Tangki Septik				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	
01.Kab.Pandeglang	6,72	29,79	19,06	71,42	100,00	
02.Kab.Lebak	5,07	3,82	20,45	70,66	100,00	
03.Kab.Bogor	7,27	7,89	32,51	52,34	100,00	
04.Kab.Sukabumi	4,61	4,01	35,77	55,61	100,00	
05.Kab.Cianjur	4,90	5,66	53,06	36,38	100,00	
06.Kab.Bandung	10,00	5,08	56,26	28,66	100,00	
07.Kab.Garut	4,62	6,98	58,57	29,82	100,00	
08.Kab.Tasikmayala	3,74	5,35	50,65	40,26	100,00	
09.Kab.Ciamis	7,75	5,87	28,77	57,61	100,00	
10.Kab.Kuningan	19,24	3,02	27,85	49,89	100,00	
11.Kab.Cirebon	10,90	3,77	21,08	64,26	100,00	
12.Kab.Majalengka	10,18	3,67	27,57	58,88	100,00	
13.Kab.Sumedang	12,10	3,52	43,16	41,22	100,00	
14.Kab.Indramayu	13,28	5,23	17,61	63,89	100,00	
15.Kab.Subang	8,53	3,42	27,17	60,88	100,00	
16.Kab.Purwakarta	9,60	4,95	55,93	29,52	100,00	
17.Kab.Karawang	6,20	2,43	27,07	64,30	100,00	
18.Kab.Bekasi	7,75	5,64	33,02	53,60	100,00	
19.Kab.Tangerang	13,54	7,34	35,88	43,24	100,00	
20.Kab.Serang	8,56	2,67	18,68	76,20	100,00	
21.Kod.Bogor	-	-	-	-	-	
22.Kod.Sukabumi	-	-	-	-	-	
23.Kod.Bandung	21,12	16,86	50,62	11,40	100,00	
24.Kod.Cirebon	18,04	7,79	24,79	49,38	100,00	
Jawa Barat	1980	4,06	4,63	91,31	-	100,00
	1990	8,29	4,88	35,63	51,20	100,00

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>)  
2. BPS (1992)



Tabel 6.18: Persentase Rumah tangga Menurut Barang Rumah tangga yang Dimiliki per Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1990

Daerah : Kota + Pedesaan

Kabupaten/ Kotamadya	Buffet	Kompore	Sepeda	Radio Kaset	Televisi	Sepeda Motor	Mobil/ Kapal
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
01.Kab.Pandeglang	64,31	21,52	15,20	52,78	10,03	5,80	1,73
02.Kab.Lebak	70,06	17,16	11,53	46,73	8,99	4,64	0,81
03.Kab.Bogor	74,11	70,08	19,01	60,49	35,42	8,42	4,87
04.Kab.Sukabumi	72,19	36,01	5,03	46,88	15,16	3,14	1,16
05.Kab.Cianjur	70,17	39,93	5,30	53,31	14,00	3,47	1,35
06.Kab.Bandung	79,90	64,31	12,74	64,74	35,61	8,14	3,88
07.Kab.Garut	75,55	40,15	7,13	61,85	20,97	4,07	1,41
08.Kab.Tasikmayala	77,04	38,26	11,96	58,43	15,34	6,33	1,84
09.Kab.Ciamis	76,64	24,50	25,07	61,00	18,82	7,80	1,57
10.Kab.Kuningan	76,40	39,66	14,15	68,56	26,56	6,95	1,78
11.Kab.Cirebon	68,29	55,94	61,81	62,89	23,33	8,71	1,69
12.Kab.Majalengka	75,50	45,19	36,34	64,69	19,93	6,83	1,69
13.Kab.Sumedang	86,61	44,22	8,88	68,46	26,48	5,32	2,01
14.Kab.Indramayu	62,93	50,23	71,06	56,29	13,40	5,76	1,18
15.Kab.Subang	75,69	44,07	40,99	58,22	16,19	7,47	1,24
16.Kab.Purwakarta	74,15	37,85	12,56	50,30	20,42	5,28	20,04
17.Kab.Karawang	70,36	74,71	54,59	61,74	20,09	9,33	2,54
18.Kab.Bekasi	69,70	80,96	47,06	69,17	41,62	11,43	6,49
19.Kab.Tangerang	74,76	85,51	48,56	69,93	42,38	16,38	6,86
20.Kab.Serang	67,38	49,94	34,95	59,76	22,92	10,64	2,37
21.Kod.Bogor	78,17	98,53	17,17	79,22	66,86	10,06	10,96
22.Kod.Sukabumi	84,45	95,70	13,40	71,84	61,50	10,40	6,07
23.Kod.Bandung	81,53	97,52	23,35	76,44	65,36	23,30	12,78
24.Kod.Cirebon	62,37	92,12	44,11	64,66	57,53	21,48	8,52
Jawa Barat 1980	56,06	47,04	19,36	41,90	-	-	-
1990	73,88	55,89	27,39	61,65	27,78	8,98	3,41

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>)  
2. BPS (1992)

Tabel 6.19: Persentase Rumah tangga Menurut Barang Rumah tangga yang dimiliki per Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1990

Daerah : Kota

Kabupaten/ Kotamadya	Buffet	Kompur	Sepeda	Radio Kaset	Televisi	Sepeda Motor	Mobil/ Kapal
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
01.Kab.Pandeglang	62,25	69,94	20,82	65,63	41,45	14,87	10,13
02.Kab.Lebak	63,57	77,09	25,65	65,77	46,15	12,59	2,96
03.Kab.Bogor	73,97	90,43	24,46	71,44	51,98	10,75	6,36
04.Kab.Sukabumi	77,93	81,28	9,98	60,02	39,64	5,12	3,35
05.Kab.Cianjur	77,17	90,07	10,70	67,44	45,65	7,02	4,08
06.Kab.Bandung	82,43	89,46	18,70	72,19	51,89	13,91	6,93
07.Kab.Garut	81,35	86,49	16,44	74,82	49,88	9,17	4,60
08.Kab.Tasikmayala	84,04	84,79	30,67	70,84	48,20	14,76	5,57
09.Kab.Ciamis	82,67	68,95	29,92	65,36	44,65	12,31	5,45
10.Kab.Kuningan	79,44	82,10	16,80	75,63	50,36	10,99	4,23
11.Kab.Cirebon	73,16	73,66	62,48	69,14	34,73	11,82	3,00
12.Kab.Majalengka	79,83	88,29	45,83	72,98	43,18	11,75	3,95
13.Kab.Sumedang	90,15	89,34	20,59	79,98	56,39	12,19	4,93
14.Kab.Indramayu	58,44	75,71	55,15	56,45	24,70	8,23	2,76
15.Kab.Subang	78,44	78,42	33,15	64,01	35,75	11,97	3,30
16.Kab.Purwakarta	84,39	91,10	19,04	71,76	50,78	9,29	5,15
17.Kab.Karawang	69,72	88,21	42,79	18,91	38,44	13,77	4,83
18.Kab.Bekasi	75,65	94,56	45,43	77,09	59,78	18,86	10,76
19.Kab.Tangerang	74,68	94,61	45,77	75,12	54,10	18,11	9,83
20.Kab.Serang	67,96	87,87	35,69	71,19	50,81	15,14	5,23
21.Kod.Bogor	78,17	98,53	17,17	79,22	66,86	10,06	10,96
22.Kod.Sukabumi	84,45	95,76	13,40	71,84	61,50	10,40	6,07
23.Kod.Bandung	81,80	97,77	23,49	76,71	65,92	23,54	12,95
24.Kod.Cirebon	62,66	95,01	44,57	65,68	59,33	22,05	8,76
Jawa Barat 1980	66,22	87,50	18,94	57,05	30,86	-	-
1990	76,98	90,22	31,33	72,51	52,87	15,18	7,83

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>)

2. BPS (1992)

Tabel 6.20: Persentase Rumahtangga Menurut Barang Rumahtangga yang Dimiliki per Kabupaten/Kotamadya, Tahun 1990  
Daerah : Pedesaan

Kabupaten/ Kotamadya	Buffet	Kompur	Sepeda	Radio Kaset	Televisi	Sepeda Motor	Mobil/ Kapai
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
01.Kab.Pandeglang	64,44	18,31	14,83	51,93	7,95	5,20	1,18
02.Kab.Lebak	70,48	13,22	10,61	45,48	6,55	4,12	0,69
03.Kab.Bogor	74,26	49,17	13,42	49,25	18,42	6,03	1,71
04.Kab.Sukabumi	71,09	27,32	4,08	44,36	10,46	2,75	0,73
05.Kab.Cianjur	69,13	32,48	4,50	51,21	9,30	2,94	0,94
06.Kab.Bandung	78,35	48,96	9,10	60,19	25,68	4,62	2,02
07.Kab.Garut	74,60	32,58	5,61	59,73	16,25	3,24	0,89
08.Kab.Tasikmayala	75,48	27,91	7,81	55,67	12,93	4,45	1,01
09.Kab.Ciamis	76,13	20,71	24,66	60,63	16,62	7,42	1,24
10.Kab.Kuningan	75,83	31,75	13,66	67,24	22,12	6,20	1,32
11.Kab.Cirebon	65,59	46,11	61,50	59,43	17,02	6,08	0,96
12.Kab.Majalengka	74,68	37,04	34,55	63,12	15,53	5,90	1,26
13.Kab.Sumedang	86,15	38,25	7,33	66,95	22,53	4,41	1,63
14.Kab.Indramayu	63,64	46,21	73,57	56,27	11,15	5,37	0,93
15.Kab.Subang	75,32	39,77	42,06	57,43	13,51	6,85	0,95
16.Kab.Purwakarta	71,61	24,65	10,95	44,98	12,89	4,29	1,27
17.Kab.Karawang	70,52	71,27	57,59	59,91	15,11	8,20	1,96
18.Kab.Bekasi	62,94	65,50	48,92	60,16	20,96	13,95	1,63
19.Kab.Tangerang	74,86	73,96	52,10	63,34	27,51	14,17	3,10
20.Kab.Serang	67,26	41,71	34,79	57,21	16,87	9,66	1,75
21.Kod.Bogor	-	-	-	-	-	-	-
22.Kod.Sukabumi	-	-	-	-	-	-	-
23.Kod.Bandung	64,54	81,85	14,77	59,48	30,79	8,02	2,12
24.Kod.Cirebon	55,22	21,70	36,76	39,70	13,87	7,45	2,71
Jawa Barat 1980	53,77	37,93	19,45	38,48	4,47	-	-
1990	72,44	-	25,57	56,61	16,16	6,11	1,36

Sumber: 1. BPS (1983<sup>a</sup>)

2. BPS (1992)

Tabel 6.21: Rata-rata Tanah Pertanian yang dikuasai per Rumahtangga Menurut Kabupaten/Kotamadya daerah Pedesaan Tahun 1983

Kabupaten/ Kotamadya	Sawah (ha)	Sawah Berpengairan (Ha)	Tanah Kering (Ha)
[1]	[2]	[3]	[4]
01. Kab. Pandeglang	0,58	0,39	1,04
02. Kab. Lebak	0,39	0,39	1,35
03. Kab. Bogor	0,32	0,30	0,34
04. Kab. Sukabumi	0,25	0,23	0,85
05. Kab. Cianjur	0,29	0,28	0,62
06. Kab. Bandung	0,26	0,25	0,37
07. Kab. Garut	0,23	0,20	0,39
08. Kab. Tasikmayala	0,21	0,21	0,61
09. Kab. Ciamis	0,21	0,19	0,39
10. Kab. Kuningan	0,27	0,23	0,31
11. Kab. Cirebon	0,55	0,56	0,32
12. Kab. Majalengka	0,33	0,30	0,38
13. Kab. Sumedang	0,25	0,21	0,37
14. Kab. Indramayu	0,68	0,66	0,51
15. Kab. Subang	0,46	0,56	0,32
16. Kab. Purwakarta	0,29	0,25	0,50
17. Kab. Karawang	0,78	0,79	0,44
18. Kab. Bekasi	0,80	0,93	0,55
19. Kab. Tangerang	0,46	0,48	0,54
20. Kab. Serang	0,43	0,46	0,62
21. Kod. Bogor	-	-	-
22. Kod. Sukabumi	-	-	-
23. Kod. Bandung	-	-	-
24. Kod. Cirebon	-	-	-
Jawa Barat	0,36	0,37	0,54

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Jawa Barat (1985)

## BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN KEBIJAKSANAAN

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya maka dapat diberikan beberapa kesimpulan dan saran kebijaksanaan yang kiranya dapat bermanfaat bagi para konsumen data khususnya Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat.

### 7.1. Kesimpulan

1. Propinsi Jawa Barat memiliki laju pertumbuhan penduduk terbesar di Indonesia. Tingginya laju pertumbuhan tersebut dipengaruhi terutama oleh meningkatnya jumlah penduduk dikawasan Botabek (Kabupaten/Kotamadya Bogor, Kabupten Tangerang dan Kabupaten Bekasi).
2. Komponen-komponen kependudukan belum sepenuhnya menunjang pengendalian jumlah penduduk di Jawa Barat. Angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian anak relatif masih tinggi. Demikian pula dengan besarnya migrasi masuk yang tidak seimbang.
3. Walaupun jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian senantiasa meningkat dari tahun ke tahun, namun proporsi penduduk yang bekerja di sektor ini cenderung semakin menurun. Penurunan ini diimbangi oleh peningkatan proporsi disektor industri pengolahan.
4. Aspek lain dari tenaga kerja di Jawa Barat yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan pekerja.
5. Dalam bidang pendidikan, selain masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan juga angka buta huruf masih relatif tinggi.
6. Dalam hal struktur umur, penduduk Jawa Barat masih tergolong kepada penduduk umur muda. Hal ini akan berpengaruh pada angka beban ketergantungan penduduk.

7. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada di atas laju pertumbuhan nasional. Demikian pula dengan pendapatan per kapita.
8. Secara fisik, kualitas sumberdaya manusia di Jawa Barat masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini diukur oleh Indek Mutu Hidup.
9. Terdapat peningkatan dalam hal fasilitas rumahtangga, seperti pemilikan televisi, sepeda motor, mobil, dan pemakaian listrik.
10. Kondisi lingkungan rumahtangga yang sehat, seperti sumber air minum, sumber pembuangan air besar, dan tempat pembuangan sampah masih perlu ditingkatkan.

#### **7.2. Saran Kebijakan**

1. Sebagai salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia di Jawa Barat penundaan usia perkawinan pertama merupakan faktor yang harus mendapatkan perhatian.
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas dari para pelaksana registrasi penduduk pada setiap jenjang administrasi.
3. Peningkatan pelaksanaan program Transmigrasi, terutama yang menyangkut transmigrasi Swakarsa.
4. Perlu diadakan sistim magang kerja di perusahaan-perusahaan industri sebagai upaya diadakan peningkatan keterampilan penduduk sebelum memasuki peluang bekerja terutama yang berasal dari tenaga kerja lokal. Dengan demikian perusahaan industri di Jawa Barat tidak perlu mendatangkan tenaga kerja dari luar Jawa Barat.
5. Meningkatkan program imunisasi dan program pemeriksaan ibu hamil dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan menaikkan angka harapan hidup. Dengan perkataan lain, pemanfaatan Puskesmas harus lebih ditingkatkan.

6. Peningkatan program perbaikan kampung, pengembangan kawasan terpadu, program pembangunan prasarana kota terpadu, peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemugaran perumahan dan lingkungan desa secara terpadu dan pembangunan rumah percontohan dengan mengutamakan pada daerah kumuh dan kritis.
10. Memperbanyak sarana dan prasarana pendidikan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu. SMTP dan SMTA.
11. Pengupayaan pemerataan listrik masuk desa.
12. Perlunya pemerataan penyediaan prasarana air bersih, terutama di daerah pedesaan dan daerah perkotaan yang lingkungannya dianggap kumuh.

## DAFTAR PUSTAKA

ANANTA, Aris

- 1985 *Mutu Modal Manusia, Suatu Analisis Pendahuluan*. Jakarta : LDFEUI dan BPS

BIRO PUSAT STATISTIK (BPS)

- 1974 *Penduduk Jawa Barat*. Sensus Penduduk 1971. Jakarta
- 1983<sup>a</sup> *Penduduk Jawa Barat : Serie S Nomor 13*. Hasil Sensus Penduduk 1980. Jakarta
- 1983<sup>b</sup> *Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 1981*. Jakarta
- 1987 *Migrasi Penduduk di Indonesia*. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus Tahun 1985. Jakarta
- 1990 *Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 1989*. Jakarta
- 1991<sup>a</sup> *Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 1990*. Jakarta
- 1991<sup>b</sup> *Penduduk Indonesia*. Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990. Jakarta
- 1992 *Penduduk Jawa Barat : Serie S Nomor 2.10*. Hasil Sensus Penduduk Tahun 1990. Jakarta

DAROESMAN, Ruth

- 1972 *An Economic Survey of West Java*. Bulletin of Indonesian Economic Studies, vol. 8 No. 2

DEPNAKER, DEPARTEMEN TRANSMIGRASI DAN BPS

- 1982 *Laporan Penelitian Pengukuran Tingkat Pengangguran dan Setengah Pengangguran*. Jakarta



KANTOR STATISTIK PROPINSI JAWA BARAT

- 1985      *Jawa Barat Dalam Angka 1984.* Bandung  
1988      *Jawa Barat Dalam Angka 1987.* Bandung  
1991<sup>a</sup>     *Jawa Barat Dalam Angka 1990.* Bandung  
1991<sup>b</sup>     *Registrasi Penduduk Tahun 1990.* Bandung

KANTOR STATISTIK PROPINSI JAWA BARAT DAN BAPPEDA TK.I JAWA BARAT

- 1985      *Penelitian Migrasi di Jawa Barat.* Bandung  
1992<sup>a</sup>     *Analisa Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Pendapatan dan Kemiskinan di Jawa Barat Tahun 1990.* Bandung  
1992<sup>b</sup>     *Indeks Mutu Hidup Jawa Barat Tahun 1990.* Bandung

KUZNETS, Simon

- 1966      *Modern Economic Growth.* New Heaven. Yale : University Press

UNITED NATIONS (UN)

- 1983      *Manual X: Indirect Techniques for Demographic Estimation.*  
Population Studies, No. 81 ST/ESA/SER.A/81. New York